




# *Rancangan* **RENCANA STRATEGIS 2025-2029**

*Riau Rumah Rumpun Melayu*  
**Merawat Tuah, Menjaga Marwah  
Takkan Melayu Hilang di Bumi**

**BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH  
PROVINSI RIAU**

 [program.bkd.riau@gmail.com](mailto:program.bkd.riau@gmail.com)



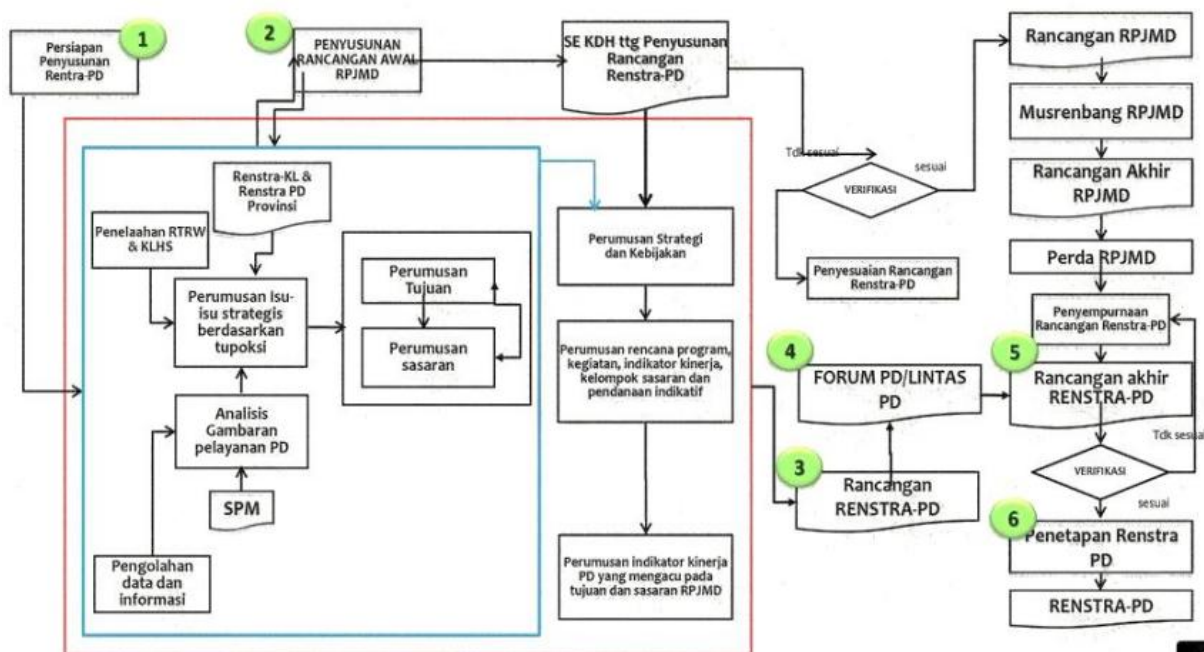
# BAB I PENDAHULUAN

## 1.1. LATAR BELAKANG

Rencana Strategis (Renstra) Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Riau Tahun 2025-2029 disusun sebagai instrumen perencanaan jangka menengah yang memuat tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan bidang kepegawaian daerah sesuai dengan tugas dan fungsi BKD Provinsi Riau. Dokumen ini merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Riau Tahun 2025-2029 yang menjadi pedoman dalam perencanaan dan pelaksanaan program dan kegiatan BKD Provinsi Riau selama lima tahun mendatang.

Penyusunan Renstra BKD Provinsi Riau mengikuti alur dan tata cara sebagaimana digambarkan berikut ini:

Gambar 1.1  
Tahapan dan Tata Cara Penyusunan Renstra Perangkat Daerah



Alur tersebut memastikan bahwa Renstra disusun secara sistematis dan selaras dengan kebutuhan organisasi.

Seiring dengan dinamika perubahan lingkungan strategis yang bergerak cepat dan kompleks, manajemen Aparatur Sipil Negara (ASN) di Provinsi Riau dihadapkan pada berbagai tantangan yang menuntut penanganan secara profesional dan komprehensif. Reformasi birokrasi yang masih berlangsung menuntut adanya percepatan transformasi tata kelola ASN yang lebih adaptif, transparan, dan berorientasi pada kinerja. Implementasi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara telah mengubah paradigma pengelolaan ASN dari pendekatan administratif menuju pendekatan manajemen berbasis meritokrasi.

Provinsi Riau dengan posisi geografis yang strategis dan karakteristik wilayah yang cukup beragam membutuhkan perencanaan SDM aparatur yang mampu

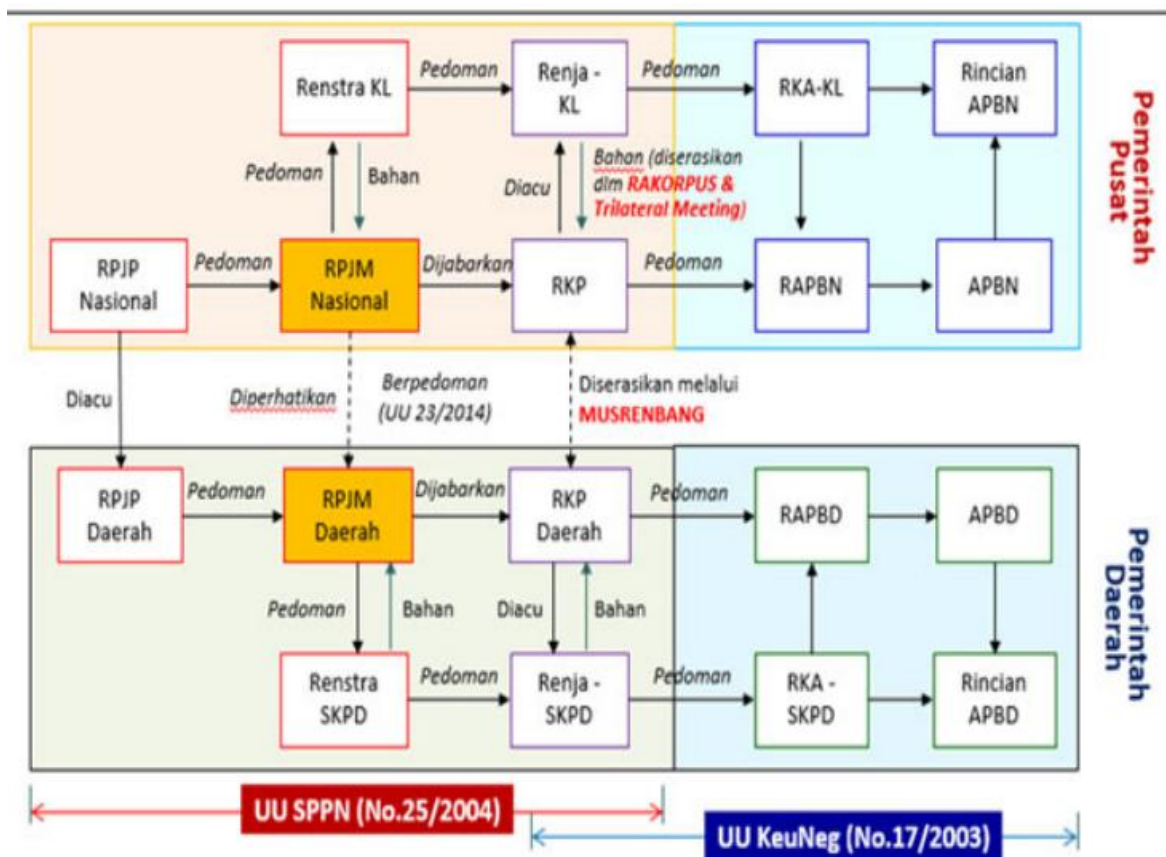
mendukung pencapaian visi pembangunan daerah. Dengan jumlah ASN yang mencapai 22.409 per 31 Desember 2024 yang tersebar di berbagai Organisasi Perangkat Daerah (OPD), BKD Provinsi Riau memiliki tanggung jawab besar dalam memastikan ketersediaan aparatur yang profesional, berintegritas, dan berkinerja tinggi.

Tantangan utama pengelolaan ASN di Provinsi Riau saat ini antara lain adalah pemenuhan kebutuhan aparatur yang sesuai dengan beban kerja dan kompetensi jabatan, pengembangan kapasitas SDM aparatur, penataan sistem informasi kepegawaian yang terintegrasi, serta pengembangan budaya kerja yang berorientasi pada pelayanan dan kinerja. Di sisi lain, implementasi kebijakan nasional seperti transformasi digital pemerintahan dan penerapan manajemen talenta dalam penempatan pegawai dalam jabatan-jabatan kritikal juga menuntut kesiapan aparatur yang memadai.

Renstra BKD Provinsi Riau 2025-2029 disusun dengan mempertimbangkan evaluasi kinerja pelaksanaan Renstra periode sebelumnya, serta mengakomodasi berbagai perubahan regulasi dan kebijakan di bidang kepegawaian. Dokumen ini akan menjadi acuan bagi BKD Provinsi Riau dalam mengembangkan program dan kegiatan strategis yang mampu menjawab tantangan dan isu strategis kepegawaian, sekaligus mendukung pencapaian visi dan misi Gubernur Riau periode 2025-2029.

Renstra BKD Provinsi Riau 2025-2029 memiliki keterkaitan dan keselarasan dengan berbagai dokumen perencanaan lainnya, baik di tingkat nasional maupun daerah, sebagaimana ditunjukkan dalam bagan berikut:

Gambar 1.2  
Keterkaitan Renstra Perangkat Daerah dengan RPJMD, Renstra K/L dan Renstra provinsi/kabupaten/kota, dan dengan Renja Perangkat Daerah



Keterkaitan tersebut memastikan bahwa arah pembangunan bidang kepegawaian di Provinsi Riau sejalan dengan prioritas pembangunan nasional dan daerah.

Dengan penempatan gambar seperti ini, dokumen Anda akan memiliki alur yang logis dan membantu pembaca memahami proses penyusunan Renstra serta posisinya dalam sistem perencanaan pembangunan secara keseluruhan.

## **1.2. DASAR HUKUM**

Renstra Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Riau Tahun 2025-2029 ini disusun dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai landasan hukum yaitu:

- 1) 1.Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- 2) 2.Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4421);
- 3) 3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagai mana telah di ubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5679);
- 4) 4.Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2022 tentang Provinsi Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 162, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6808);
- 5) 5.Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
- 6) 6.Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nmr 194, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 6987);
- 7) 7.Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2025 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
- 8) 8.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
- 9) 9.Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
- 10) 10.Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);

- 11) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157)
- 12) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
- 13) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
- 14) Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
- 15) Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 Perubahan Kedua atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah
- 16) Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029.
- 17) Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 5 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Riau (Lembar Daerah Provinsi Riau Tahun 2024 Nomor 5)
- 18) Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 14 Tahun 2024 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Riau Tahun 2025 – 2045 (Lembaran Daerah Tahun 2024 Nomor 4);
- 19) Peraturan Gubernur Riau Nomor 5 Tahun 2024 tentang Rencana Aksi Daerah penghormatan, Perlindungan, dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas Provinsi Riau Tahun 2024-2029 (Berita Daerah Provinsi Riau Tahun 2024 Nomor 5);
- 20) Peraturan Gubernur Riau Nomor 24 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 53 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Provinsi Riau Tahun 2024 Nomor 24);

### **1.3. MAKSUD DAN TUJUAN**

Penyusunan Renstra BKD Provinsi Riau Tahun 2025-2029 dimaksudkan sebagai:

1. Pedoman perencanaan strategis bagi BKD Provinsi Riau dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya di bidang manajemen kepegawaian daerah selama periode 2025-2029.
2. Instrumen penyelarasan program dan kegiatan BKD Provinsi Riau dengan arah kebijakan dan prioritas pembangunan daerah yang tertuang dalam RPJMD Provinsi Riau 2025-2029.
3. Acuan dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) tahunan BKD Provinsi Riau yang akan diimplementasikan dalam periode 2025-2029.

4. Dokumen perencanaan yang memuat komitmen BKD Provinsi Riau dalam mendukung pencapaian visi dan misi kepemimpinan daerah melalui pengelolaan ASN yang profesional dan berintegritas.

Adapun tujuan penyusunan Renstra BKD Provinsi Riau Tahun 2025-2029 adalah:

1. Merumuskan tujuan, sasaran, strategi, dan arah kebijakan BKD Provinsi Riau yang selaras dengan RPJMD Provinsi Riau 2025-2029.
2. Menetapkan program dan kegiatan prioritas BKD Provinsi Riau dalam mendukung pencapaian sasaran pembangunan daerah di bidang kepegawaian.
3. Mengidentifikasi indikator kinerja utama dan target capaian BKD Provinsi Riau sebagai ukuran keberhasilan pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang kepegawaian daerah.
4. Menjadi instrumen akuntabilitas kinerja BKD Provinsi Riau dalam penyelenggaraan urusan kepegawaian daerah.
5. Menyediakan kerangka pemantauan dan evaluasi kinerja BKD Provinsi Riau secara sistematis dan terukur selama periode 2025-2029.

#### **1.4. SISTEMATIKA PENULISAN**

Mengacu pada Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029, sistematika penulisan Renstra BKD Provinsi Riau Tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut:

##### **Bab I – Pendahuluan**

Bab ini memuat latar belakang penyusunan Renstra, dasar hukum, maksud dan tujuan, serta sistematika penulisan dokumen.

##### **Bab II – Gambaran Pelayanan, Permasalahan, dan Isu Strategis**

Bab ini menjelaskan tugas, fungsi, dan struktur organisasi BKD Provinsi Riau; sumber daya yang tersedia; kinerja pelayanan BKD; kelompok sasaran layanan; mitra BKD dalam penyelenggaraan pelayanan; serta permasalahan dan isu strategis bidang kepegawaian di Provinsi Riau.

##### **Bab III – Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Arah Kebijakan**

Bab ini menguraikan tujuan dan sasaran jangka menengah BKD Provinsi Riau, strategi dan arah kebijakan untuk mencapai tujuan dan sasaran tersebut.

##### **Bab IV – Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, dan Indikator Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan**

Bab ini memaparkan program, kegiatan, dan sub kegiatan BKD Provinsi Riau beserta indikator kinerja, target, dan pagu indikatif anggaran. Bab ini juga mengidentifikasi program dan kegiatan yang mendukung program prioritas pembangunan daerah serta target Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja Kunci (IKK).

##### **Bab V – Penutup**

Bab ini berisi kesimpulan substantif terkait Renstra BKD Provinsi Riau, kaidah pelaksanaan, serta mekanisme pengendalian dan evaluasi.

## **BAB II**

### **GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN, DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH**

#### **2.1. Gambaran Pelayanan Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Riau**

##### **2.1.1. Tugas, Fungsi, Tata Kerja dan Struktur Organisasi**

Dasar hukum pelaksanaan tugas, fungsi, tata kerja dan struktur organisasi BKD Provinsi Riau selaku perangkat daerah penyelenggaraan urusan penunjang pemerintahan daerah di bidang kepegawaian adalah Peraturan Gubernur Riau Nomor 4 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Riau Nomor 53 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah. Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Riau memiliki UPT Penilaian Kompetensi yang dibentuk berdasarkan Peraturan Gubernur Riau Nomor 20 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Riau Nomor 81 Tahun 2017 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis pada Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Riau.

Badan Kepegawaian Daerah menyelenggarakan tugas membantu Gubernur melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan di bidang kepegawaian yang menjadi kewenangan daerah. Kepala Badan merupakan Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, melaksanakan tugas dan fungsinya dengan dibantu oleh Sekretaris, Kepala Bidang. Dan Kepala UPT selaku Pejabat Administrator. Kepala Badan berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

Susunan Struktur Organisasi Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Riau adalah sebagai berikut:

1. Kepala Badan
2. Sekretariat, terdiri dari:
  - a. Subbagian Kepegawaian dan Umum
  - b. Subbagian Keuangan, Perlengkapan dan Pengelola Barang Milik Daerah
3. Bidang Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian.
4. Bidang Mutasi;
5. Bidang Pengembangan Aparatur;
6. Bidang Pendayagunaan dan Pembinaan;
7. Kelompok Jabatan Fungsional;
8. Unit Pelaksana Teknis Penilaian Kompetensi, terdiri dari:
  - a. Sub Bagian Tata Usaha
  - b. Seksi Penyelenggaraan Penilaian Kompetensi
  - c. Seksi Pengembangan Penilaian Kompetensi

Badan Kepegawaian Daerah dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

- a. Perumusan kebijakan Kesekretariatan, Bidang Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian, Bidang Mutasi, Bidang Pengembangan Aparatur, dan Bidang Pendayagunaan dan Pembinaan.
- b. Pelaksanaan tugas dukungan teknis Kesekretariatan, Bidang Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian, Bidang Mutasi, Bidang Pengembangan Aparatur, dan Bidang Pendayagunaan dan Pembinaan.
- c. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis Kesekretariatan, Bidang Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian, Bidang Mutasi, Bidang Pengembangan Aparatur, dan Bidang Pendayagunaan dan Pembinaan.
- d. Pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan Daerah pada Kesekretariatan, Bidang Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi

Kepegawaian, Bidang Mutasi, Bidang Pengembangan Aparatur, dan Bidang Pendayagunaan dan Pembinaan; dan

- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur terkait dengan tugas dan fungsinya

### **Sekretariat**

Sekretariat bertugas menyelenggarakan pelayanan administrasi yang mencakup perencanaan program, keuangan, perlengkapan, pengelolaan barang milik daerah, kepegawaian, dan aspek umum. Tugas ini dilakukan melalui berbagai fungsi utama:

- a. Koordinasi dan fasilitasi administrasi dalam penyusunan dokumen strategis seperti Renstra, Rencana Kerja, Perjanjian Kinerja, dan Laporan Kinerja.
- b. Penyusunan serta pembinaan standar operasional prosedur (SOP) yang berkaitan dengan perencanaan program, keuangan, pengelolaan aset, serta administrasi kepegawaian.
- c. Pelaksanaan administrasi terkait keuangan, perlengkapan, pengelolaan barang milik daerah, serta aspek kepegawaian dan umum.
- d. Monitoring dan evaluasi program kerja serta pelaporan hasil kegiatan.
- e. Pelaksanaan tugas kedinasan lainnya sesuai arahan pimpinan.

Dalam menjalankan tugasnya, Sekretaris dibantu oleh Jabatan Pengawas dan Kelompok Jabatan Fungsional.

### **Subbagian Kepegawaian dan Umum**

Subbagian Kepegawaian dan Umum bertanggung jawab atas aspek administrasi kepegawaian dan kebutuhan umum perangkat daerah. Tugasnya mencakup:

- a. Penyusunan dan perumusan tugas jabatan pelaksana serta uraian kegiatan pada kelompok jabatan fungsional.
- b. Koordinasi dan fasilitasi perencanaan program/kegiatan dan penganggaran kepegawaian.
- c. Pembinaan dan pelaksanaan standar operasional prosedur pelayanan kepegawaian.
- d. Pengelolaan fasilitas rapat, keprotokolan, dan publikasi informasi kepada masyarakat.
- e. Pengadaan serta pemeliharaan sarana dan prasarana kantor untuk mendukung operasional instansi.
- f. Administrasi terkait pegawai, mulai dari kartu pegawai, penghargaan, analisis jabatan, hingga validasi dan pemutakhiran data kepegawaian.

### **Subbagian Keuangan, Perlengkapan, dan Pengelolaan Barang Milik Daerah**

Subbagian Keuangan, Perlengkapan, dan Pengelolaan Barang Milik Daerah bertugas mengelola keuangan dan barang milik daerah dengan fungsi utama sebagai berikut:

- a. Perencanaan program/kegiatan dan penganggaran operasional subbagian.
- b. Penyusunan serta pembinaan SOP terkait pengelolaan keuangan dan aset.
- c. Administrasi keuangan seperti penatausahaan anggaran, pengelolaan sistem akuntansi, dan penyusunan laporan keuangan.
- d. Dokumentasi dan perencanaan kebutuhan barang milik daerah.
- e. Koordinasi penyelesaian hasil pemeriksaan dan tindak lanjut dari laporan pemeriksaan.
- f. Administrasi terkait Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi (TP-TGR).
- g. Pengawasan dan evaluasi kegiatan pengadaan barang dan jasa.

## **Bidang Pengadaan, Pemberhentian, dan Informasi Kepegawaian**

Bidang Pengadaan, Pemberhentian, dan Informasi Kepegawaian menangani aspek perencanaan dan pengadaan pegawai, pensiun, serta pengelolaan informasi kepegawaian. Tugasnya meliputi:

- a. Penyusunan program/kegiatan yang berkaitan dengan pengadaan dan pemberhentian pegawai.
- b. Pembinaan SOP bidang pengadaan dan informasi kepegawaian.
- c. Pengelolaan sistem informasi kepegawaian untuk mendukung perencanaan SDM ASN.
- d. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan terkait pengadaan dan pemberhentian ASN.

## **Bidang Mutasi**

Bidang Mutasi bertugas mengelola penataan jabatan ASN. Fungsi utamanya meliputi:

- a. Penyusunan kebijakan dan SOP mutasi jabatan.
- b. Pengkajian dan perencanaan program/kegiatan di bidang mutasi.
- c. Pengelolaan kenaikan pangkat.
- d. Pelaksanaan mutasi dalam bentuk promosi, rotasi, atau peralihan jabatan.
- e. Evaluasi serta pemantauan pelaksanaan kebijakan mutasi pegawai.

## **Bidang Pengembangan Aparatur**

Bidang Pengembangan Aparatur bertanggung jawab atas pengembangan SDM ASN melalui berbagai aspek seperti pelatihan dan peningkatan kompetensi. Tugasnya mencakup:

- a. Penyusunan kebijakan pengembangan SDM ASN.
- b. Perencanaan dan fasilitasi pendidikan dan pelatihan kompetensi manajerial serta teknis.
- c. Evaluasi efektivitas program pengembangan aparatur untuk peningkatan kinerja pegawai.

## **Bidang Pendayagunaan dan Pembinaan**

Bidang Pendayagunaan dan Pembinaan memastikan kepatuhan serta profesionalisme ASN dengan tugas utama:

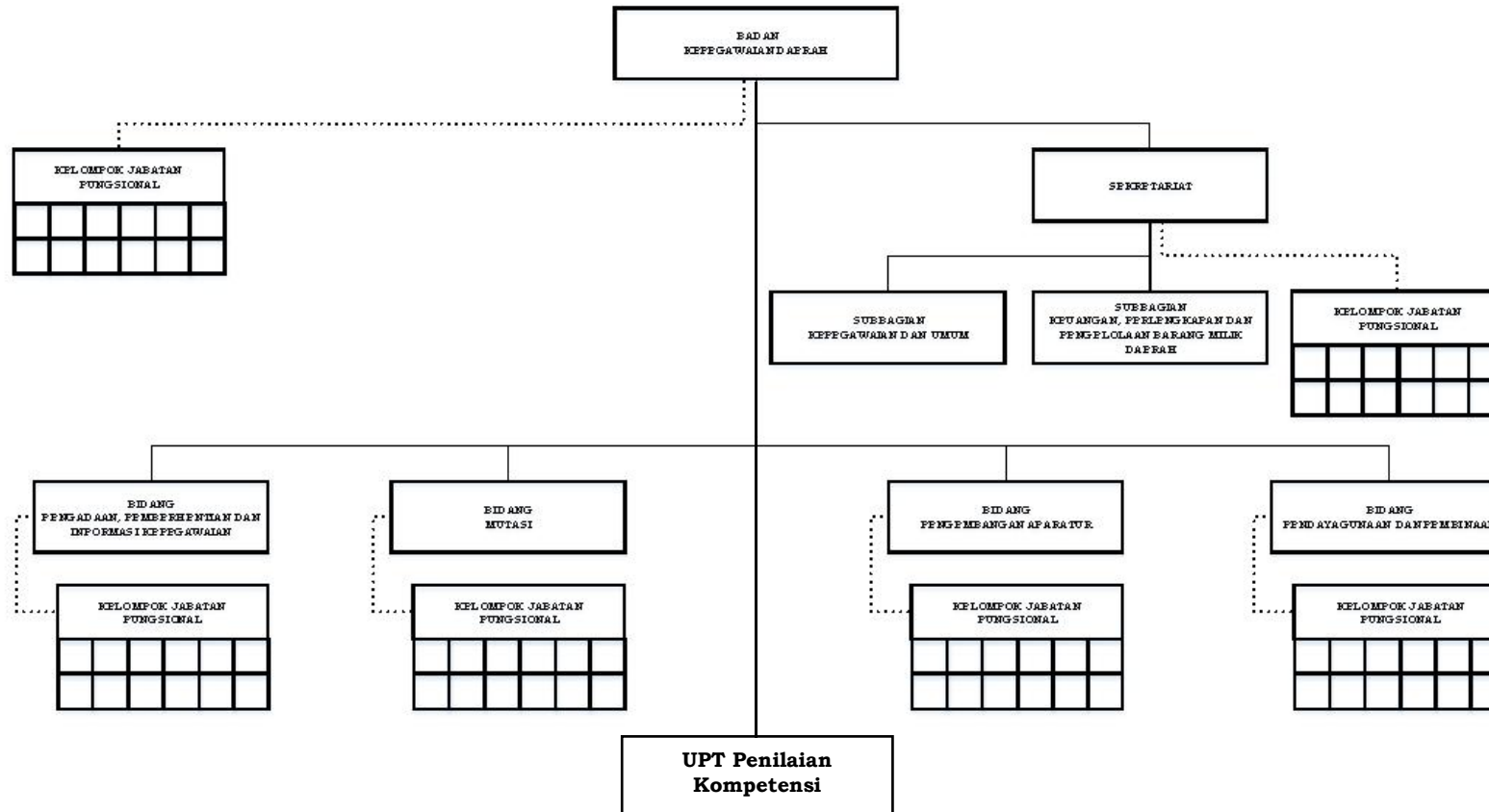
- a. Pengelolaan sistem penilaian kinerja pegawai dan penghargaan.
- b. Pengawasan disiplin ASN serta evaluasi organisasi profesi.
- c. Fasilitasi pembinaan dan pendayagunaan SDM melalui berbagai kebijakan strategis.

## **UPT. Penilaian Kompetensi**

UPT Penilaian Kompetensi berperan dalam menilai dan memetakan kompetensi ASN guna mendukung sistem merit dalam manajemen kepegawaian. Tugasnya mencakup:

- a. Penyelenggaraan Assessment Center untuk seleksi dan evaluasi jabatan PNS berdasarkan standar kompetensi.
- b. Pengembangan dan implementasi standar kompetensi jabatan.

Gambar 2.1. Struktur Organisasi Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Riau



### 2.1.2. Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia merupakan elemen sentral dan strategis dalam suatu organisasi, berperan sebagai penggerak utama dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi organisasi. Selain SDM, sumber daya lain seperti infrastruktur dan sistem pendukung juga berkontribusi terhadap efektivitas operasional.

Berdasarkan data dari Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian, Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Riau saat ini didukung oleh 109 Aparatur Sipil Negara (ASN), terdiri dari 101 Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan 8 Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Informasi lebih lanjut mengenai komposisi Sumber Daya Manusia BKD Provinsi Riau dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 2.1.**  
**Jumlah ASN BKD Provinsi Riau Menurut Jenis Kelamin Tahun 2024**

NO	JENIS KELAMIN	PNS	PPPK	JUMLAH	%
1	2	3	4	5	6
1.	Laki-Laki	51	6	56	51,37
2.	Perempuan	50	2	53	48,63
<b>JUMLAH</b>		<b>101</b>	<b>8</b>	<b>109</b>	<b>100</b>

*Sumber Data: Laporan Rekapitulasi ASN BKD Provinsi Riau Tahun 2024*

**Tabel 2.2.**  
**Pegawai Negeri Sipil Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Riau Berdasarkan Jabatan Tahun 2024**

NO	JABATAN	PNS		JUMLAH	PPPK		JUMLAH
		Lk	Pr		Lk	Pr	
1	2	3	4	5	7	8	9
1.	Pejabat Tinggi Pratama	1	-	1			
2.	Pejabat Administrator	5	1	6			
3.	Pejabat Pengawas	4	1	5			
4.	Arsiparis	-	1	1	1		1
5.	Perencana	3	-	3			
6.	Analisis SDM Aparatur	16	13	29	3	1	4
7.	Asessor	4	11	15			
6.	Pranata Komputer	2	-	2	1		1
8.	Pranata SDM Aparatur	1	-	1		1	1
9.	Analisis Hukum				1		1
10.	Pelaksana	15	23	38			
<b>TOTAL</b>		<b>51</b>	<b>50</b>	<b>101</b>	<b>6</b>	<b>2</b>	<b>8</b>

**Tabel 2.3.**  
**Pegawai Negeri Sipil Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Riau**  
**Berdasarkan Golongan/Ruang Tahun 2024**

NO	GOL. RUANG	LAKI-LAKI	%	PEREMPUAN	%	JUMLAH	%
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Golongan IV	14	27%	10	20%	24	24%
2.	Golongan III	34	66%	40	80%	74	73%
3.	Golongan II	3	6%	-	0%	3	3%
4.	Golongan I	-	0%	-	0%	0	0%
<b>JUMLAH</b>		<b>51</b>	<b>100%</b>	<b>50</b>	<b>100%</b>	<b>101</b>	<b>100%</b>

**Tabel 2.4.**  
**Aparatur Sipil Negara Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Riau**  
**Berdasarkan Tingkat Pendidikan Tahun 2024**

NO	PENDIDIKAN	LK	%	PR	%	JUMLAH	%
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Strata 3	1	1.7%	-	0%	1	0.9%
2.	Strata 2	26	46%	23	44%	49	45%
3.	Strata 1/ Diploma IV	27	54%	27	52%	54	49%
4.	Diploma III	-	0%	2	3.8%	2	1.8%
5.	SLTA / Sederajat	3	5.2%	-	0%	3	2.7%
6.	SLTP/ Sederajat	-	0%	-	0%		0%
<b>JUMLAH</b>		<b>57</b>	<b>100%</b>	<b>52</b>	<b>100%</b>	<b>109</b>	<b>100%</b>

**Tabel 2.5.**  
**Pegawai Tidak Tetap Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Riau**  
**Berdasarkan Penugasan Tahun 2024**

NO	PENUGASAN	LK	%	PR	%	JUMLAH	%
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Tenaga Akuntansi	-		1		1	
2.	Operator Komputer	19		18		37	
3.	Tenaga Keamanan	17		2		19	
4.	Tenaga Kebersihan	7		8		15	
5.	Tenaga Teknis Lapangan	1		-		1	
6.	Pengawas Kelistrikan	1		-		1	
<b>JUMLAH</b>		<b>45</b>		<b>29</b>		<b>74</b>	

### 2.1.3. Sarana dan Prasarana

Untuk mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi, Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Riau memiliki satu lokasi gedung perkantoran, yaitu Gedung Utama yang berlokasi di Jalan Cut Nyak Dien, Pekanbaru. Gedung ini berfungsi sebagai pusat administrasi dan operasional dalam penyelenggaraan layanan kepegawaian di lingkungan pemerintah daerah.

Selain gedung utama, BKD Provinsi Riau juga didukung oleh berbagai sarana dan prasarana pendukung yang berperan dalam meningkatkan efektivitas kerja dan pelayanan. Rincian sarana dan prasarana yang tersedia dapat dilihat pada Tabel 2.5 berikut:

**Tabel 2.6.**  
**Sarana dan Prasarana Pendukung Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Riau Tahun 2024**

NO	SARANA/ PRASARANA	JUMLAH	KONDISI
1	2	3	4
1.	Gedung Perkantoran	1 unit	Baik
2.	Kendaraan Dinas Jabatan	7 unit	Baik
3.	Kendaraan Operasional R4	3 unit	Baik
4.	Kendaraan Operasional R2	8 unit	Baik

### 2.1.4. Sumber Daya Pendukung Lainnya

Selain Sumber Daya Manusia dan Sarana dan Prasarana, Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Riau juga memiliki sumber daya pendukung lain yang mendukung kelancaran administrasi dan pelayanan kepegawaian dalam bentuk sistem informasi. Sistem utama yang digunakan adalah Sistem Informasi Terintegrasi Manajemen ASN (SIGMA). SIGMA merupakan aplikasi yang dikembangkan oleh BKD Provinsi Riau untuk meningkatkan efektivitas, efisiensi, dan akurasi dalam pengelolaan data serta layanan kepegawaian di lingkungan Pemerintah Provinsi Riau.

Dengan sistem ini, berbagai layanan kepegawaian dapat diakses secara digital, antara lain:

- a. Pengelolaan data kepegawaian, termasuk pemutakhiran informasi pegawai,
- b. Pelayanan administrasi kepegawaian
- c. Monitoring dan evaluasi administrasi kepegawaian guna memastikan transparansi dan akurasi data.

Implementasi SIGMA diharapkan dapat mengurangi beban administrasi, mempercepat proses layanan, serta meningkatkan kualitas data kepegawaian, sehingga mendukung sistem merit dalam manajemen ASN.



### 2.1.5. Kinerja Pelayanan Badan Kepegawaian Daerah

Kinerja pelayanan Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Riau diukur melalui berbagai indikator yang mencerminkan efektivitas, transparansi, serta akuntabilitas dalam pengelolaan aparatur sipil negara. Evaluasi ini bertujuan untuk memastikan bahwa sistem kepegawaian berjalan sesuai dengan prinsip meritokrasi dan mendukung tata kelola pemerintahan yang baik.

Penilaian kinerja pelayanan BKD mencakup beberapa aspek utama, antara lain:

- a. Capaian Indikator Kinerja Utama, yang menunjukkan keberhasilan BKD dalam mencapai target sasaran strategis yang telah ditetapkan.
- b. Hasil Penilaian MCP Korsupgah KPK Area Manajemen ASN, yang mengukur sejauh mana BKD memenuhi standar pencegahan korupsi dalam tata kelola ASN.
- c. Capaian IKK LPPD Urusan Kepegawaian, yang memberikan gambaran mengenai efektivitas pengelolaan SDM aparatur berdasarkan indikator kinerja pemerintahan daerah.
- d. Evaluasi Renstra Periode 2019-2024, sebagai bentuk refleksi terhadap pelaksanaan rencana strategis sebelumnya guna meningkatkan perencanaan ke depan.
- e. Capaian pelayanan administrasi kepegawaian pada masing-masing Bidang/UPT di lingkungan BKD Provinsi Riau

Hasil evaluasi ini menjadi dasar bagi BKD untuk meningkatkan pelayanan kepegawaian secara lebih profesional dan adaptif terhadap perkembangan sistem manajemen ASN. Data lebih rinci mengenai pencapaian kinerja dapat dilihat dalam tabel berikut.

### 2.1.5.1. Capaian Indikator Kinerja Utama

Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) mencerminkan seberapa efektif Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Riau dalam merealisasikan target yang telah ditetapkan dalam perencanaan strategis. Penilaian ini menjadi tolok ukur kinerja organisasi secara keseluruhan, khususnya dalam mendukung pencapaian sasaran pembangunan daerah melalui pengelolaan kepegawaian yang profesional dan berbasis merit.

**Tabel 2.7.**  
**Capaian Indikator Kinerja Utama Badan Kepegawaian Provinsi Riau Tahun 2020 s.d 2024**

Indikator	Target					Realisasi					Rasio Capaian Tahunan				
	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
<b>Indeks Sistem Merit</b>	236,60	246,60	255,91	266,14	276,79	293,50	297,50	300,50	318,0	325,5	124%	121%	117%	119%	100%

Indeks Sistem Merit adalah ukuran yang digunakan sebagai standar penilaian penerapan sistem merit pada Instansi Pemerintah. Sistem merit didefinisikan sebagai kebijakan dan manajemen ASN yang berdasarkan pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja, yang diberlakukan secara adil dan wajar dengan tanpa diskriminasi. Adapun kriteria Penilaian Indeks Sistem Merit dilakukan terhadap 8 aspek dengan pembobotan sebagai berikut:

**Tabel 2.8.**  
**Kriteria Penilaian Indeks Sistem Merit**

No	Aspek	Bobot	Nilai Maksimal
1	Perencanaan Kebutuhan	10%	40
2	Pengadaan	10%	40
3	Pengembangan Karier	30%	120
4	Promosi dan Mutasi	10%	40
5	Manajemen Kinerja	20%	80
6	Penggajian, Penghargaan dan Disiplin	10%	40
7	Perlindungan dan Pelayanan	4%	16
8	Sistem Informasi	6%	24
	<b>Total Indeks Sistem Merit</b>	<b>100%</b>	<b>400</b>

**Tabel 2.9.**  
**Kategori Tingkat Indeks Sistem Merit**

Kategori	Rentang Nilai	Predikat
IV	325 - 400	Sangat Baik
III	250 - 324	Baik
II	175 - 249	Kurang
I	100 - 174	Buruk

Berdasarkan tabel di atas realisasi capaian indeks sistem merit pada tahun 2024 adalah sebesar 325,5 dengan predikat sangat baik. Dengan diberlakukannya Sistem Merit instansi pemerintah akan mendapatkan beberapa manfaat diantaranya:

1. Sebagai dasar untuk memastikan bahwa implementasi Manajemen ASN sudah sesuai dengan norma, standar, prosedur, dan kriteria Manajemen ASN.
2. Memberikan informasi tentang tingkat penerapan sistem merit dan rekomendasi perbaikan.
3. Instansi dengan kategori "Sangat Baik" dapat memperoleh pengecualian dari ketentuan pengisian jabatan pimpinan tinggi secara terbuka.

#### **2.1.5.2. Hasil Penilaian MCP Korsupgah KPK Area Manajemen ASN**

Monitoring Center for Prevention (MCP) KPK merupakan instrumen penilaian yang menilai kepatuhan pemerintah daerah terhadap prinsip-prinsip pencegahan korupsi, termasuk dalam tata kelola manajemen ASN. Penilaian MCP pada area Manajemen ASN menjadi cerminan komitmen BKD dalam mendorong integritas, transparansi, dan akuntabilitas di bidang kepegawaian.

**Tabel 2.8.**  
**Hasil Penilaian MCP Korsupgah KPK Area Manajemen ASN**  
**Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Riau**  
**Tahun 2020 s.d 2024**

NO	ASPEK	CAPAIAN				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7
1	Manajemen ASN	83,7	92,65	81,14	85,22	90,31

#### **2.1.5.3. Capaian IKK LPPD Urusan Kepegawaian**

Indikator Kinerja Kunci (IKK) dalam Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) pada urusan kepegawaian memberikan gambaran kinerja BKD dalam konteks pelaksanaan tugas dan fungsi kepegawaian. Capaian ini menunjukkan kontribusi BKD terhadap penguatan tata kelola pemerintahan daerah melalui optimalisasi pengelolaan sumber daya manusia aparatur.

**Tabel 2.9.**  
**Capaian Indikator Kinerja Khusus (IKK) Urusan Kepegawaian**  
**Badan Kepegawaian Provinsi Riau**

No.	IKK Outcome	Formulasi	Capaian				
			Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Rasio Pegawai Pendidikan Tinggi dan Menengah/Dasar (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	$\frac{\text{Jumlah Pegawai dengan pendidikan PT ke atas}}{\text{Jumlah pegawai dengan pendidikan SMA ke bawah}} \times 100\%$	242.40%	268.72%	308.04%	329,51%	81,81%
2.	Rasio pegawai Fungsional (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	$\frac{\text{Jumlah pegawai PNS fungsional (di luar guru dan tenaga kesehatan)}}{\text{Jumlah pegawai pemerintah (PNS di luar guru & tenaga kesehatan)}} \times 100\%$	10.98%	12.46%	16.44%	23,36%	29,94%
3.	Rasio Jabatan Fungsional bersertifikat Kompetensi (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	$\frac{\text{Jumlah pegawai Fungsional yang memiliki sertifikat kompetensi}}{\text{Jumlah pegawai Fungsional (PNS di luar guru & tenaga kesehatan)}} \times 100\%$	100%	100%	100%	100%	92,43%

**Tabel 2.10.**  
**Data Profil PNS Pemerintah Provinsi Riau Tahun 2024**

NO	SKPD	JENIS KELAMIN			PENDIDIKAN (NON DIK DAN NAKES)			JAB (NON DIK DAN NAKES)				DIK NAKES	DISABILITAS	TOTAL ASN
		LAKI-LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH	SD-SLTA	DI-PT	JUMLAH	STRUKTURAL	FUNGSIONAL	PELAKSANA	JUMLAH			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	SEKRETARIAT DAERAH	248	176	<b>424</b>	56	368	<b>424</b>	35	100	289	<b>424</b>	0	0	<b>424</b>
2	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH	111	66	<b>177</b>	54	123	<b>177</b>	4	19	154	<b>177</b>	0	0	<b>177</b>
3	INSPEKTORAT DAERAH	70	63	<b>133</b>	3	130	<b>133</b>	7	100	26	<b>133</b>	0	0	<b>133</b>
4	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	84	79	<b>163</b>	22	141	<b>163</b>	8	52	103	<b>163</b>	0	1	<b>163</b>
5	BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH	29	13	<b>42</b>	2	40	<b>42</b>	7	20	15	<b>42</b>	0	0	<b>42</b>
6	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH	63	71	<b>134</b>	5	129	<b>134</b>	15	9	110	<b>134</b>	0	0	<b>134</b>
7	BADAN PENDAPATAN DAERAH	306	222	<b>528</b>	73	455	<b>528</b>	72	26	430	<b>528</b>	0	0	<b>528</b>
8	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH	51	50	<b>101</b>	3	98	<b>101</b>	12	51	38	<b>101</b>	0	0	<b>101</b>
9	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	65	42	<b>107</b>	17	90	<b>107</b>	8	41	58	<b>107</b>	0	0	<b>107</b>
10	BADAN	44	16	<b>60</b>	5	55	<b>60</b>	7	24	29	<b>60</b>	0	0	<b>60</b>

NO	SKPD	JENIS KELAMIN			PENDIDIKAN (NON DIK DAN NAKES)			JAB (NON DIK DAN NAKES)				DIK NAKES	DISABILITAS	TOTAL ASN
		LAKI-LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH	SD-SLTA	DI-PT	JUMLAH	STRUKTURAL	FUNGSIONAL	PELAKSANA	JUMLAH			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH DAN PEMADAM KEBAKARAN													
11	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	38	23	<b>61</b>	11	50	<b>61</b>	7	7	47	<b>61</b>	0	0	<b>61</b>
12	DINAS PENDIDIKAN	2144	4377	<b>6521</b>	271	1266	<b>1537</b>	23	809	705	<b>1537</b>	4984	2	<b>6521</b>
13	DINAS KESEHATAN	68	222	<b>290</b>	22	193	<b>215</b>	26	17	172	<b>215</b>	75	0	<b>290</b>
14	UPT BERSIFAT KHUSUS RUMAH SAKIT UMUM DAERAH ARIFIN ACHMAD	213	652	<b>865</b>	61	135	<b>196</b>	14	17	165	<b>196</b>	669	1	<b>865</b>
15	UPT BERSIFAT KHUSUS RUMAH SAKIT JIWA TAMPAN	69	197	<b>266</b>	10	53	<b>63</b>	9	7	47	<b>63</b>	203	0	<b>266</b>
16	UPT BERSIFAT KHUSUS RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PETALA BUMI	48	153	<b>201</b>	5	33	<b>38</b>	13	2	23	<b>38</b>	163	1	<b>201</b>
17	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN	341	126	<b>467</b>	115	352	<b>467</b>	52	18	397	<b>467</b>	0	0	<b>467</b>

NO	SKPD	JENIS KELAMIN			PENDIDIKAN (NON DIK DAN NAKES)			JAB (NON DIK DAN NAKES)				DIK NAKES	DISABILITAS	TOTAL ASN
		LAKI-LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH	SD-SLTA	DI-PT	JUMLAH	STRUKTURAL	FUNGSIONAL	PELAKSANA	JUMLAH			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	DAN PERTANAHAN													
18	DINAS SOSIAL	90	56	<b>146</b>	35	111	<b>146</b>	28	30	88	<b>146</b>	0	0	<b>146</b>
19	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	91	44	<b>135</b>	20	115	<b>135</b>	15	56	64	<b>135</b>	0	0	<b>135</b>
20	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	13	87	<b>100</b>	8	92	<b>100</b>	13	14	73	<b>100</b>	0	0	<b>100</b>
21	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA, KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	42	44	<b>86</b>	8	78	<b>86</b>	9	18	59	<b>86</b>	0	1	<b>86</b>
22	DINAS PANGAN, TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA	142	112	<b>254</b>	61	193	<b>254</b>	21	99	134	<b>254</b>	0	1	<b>254</b>
23	DINAS PERKEBUNAN	57	33	<b>90</b>	5	85	<b>90</b>	15	20	55	<b>90</b>	0	0	<b>90</b>
24	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN	460	161	<b>621</b>	198	423	<b>621</b>	72	183	366	<b>621</b>	0	0	<b>621</b>
25	DINAS	85	31	<b>116</b>	19	97	<b>116</b>	24	5	87	<b>116</b>	0	0	<b>116</b>

NO	SKPD	JENIS KELAMIN			PENDIDIKAN (NON DIK DAN NAKES)			JAB (NON DIK DAN NAKES)				DIK NAKES	DISABILITAS	TOTAL ASN
		LAKI-LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH	SD-SLTA	DI-PT	JUMLAH	STRUKTURAL	FUNGSIONAL	PELAKSANA	JUMLAH			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	PERHUBUNGAN													
26	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK	60	42	<b>102</b>	10	92	<b>102</b>	9	44	49	<b>102</b>	0	2	<b>102</b>
27	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH	108	95	<b>203</b>	36	167	<b>203</b>	27	45	131	<b>203</b>	0	0	<b>203</b>
28	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	44	54	<b>98</b>	15	83	<b>98</b>	3	25	70	<b>98</b>	0	0	<b>98</b>
29	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	58	28	<b>86</b>	19	67	<b>86</b>	5	16	65	<b>86</b>	0	0	<b>86</b>
30	DINAS KEBUDAYAAN	37	32	<b>69</b>	11	58	<b>69</b>	10	13	46	<b>69</b>	0	0	<b>69</b>
31	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	43	55	<b>98</b>	11	87	<b>98</b>	7	63	28	<b>98</b>	0	0	<b>98</b>
32	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	70	66	<b>136</b>	11	125	<b>136</b>	30	16	90	<b>136</b>	0	0	<b>136</b>
33	DINAS PARIWISATA	37	63	<b>100</b>	12	88	<b>100</b>	11	16	73	<b>100</b>	0	0	<b>100</b>
34	DINAS PETERNAKAN DAN	62	54	<b>116</b>	8	108	<b>116</b>	16	56	44	<b>116</b>	0	0	<b>116</b>

NO	SKPD	JENIS KELAMIN			PENDIDIKAN (NON DIK DAN NAKES)			JAB (NON DIK DAN NAKES)				DIK NAKES	DISABILITAS	TOTAL ASN
		LAKI-LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH	SD-SLTA	DI-PT	JUMLAH	STRUKTURAL	FUNGSIONAL	PELAKSANA	JUMLAH			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	KESEHATAN HEWAN													
35	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL	105	45	<b>150</b>	38	112	<b>150</b>	27	23	100	<b>150</b>	0	0	<b>150</b>
36	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	142	19	<b>161</b>	69	92	<b>161</b>	17	22	122	<b>161</b>	0	0	<b>161</b>
37	BADAN PENGHUBUNG	24	33	<b>57</b>	14	43	<b>57</b>	5	4	48	<b>57</b>	0	0	<b>57</b>
<b>JUMLAH PNS</b>		<b>5762</b>	<b>7702</b>	<b>13464</b>	<b>1343</b>	<b>6027</b>	<b>7370</b>	<b>683</b>	<b>2087</b>	<b>4600</b>	<b>7370</b>	<b>6094</b>	9	<b>13464</b>
1	SEKRETARIAT DAERAH	6	4	<b>10</b>	0	10	<b>10</b>	0	10	0	<b>10</b>	0	0	<b>10</b>
2	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH	0	1	<b>1</b>	0	1	<b>1</b>	0	1	0	<b>1</b>	0	0	<b>1</b>
3	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH	1	0	<b>1</b>	0	1	<b>1</b>	0	1	0	<b>1</b>	0	0	<b>1</b>
4	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH	6	2	<b>8</b>	0	8	<b>8</b>	0	8	0	<b>8</b>	0	0	<b>8</b>
5	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	16	5	<b>21</b>	10	11	<b>21</b>	0	21	0	<b>21</b>	0	0	<b>21</b>
6	DINAS PENDIDIKAN	2758	5677	<b>8435</b>	0	0	<b>0</b>	0	0	0	<b>0</b>	8435	0	<b>8435</b>
7	DINAS KESEHATAN	0	1	<b>1</b>	0	0	<b>0</b>	0	0	0	<b>0</b>	1	0	<b>1</b>
8	UPT BERSIFAT KHUSUS RUMAH	40	159	<b>199</b>	0	0	<b>0</b>	0	0	0	<b>0</b>	199	0	<b>199</b>

NO	SKPD	JENIS KELAMIN			PENDIDIKAN (NON DIK DAN NAKES)			JAB (NON DIK DAN NAKES)				DIK NAKES	DISABILITAS	TOTAL ASN
		LAKI-LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH	SD-SLTA	DI-PT	JUMLAH	STRUKTURAL	FUNGSIONAL	PELAKSANA	JUMLAH			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	SAKIT UMUM DAERAH ARIFIN ACHMAD													
9	UPT BERSIFAT KHUSUS RUMAH SAKIT JIWA TAMPAN	17	51	<b>68</b>	0	0	<b>0</b>	0	0	0	<b>0</b>	68	0	<b>68</b>
10	UPT BERSIFAT KHUSUS RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PETALA BUMI	20	51	<b>71</b>	0	0	<b>0</b>	0	0	0	<b>0</b>	71	0	<b>71</b>
11	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN	7	4	<b>11</b>	0	11	<b>11</b>	0	11	0	<b>11</b>	0	0	<b>11</b>
12	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	3	4	<b>7</b>	0	7	<b>7</b>	0	7	0	<b>7</b>	0	0	<b>7</b>
13	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA, KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	3	1	<b>4</b>	0	4	<b>4</b>	0	4	0	<b>4</b>	0	0	<b>4</b>
14	DINAS PANGAN, TANAMAN	11	17	<b>28</b>	8	20	<b>28</b>	0	28	0	<b>28</b>	0	0	<b>28</b>

NO	SKPD	JENIS KELAMIN			PENDIDIKAN (NON DIK DAN NAKES)			JAB (NON DIK DAN NAKES)				DIK NAKES	DISABILITAS	TOTAL ASN
		LAKI-LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH	SD-SLTA	DI-PT	JUMLAH	STRUKTURAL	FUNGSIONAL	PELAKSANA	JUMLAH			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	PANGAN DAN HORTIKULTURA													
15	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN	21	17	38	9	29	38	0	38	0	38	0	0	38
16	DINAS PERHUBUNGAN	0	2	2	0	2	2	0	2	0	2	0	0	2
17	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK	9	4	13	0	13	13	0	13	0	13	0	0	13
18	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH	1	6	7	2	5	7	0	7	0	7	0	0	7
19	DINAS KEBUDAYAAN	0	1	1	0	1	1	0	1	0	1	0	0	1
20	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	4	2	6	0	6	6	0	6	0	6	0	0	6
21	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	5	4	9	0	9	9	0	9	0	9	0	0	9
22	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN	2	2		0	4	4	0	4	0	4	0	0	4
<b>JUMLAH PPPK</b>		<b>2.930</b>	<b>6.015</b>	<b>8.945</b>	<b>29</b>	<b>142</b>	<b>171</b>	<b>-</b>	<b>171</b>	<b>-</b>	<b>171</b>	<b>8.774</b>	<b>0</b>	<b>8.945</b>
<b>JUMLAH TOTAL ASN</b>		<b>8.692</b>	<b>13.717</b>	<b>22.409</b>	<b>1.372</b>	<b>6.169</b>	<b>7.541</b>	<b>683</b>	<b>2.258</b>	<b>4.600</b>	<b>7.541</b>	<b>14.868</b>	<b>0</b>	<b>22.409</b>

**Tabel 2.11.**  
**Proyeksi Pensiun dan Kebutuhan PNS Berdasarkan Perangkat Daerah Provinsi Riau**

No	Nama Unit Organisasi Perangkat Daerah	Bezetting Pegawai Saat Ini	Kebutuhan Pegawai Berdasarkan ABK	Proyeksi											
				Jumlah yang akan Pensiun						Pegawai yang Dibutuhkan					
				2025	2026	2027	2028	2009	2030	2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	13	14	15	16	17	18
	<b>Jumlah Seluruhnya</b>	<b>7250</b>	<b>18017</b>	<b>235</b>	<b>579</b>	<b>576</b>	<b>522</b>	<b>540</b>	<b>553</b>	<b>1313</b>	<b>1123</b>	<b>1024</b>	<b>1040</b>	<b>54</b>	<b>56</b>
1	INSPEKTORAT DAERAH	140	229	3	5	3	3	9	4	4	4	4	1	1	1
2	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH	105	222	1	2	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
3	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	61	108	0	2	6	1	3	3	6	2	3	4	1	1
4	BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH			2	4	1	0	0	3					0	0
5	BADAN PENDAPATAN DAERAH	465	521	8	25	27	21	23	24	64	16	20	22	3	3
6	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	203	389	3	2	5	8	8	7	5		0	0	0	0
7	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN ASET DAERAH	131	247	1	1	0	1	1	2	14	15	15	15	2	2
8	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	105	167	4	7	3	3	8	4	2	3	1	0	0	0
9	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH DAN PEMADAM KEBAKARAN	64	132	1	1	4	3	1	3	2	0	0	1	0	0

No	Nama Unit Organisasi Perangkat Daerah	Bezetting Pegawai Saat Ini	Kebutuhan Pegawai Berdasarkan ABK	Proyeksi											
				Jumlah yang akan Pensiun						Pegawai yang Dibutuhkan					
				2025	2026	2027	2028	2009	2030	2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	13	14	15	16	17	18
10	BADAN PENGHUBUNG	62	92	1	1	4	1	2	4	1	4	2	1	0	0
11	DINAS PANGAN, TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA	290	702	9	18	16	15	18	16	18	19		26	3	3
12	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL	173	173	4	11	9	7	9	8	7	11	6	10	1	1
13	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	152	258	2	3	8	6	3	4	5	5	8	5	1	1
14	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN	113	275	1	2	5	5	6	3	34	34	31	15	2	2
15	DINAS PARIWISATA	18	17	2	4	2	3	4	5	1	0	2	0	0	0
16	DINAS PERHUBUNGAN	126	257	1	8	2	4	3	3	22	15	12	5	1	1
17	DINAS KEBUDAYAAN	75	154	0	1	5	6	2	3	4	11	10	9	1	1
18	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK	97	239	2	3	1	3	5	2	17	5	1	0	0	0
19	DINAS PERKEBUNAN	109	251	6	2	1	3	3	5	16	5	5	4	1	1
20	DINAS PENANAMAN MODAL PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	105	161	0	2	5	4	6	3	1	3	3	3	1	1

No	Nama Unit Organisasi Perangkat Daerah	Bezetting Pegawai Saat Ini	Kebutuhan Pegawai Berdasarkan ABK	Proyeksi											
				Jumlah yang akan Pensiun						Pegawai yang Dibutuhkan					
				2025	2026	2027	2028	2009	2030	2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	13	14	15	16	17	18
21	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN	672	2108	11	40	34	33	39	33	24	45	36	29	3	3
22	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA, KEPENDUDUKAN	96	200	1	7	3	4	2	4	5	6	4	2	1	1
23	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN DAN KOPERASI UKM	209	451	8	12	12	13	5	7	19	15	12	9	1	1
24	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK,	102	154	1	2	6	4	5	2	4	5	6	3	1	1
25	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	100	230	4	6	6	10	8	5	7	5	6	1	1	1
26	DINAS PENDIDIKAN	183	307	112	302	294	264	272	264	4	12	5	11	1	1
27	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	84	139	1	1	2	2	3	2	6	1	2	0	0	0
28	DINAS KESEHATAN	285	455	4	9	12	10	9	21	14	10	15	8	1	1
29	DINAS SOSIAL	148	286	5	13	9	9	6	4	21	36	46	56	5	6
30	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN, KAWASAN	492	1046	6	20	12	14	22	18	69	40	14	0	0	0
31	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	130	298	1	3	8	6	7	5	7	3	5	0	0	0

No	Nama Unit Organisasi Perangkat Daerah	Bezetting Pegawai Saat Ini	Kebutuhan Pegawai Berdasarkan ABK	Proyeksi											
				Jumlah yang akan Pensiun						Pegawai yang Dibutuhkan					
				2025	2026	2027	2028	2009	2030	2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	13	14	15	16	17	18
32	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH	193	206	2	5	10	10	2	13	5	4	13	7	1	1
33	SEKRETARIAT DAERAH	384	600	6	14	15	15	7	25	28	31	25	8	1	1
34	SATUAN POLISIPAMONG PRAJA	173	321	1	5	1	0	4	6	32	24	28	16	2	2
35	UPT BERSIFAT KHUSUS RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PETALA BUMI	227	701	2	6	5	3	3	4	105	91	57	29	3	3
36	UPT BERSIFAT KHUSUS RUMAH SAKIT UMUM DAERAH ARIFIN ACHMAD	912	4446	17	21	34	18	31	25	704	643	625	740	15	16
37	UPT BERSIFAT KHUSUS RUMAH SAKIT JIWA TAMPAN	266	1475	2	9	6	8	1	7	34	0	0	0	0	0

Tabel 2.12  
Realisasi Pelaksanaan Fasilitas Diklat Teknis/Fungsional PNS  
Pemerintah Provinsi Riau Tahun 2020-2024

NO	TAHUN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)
1	2	3	4	5
1.	2020	51 Orang	44 Orang	86.3
2.	2021	31 Orang	18 Orang	58.1
3.	2022	46 Orang	46 Orang	100
4.	2023	46 Orang	46 Orang	100
5.	2024	46 Orang	46 Orang	100

Tabel 2.13  
Jumlah ASN Pemerintah Provinsi Riau Yang Mengikuti Tugas Belajar

NO	TAHUN	JUMLAH ASN TUBEL	JUMLAH ASN	PERSENTASE
1	2021	14	14,989	0.09
2	2022	18	14,851	0.12
3	2023	15	14,221	0.11
4	2024	14	13464	0.10

Tabel 2.14  
Jumlah ASN Pemerintah Provinsi Riau Yang Mengikuti Diklat Teknis

NO	TAHUN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)
1.	2019	43	40	108
2.	2020	51	44	116
3.	2021	31	18	172
4.	2022	46	46	100
5.	2023	46	46	100
6.	2024	46	46	100

Tabel 2.15  
Jumlah ASN Pemerintah Provinsi Riau Yang Mengikuti Diklat Fungsional

NO	URAIAN	TAHUN												
		2019		2020		2021		2022		2023		2024		
		L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	
1	Administrator Kesehatan	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	
2	Analisis Kepegawaian	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
3	Analisis Pasar Hasil Pertanian	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
4	Analisis Akuakultur	-	-	-	-	-	-	-	-	1				
5	Analisis Kebijakan	-	-	-	-	-	-	-	-	1	7	2	2	
6	Apoteker	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
7	Arsiparis	1	1	-	1	-	1	11	16	3	3	10	4	
8	Asisten Apoteker	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
9	Assessor SDM Aparatur	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
10	Auditor	-	-	-	-	1	-	6	5	4	9	17		
11	Auditor Kepegawaian	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		

NO	URAIAN	TAHUN											
		2019		2020		2021		2022		2023		2024	
		L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P
12	Bidan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
13	Dokter	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
14	Dokter Gigi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
15	Dokter Pendidik Klinis	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
16	Fisikawan Medis	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
17	Fisioterapis	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
18	Guru	80	90	70	104	-	-	-	-	-	-		
19	Inspektur Ketenagalistrikan	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1		
20	Instruktur	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
21	Mediator Hubungan Industrial	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	
22	Medik Veteriner	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	4	
23	Nutrisionis	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
24	Pamong Budaya	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
25	Pamong Praja	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-		
26	Paramedik Veteriner	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-		
27	Pekerja Sosial	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
28	Peneliti	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1		
29	Penera	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
30	Pengantar Kerja	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
31	Pengawas Benih Tanaman	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
32	Pengawas Bibit Ternak	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
33	Pengawas Perikanan	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-		
34	Pengawas Ketenagakerjaan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
35	Pengawas Mutu Pakan	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-		
36	Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Daerah (P2UPD)	-	-	-	-	2	-	-	-	2	-		
37	Pengendali Ekosistem Hutan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
38	Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
39	Pengendali Dampak Lingkungan (Pedal)	-	-	-	-	-	-	-	-	4	11		
40	Penguji Kendaraan Bermotor	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
41	Penguji Mutu Barang	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
42	Penyuluh Kehutanan	1	2	-	1	-	-	-	-	-	-		
43	Penyuluh Lingkungan Hidup (Pelhi)	-	-	-	-	-	-	-	-	22	8		
44	Penyuluh Perikanan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
45	Penyuluh Perindustrian dan Perdagangan	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
46	Penyuluh Pertanian	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
47	Penyuluh Sosial	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
48	Perawat	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
49	Perawat Gigi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
50	Perekam Medis	1	1	1	1	-	-	-	-	-	-		

NO	URAIAN	TAHUN											
		2019		2020		2021		2022		2023		2024	
		L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P
51	Perekayasa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
52	Perencana	4	3	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
53	Polisi Kehutanan	1	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	5
54	Pranata Hubungan Masyarakat	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
55	Pranata Komputer	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
56	Pranata Laboratorium Kesehatan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
57	Pranata Laboratorium Kesehatan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
58	Pustakawan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
59	Radiografer	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
60	Statistisi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
61	Teknik Elektromedis	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
62	Widyaiswara	-	-	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-
63	Empidemiologi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64	Pengelola PJB	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
65	Penata Ruang	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
66	Surveyor Pemetaan	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
67	Substantif Pengawas Pemerintah	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
68	Sanitarian	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Jumlah ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal</b>		<b>92</b>	<b>98</b>	<b>73</b>	<b>109</b>	<b>4</b>	<b>1</b>	<b>21</b>	<b>25</b>	<b>39</b>	<b>42</b>	<b>34</b>	<b>11</b>

Tabel 2.16  
Jumlah ASN Pemerintah Provinsi Riau Yang Mengikuti Uji Kompetensi

NO	JENIS UJI KOMPETENSI	2023		2024	
		L	P	L	P
1	Fungsional Analis Kebijakan	2	-	-	2
2	Jabatan Pranata Humas	1	-	-	-
3	Fungsional Analis Keuangan Pusat dan Daerah	1	-	3	3
4	Fungsional perencana	8	7	22	11
5	Fungsional Auditor	2	-	-	-
6	Fungsional Arsiparis	4	9	6	9
7	Fungsional Analis Kepegawaian	-	4	-	-
8	Fungsional Pengawas Benih Tanaman	2	2	4	-
9	Fungsional Analis Perdagangan	11	9	-	-
10	Fungsional Pengawas Penyelenggara Urusan Pemerintah Daerah	1	1	-	-
11	Jabatan Fungsional Analis Sumber Daya Aparatur	8	7	-	-
12	Jabatan Fungsional Penyuluh Lingkungan	1	1	-	-
13	Jabatan Fungsional Polisi Kehutanan	19	-	-	-
14	Jabatan Fungsional Statistisi	1	-	-	-
15	Fungsional Pengawas Bibit Ternak	1	-	-	-
16	Fungsional Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan	3	-	-	-

NO	JENIS UJI KOMPETENSI	2023		2024	
		L	P	L	P
17	Fungsional Penyuluh Pertanian	1	-	-	-
18	Fungsional Prasarana dan Sarana Pertanian	1		-	-
19	Fungsional Penguji Mutu Barang	2	1	-	-
20	Fungsional Penyuluh Perindustrian dan Perdagangan	2	2	-	-
21	Jabatan Fungsional Pranata Komputer	1		-	-
22	Jabatan Fungsional Pustakawan		1	-	-
23	Fungsional Penyuluh Sosial	1		-	-
24	Fungsional Legislatif	1	1	-	-
25	Fungsional Penata Kelola Perumahan	1	-	-	-
26	Fungsional Analisis Keuangan Pusat dan Daerah	1	-	-	-
27	Fungsional Penata Kelola Perumahan	1	-	-	-
28	Fungsional Pengadaan Barang/Jasa (PPBJ)	1	-	-	-
29	Fungsional Surveyor Pemetaan	1	-	-	-
30	Fungsional Inspektur Ketenagalistrikan	5	-	-	-
<b>TOTAL</b>		<b>84</b>	<b>45</b>	<b>35</b>	<b>25</b>

Tabel 2.17  
Jumlah Pejabat Pemerintah Provinsi Riau Yang Telah Mengikuti PKN I dan II

NO	PELATIHAN KEPEMIMPINAN NASIONAL	TAHUN											
		2019		2020		2021		2022		2023		2024	
		L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P
1	PKN TK.I	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
2	PKN TK.II	1	-	-	-	4	1	4	1	4	-	4	1
<b>TOTAL</b>		<b>2</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>5</b>	<b>1</b>	<b>4</b>	<b>1</b>	<b>4</b>	<b>-</b>	<b>4</b>	<b>1</b>

#### 2.1.5.4. Evaluasi Renstra Periode 2019-2024

Evaluasi terhadap pelaksanaan Renstra BKD Provinsi Riau periode 2019–2024 dilakukan untuk mengukur sejauh mana rencana strategis periode sebelumnya telah dilaksanakan dengan baik. Hasil evaluasi ini menjadi landasan penting dalam merumuskan arah kebijakan dan strategi yang lebih tepat untuk periode 2025–2029, sekaligus memperbaiki kekurangan yang ada.

Tabel 2.18.  
Evaluasi Terhadap Hasil Renstra Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Riau  
Tahun 2019-2024

NO	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET RENSTRA TAHUN KE					REALISASI CAPAIAN TAHUN KE					RASIO CAPAIAN TAHUN KE				
			1 (2020)	2 (2021)	3 (2022)	4 (2023)	5 (2024)	1 (2020)	2 (2021)	3 (2022)	4 (2023)	5 (2024)	1 (2020)	2 (2021)	3 (2022)	4 (2023)	5 (2024)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
I	<b>PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN</b>	<b>Presentase Pemeliharaan Kebutuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>															
	1 Penyediaan Jasa Surat menyurat	Jumlah Surat yang Dikirim	1000	2.500	2.500	1	-	3.248	2500	2500	1	-	325	100	100	100	-
	2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah rekening yang dibayar	24	24	24	12	12	24	36	24	12	12	100	150	100	100	100
	3 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	129	10	10	1	2	127	15	10	1	2	98	150	100	100	100
	4 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Rentang waktu penyediaan jasa kebersihan kantor	12	12	12	12	12	12	12	12	-	-	100	100	100	-	-
	5 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang dipelihara	14	14	14	14	1	14	14	14	14	1	100	100	100	100	100

NO	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET RENSTRA TAHUN KE					REALISASI CAPAIAN TAHUN KE					RASIO CAPAIAN TAHUN KE				
			1 (2020)	2 (2021)	3 (2022)	4 (2023)	5 (2024)	1 (2020)	2 (2021)	3 (2022)	4 (2023)	5 (2024)	1 (2020)	2 (2021)	3 (2022)	4 (2023)	5 (2024)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	6	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan dan Dibayarkan Pajaknya	-	-	-	14	14	-	0	0	13	14	-	-	-	93	100
	7	Penyediaan Alat Tulis Kantor	27	25	25	25	25	27	25	25			100	100	100	-	-
	8	Penyediaan Barang Cetak Dan Penggandaan	27	25	25	1	1	27	25	25	1	1	100	100	100	100	100
	9	Penyediaan Bahan/Material				1	1				1	1	-			100	100
	10	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	31	31	31	1	1	31	32	31	1	1	100	103	100	100	100
	11	Penyediaan Makan dan Minuman	6390	6.400	6.400	6.400	7.000	6.400	7315	9205	00	-	100	114	144	-	-
	12	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	-	-	-	1	1	-	0	0	1	1	-	-	-	100	-

NO	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET RENSTRA TAHUN KE					REALISASI CAPAIAN TAHUN KE					RASIO CAPAIAN TAHUN KE				
			1 (2020)	2 (2021)	3 (2022)	4 (2023)	5 (2024)	1 (2020)	2 (2021)	3 (2022)	4 (2023)	5 (2024)	1 (2020)	2 (2021)	3 (2022)	4 (2023)	5 (2024)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	13	Rapat-Rapat Koordinasi Dan Konsultasi Ke Luar Daerah	88	160	160	1	1	134	137	75	1	1	152	86	47	100	100
	14	Penyediaan Jasa Administrasi Kantor	648	2.220	2.220	2.220	2.220	648	2220	2220			100	100	100	-	-
	15	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	-	-	-	12	12	-	-	-	12	12	-	-	-	100	100
	16	Penyediaan Jasa Keamanan Kantor	276	276	276	276	276	276	276	276			100	100	100	-	-
<b>II</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR</b>	<b>Persentase Pemenuhan Sarana Dan Prasarana Aparatur</b>											-				
	1	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	2	2	2	1	1	-	2	2	1	1	-	100	100	100	100
	2	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	300	300	300	145	229	300	300	300	145	229	100	100	100	100	100
	3	Pengadaan peralatan gedung kantor	-	-	20	-	20	-		20			-		100	-	-

NO	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET RENSTRA TAHUN KE					REALISASI CAPAIAN TAHUN KE					RASIO CAPAIAN TAHUN KE				
			1 (2020)	2 (2021)	3 (2022)	4 (2023)	5 (2024)	1 (2020)	2 (2021)	3 (2022)	4 (2023)	5 (2024)	1 (2020)	2 (2021)	3 (2022)	4 (2023)	5 (2024)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
III	<b>PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI APARATUR SIPIL NEGARA</b>	<b>Presentase Pelayanan ASN yang terselesaikan</b>															
	1 Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	100	100	100	100	100
	2 Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	Jumlah Dokumen Kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	-	-	-	1	1	-	-	-	1	1	-	-	-	100	100
	3 Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	Jumlah PNS yang difasilitasi	-	-	-	1	1	-	-	-	1	1	-	-	-	100	100
	4 Fasilitasi Lembaga Profesi ASN	Jumlah agenda pembinaan KORPRI	-	-	-	1	1	-	-	-	1	1	-	-	-	100	100
	5 Perumusan Bahan Kebijakan Pengelolaan Data dan Informasi ASN	Jumlah Dokumen Hasil Perumusan Bahan Kebijakan Pengelolaan Data dan Informasi	-	-	-	1	1	-	-	-	1	1	-	-	-	100	100
	6 Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	-	-	-	1	1	-	-	-	1	1	-	-	-	100	100

NO	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET RENSTRA TAHUN KE					REALISASI CAPAIAN TAHUN KE					RASIO CAPAIAN TAHUN KE				
			1 (2020)	2 (2021)	3 (2022)	4 (2023)	5 (2024)	1 (2020)	2 (2021)	3 (2022)	4 (2023)	5 (2024)	1 (2020)	2 (2021)	3 (2022)	4 (2023)	5 (2024)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	7 Pengelolaan Data Kepegawaian	Jumlah data elektronik ASN yang dikelola secara update	2500	2.500	2.500	1	1	2.500	2500	2500	1	1	100	100	100	100	100
	8 Evaluasi Data, Informasi dan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah integrasi sistem dan jaringan yang dikelola	-	-	-	1	1	-	-	-	1	1	-	-	-	100	100
	9 Pengadaan Aparatur Sipil Negara	Jumlah ASN yang direkrut	350	350	350	350	350	370	350	350	-	-	106	100	100	-	-
	10 Penunjang Pendidikan Ikatan Dinas	Jumlah mahasiswa ikatan dinas yang difasilitasi	103	126	126	126	126	103	126	126	-	-	100	100	100	-	-
	11 Pengelolaan Ujian Dinas dan Penyesuaian Ijazah	Jumlah ASN yang difasilitasi		200	200	200	200	-	200	200	-	-	-	100	100	-	-
	12 Penataan PNS dalam Jabatan JPT dan Administrasi	Jumlah dokumen penataan	1	1	1	1	1	1	1	1	-	-	100	100	100	-	-
	13 Pengelolaan Penataan PNS Pindah Tugas	Jumlah dokumen laporan penataan PNS pindah tugas	1	1	1	1	500	1	1	1	-	-	100	100	100	-	-
	14 Penyusunan pola karier ASN Provinsi Riau	Jumlah dokumen pola karier ASN Provinsi Riau yang tersedia		-	-	1	-				-	-	-			-	-

NO	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET RENSTRA TAHUN KE					REALISASI CAPAIAN TAHUN KE					RASIO CAPAIAN TAHUN KE				
			1 (2020)	2 (2021)	3 (2022)	4 (2023)	5 (2024)	1 (2020)	2 (2021)	3 (2022)	4 (2023)	5 (2024)	1 (2020)	2 (2021)	3 (2022)	4 (2023)	5 (2024)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	15	Penyusunan Analisis Evaluasi Mutasi, Rotasi dan Promosi	1	1	1			1	1	1	-	-	100	100	100	-	-
	16	Pengelolaan Mutasi ASN	-	-	-	1	1	-	-	-	1	1	-	-	-	100	100
	17	Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	-	-	-	2	2	-	-	-	2	2	-	-	-	100	100
	18	Pengelolaan Promosi ASN	-	-	-	1	1	-	-	-	1	1	-	-	-	100	100
	19	Pengelolaan dan Evaluasi Jabatan Fungsional Tertentu Provinsi Riau	2	2	2	2	2	2	2	2	-	-	100	100	100	-	-
	20	Seleksi Jabatan Pimpinan Tinggi	1	1	1	1	1	1	1	1	-	-	100	100	100	-	-
	21	Pengembangan Sistem Manajemen Informasi Kepegawaian Provinsi Riau	2	1	1	1	1	2	1	1	-	-	100	100	100	-	-

NO	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET RENSTRA TAHUN KE					REALISASI CAPAIAN TAHUN KE					RASIO CAPAIAN TAHUN KE				
			1 (2020)	2 (2021)	3 (2022)	4 (2023)	5 (2024)	1 (2020)	2 (2021)	3 (2022)	4 (2023)	5 (2024)	1 (2020)	2 (2021)	3 (2022)	4 (2023)	5 (2024)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	22	Integrasi Sistem dan Pengelolaan Jaringan Pelayanan Kepegawaian	1	1	1	1	1	1	1	1	-	-	100	100	100	-	-
	23	Pengembangan Sistem Penilaian Kompetensi Provinsi Riau	0	1	1	1	1	-	1	1	-	-	-	100	100	-	-
	24	Pengelolaan Akreditasi UPT Penilaian Kompetensi	1	-	-	1	-	1	-	-	-	-	100	-	-	-	-
	25	Pengelolaan Identitas dan Izin Kepegawaian	250	350	350	350	350	250	353	350	-	-	100	101	100	-	-
	26	Pengelolaan Kenaikan Pangkat dan Penggunaan Gelar ASN di Lingkungan Pemprov. Riau dan Kab/Kota Se- Provinsi Riau	4000	4000	4000	4000	4000	4.000	4000	4000	-	-	100	100	100	-	-
	27	Pengelolaan Pensiun PNS	560	600	600	600	600	560	761	600	-	-	100	127	100	-	-
	28	Pengelolaan Satya Lencana Karya Satya	1000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1020	1000	-	-	100	102	100	-	-

NO	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET RENSTRA TAHUN KE					REALISASI CAPAIAN TAHUN KE					RASIO CAPAIAN TAHUN KE				
			1 (2020)	2 (2021)	3 (2022)	4 (2023)	5 (2024)	1 (2020)	2 (2021)	3 (2022)	4 (2023)	5 (2024)	1 (2020)	2 (2021)	3 (2022)	4 (2023)	5 (2024)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	29 Pengelolaan (LHKPN) Pelaporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara Provinsi Riau	Jumlah dokumen LHKPN Provinsi Riau yang dikelola	359	359	359	359	359	359	359	359	-	-	100	100	100	-	-
	30 Penanganan Kasus-Kasus Kepegawaian dan Bantuan Hukum	Jumlah kasus kepegawaian yang ditangani	40	70	70	70	70	40	70		-	-	100	100	-	-	-
<b>IV</b>	<b>PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN APARATUR</b>	<b>Persentase Pembinaan dan Pengembangan Aparatur</b>															
	1 Pengelolaan Assessment Center	Jumlah dokumen seleksi jabatan pimpinan tinggi	-	-	-	1	1	-	-	-	1	1	-	-	-	100	100
	2 Penyelenggaraan Penilaian dan Analisis Kesenjangan Kinerja Aparatur Sipil Negara Provinsi Riau	Jumlah dokumen	2	2	2	2	2	2	2	2			100	100	100	-	-
	3 Penyusunan Standar Kompetensi PNS Provinsi Riau	Jumlah dokumen standar kompetensi PNS Provinsi Riau yang terselesaikan	1	1	1	1	1	1	1	1			100	100	100	-	-

NO	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET RENSTRA TAHUN KE					REALISASI CAPAIAN TAHUN KE					RASIO CAPAIAN TAHUN KE				
			1 (2020)	2 (2021)	3 (2022)	4 (2023)	5 (2024)	1 (2020)	2 (2021)	3 (2022)	4 (2023)	5 (2024)	1 (2020)	2 (2021)	3 (2022)	4 (2023)	5 (2024)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	4 Pemetaan Jabatan, Evaluasi dan Penyusunan Talent Pool ASN Provinsi Riau	Jumlah Dokumen Pemetaan, Evaluasi dan Talent Pool	2	2	2	2	2	-	2	2			-	100	100	-	-
	5 Penyusunan Strategi Peningkatan Kompetensi	Jumlah dokumen strategi program dan kegiatan Peningkatan Kompetensi	-	1	-	1	-	-	1				-	100		-	
	6 Pemberian Beasiswa Tugas Belajar	Jumlah PNS yang terfasilitasi mengikuti tugas belajar	33	33	78	78	60	22	33	78			67	100	100	-	-
	7 Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	Jumlah PNS yang terfasilitasi mengikuti tugas belajar	-	-	-	1	1	-	-	-	1	1	-	-	-	100	100
	8 Pengeloaan Administrasi Diklat dan Sertifikasi ASN		-	-	-	1	1	-	-	-	1	1	-	-	-	100	100
	9 Fasilitasi Sertifikasi Jabatan ASN	Jumlah PNS yang terfasilitasi mengikuti pelatihan kepemimpinan nasional Tk I	-	-	-	4	7	-	-	-	4	7	-	-	-	100	100
	10 Koordinasi dan Kerjasama Pelaksanaan Diklat	Jumlah mahasiswa ikatan dinas yang difasilitasi	-	-	-	1	1	-	-	-	1	1	-	-	-	100	100

NO	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET RENSTRA TAHUN KE					REALISASI CAPAIAN TAHUN KE					RASIO CAPAIAN TAHUN KE				
			1 (2020)	2 (2021)	3 (2022)	4 (2023)	5 (2024)	1 (2020)	2 (2021)	3 (2022)	4 (2023)	5 (2024)	1 (2020)	2 (2021)	3 (2022)	4 (2023)	5 (2024)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	11	Fasilitasi Sertifikasi Fungsional ASN	-	-	-	40	40	-	-	-	40	40	-	-	-	100	100
	12	Fasilitasi Pengembangan Karir dalam Jabatan Fungsional	-	-	-	1	1	-	-	-	1	1	-	-	-	100	100
	13	Pendidikan dan Pelatihan Struktural bagi PNS Daerah (PIM I)	1	1	1	1	1	-	1	1	-	-	-	100	100	-	-
	14	Pendidikan dan Pelatihan Struktural bagi PNS Daerah (PIM II)	4	6	6	6	8	-	6	6	-	-	-	100	100	-	-
	15	Diklat Fungsional Pegawai Pemerintah Provinsi Riau	4	40	40	40	40	6	40	40	-	-	150	100	100	-	-
	16	Diklat Teknis Pegawai Pemerintah Provinsi Riau	10	45	45	45	45	20	45	45	-	-	200	100	100	-	-
	17	Seleksi diklat kepemimpinan (PIM 2,3,4)	-	50	-	-	-	-	50	-	-	-	-	100	-	-	-

NO	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET RENSTRA TAHUN KE					REALISASI CAPAIAN TAHUN KE					RASIO CAPAIAN TAHUN KE				
			1 (2020)	2 (2021)	3 (2022)	4 (2023)	5 (2024)	1 (2020)	2 (2021)	3 (2022)	4 (2023)	5 (2024)	1 (2020)	2 (2021)	3 (2022)	4 (2023)	5 (2024)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
18	Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Asesor Provinsi Riau	Jumlah PNS yang mengikuti peningkatan kompetensi assesor	20	20	20	20	20	18	20	20	-	-	90	100	100	-	-
19	Pelaksanaan magang/praktik kerja	Jumlah ASN yang terfasilitasi mengikuti magang dan prktik kerja	5	7	10	20	10	-	7	10			-	100	100	-	-
20	Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Jumlah dokumen	-	-	-	1	1	-	-	-	1	1	-	-	-	100	100
21	Pengelolaan Pemberian Penghargaan Bagi Pegawai	Jumlah PNS berprestasi dan berkinerja baik yang menerima penghargaan	-	-	-	20	20	-	-	-	20	20	-	-	-	100	100
22	Pengelolaan Tanda Jasa Bagi Pegawai	Jumlah PNS yang menerima penghargaan Satya Lencana Karya Satya	-	-	-	1.000	1.000	-	-	-	1000	1000	-	-	-	100	100
23	Pembinaan Disiplin ASN	Jumlah ASN yang dikonseling	-	-	-	80	80	-	-	-	80	80	-	-	-	100	100
24	Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	Jumlah kasus kepegawaian yang ditangani	-	-	-	1	1	-	-	-	1	1	-	-	-	100	100

NO	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET RENSTRA TAHUN KE					REALISASI CAPAIAN TAHUN KE					RASIO CAPAIAN TAHUN KE				
			1 (2020)	2 (2021)	3 (2022)	4 (2023)	5 (2024)	1 (2020)	2 (2021)	3 (2022)	4 (2023)	5 (2024)	1 (2020)	2 (2021)	3 (2022)	4 (2023)	5 (2024)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	25 Pelaksanaan Konseling bagi ASN di Lingkungan Pemerintah Provinsi Riau	Jumlah ASN yang dikonseling	42	80	80	80	80	-	12	80	-	-	-	15	100	-	-
	26 Penegakan Disiplin, Kode Etik dan Kode Perilaku Pegawai ASN	Jumlah penegakan disiplin, kode etik dan kode perilaku ASN	12	12	12	12	12	4	12	12	-	-	33	100	100	-	-
	27 Pembangunan Database Terkait Pelanggaran Disiplin, Pelanggaran Kode Etik dan Kode Perilaku Pegawai ASN	Jumlah database yang dibangun terkait pelanggaran kode etik dan kode perilaku	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	100				-
	28 Pemberian Penghargaan bagi PNS Berprestasi dan berkinerja baik	Jumlah PNS berprestasi dan berkinerja baik yang menerima penghargaan	5	22	22	22	25	-	22	22	-	-	-	100	100	-	-
	29 Pembinaan KORPRI Provinsi Riau	Jumlah Agenda Pembinaan KORPRI	5	5	5	5	5	-	5	5	-	-	-	100	100	-	-

### **2.1.6. Kelompok Sasaran Layanan**

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Riau melayani berbagai kelompok sasaran yang berkaitan dengan pengelolaan dan pengembangan SDM aparatur. Kelompok sasaran ini terdiri dari:

- a. Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Provinsi Riau, yang menerima layanan kepegawaian seperti mutasi, promosi, pengembangan kompetensi, dan administrasi ASN lainnya.
- b. Calon ASN, yang membutuhkan dukungan dalam proses rekrutmen, seleksi, serta administrasi awal sebagai bagian dari tahapan pengangkatan pegawai negeri.
- c. Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Provinsi Riau, yang berkoordinasi dengan BKD dalam perencanaan dan pengelolaan SDM di masing-masing unit kerja.
- d. Instansi pengguna layanan lainnya, termasuk pemerintah kabupaten/kota di Riau serta instansi luar daerah yang menggunakan layanan penilaian kompetensi atau konsultasi manajemen ASN.

### **2.1.7. Mitra BKD dalam Penyelenggaraan Pelayanan**

Dalam menjalankan fungsi dan tugasnya, Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Riau berkolaborasi dengan berbagai mitra strategis yang berperan dalam mendukung penyelenggaraan layanan kepegawaian. Kemitraan ini memastikan bahwa sistem manajemen ASN berjalan secara efektif, profesional, dan sesuai dengan regulasi yang berlaku. Mitra utama dalam penyelenggaraan pelayanan BKD meliputi:

- a. Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB), yang berperan dalam penyusunan kebijakan dan regulasi kepegawaian di tingkat nasional.
- b. Badan Kepegawaian Negara (BKN), sebagai otoritas utama dalam sistem manajemen ASN dan pengelolaan data pegawai negeri sipil.
- c. Lembaga Administrasi Negara (LAN), yang berfokus pada pendidikan dan pengembangan kompetensi aparatur.
- d. Kementerian/Lembaga selaku instansi pembina jabatan fungsional, yang bertanggung jawab atas pengembangan, pembinaan, dan standarisasi jabatan fungsional ASN sesuai bidang masing-masing
- e. BKD Kabupaten/Kota se-Provinsi Riau, sebagai mitra koordinatif dalam pengelolaan SDM di tingkat daerah.
- f. Lembaga pendidikan dan pelatihan, yang mendukung peningkatan kompetensi dan profesionalisme ASN.
- g. Perguruan tinggi, sebagai mitra akademik dalam pengembangan kebijakan dan peningkatan kapasitas ASN.
- h. PT. Taspen, yang menangani aspek jaminan sosial dan kesejahteraan bagi ASN.
- i. Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Riau, yang berperan dalam penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan aparatur.

Kemitraan dengan berbagai pihak ini bertujuan untuk meningkatkan efektivitas layanan kepegawaian, memastikan pengelolaan ASN yang sesuai standar, serta mendukung pengembangan kompetensi aparatur secara berkelanjutan.

## 2.2. Permasalahan dan Isu Strategis

Dalam penyelenggaraan layanan kepegawaian, BKD Provinsi Riau menghadapi berbagai tantangan yang perlu dikelola secara efektif agar pelayanan tetap optimal. Permasalahan yang muncul tidak hanya terkait dengan aspek teknis administrasi, tetapi juga berkaitan dengan kebijakan strategis dalam manajemen ASN.

### 2.2.1. Permasalahan dalam Pelayanan BKD

Hasil inventarisasi permasalahan dalam pelayanan BKD Provinsi Riau diuraikan pada tabel berikut.

Tabel 2.19.  
Pokok Permasalahan dan Akar Masalah Pelayanan BKD Provinsi Riau

MASALAH POKOK	MASALAH	AKAR MASALAH
Belum optimalnya penerapan prinsip meritokrasi dalam manajemen ASN	Belum optimalnya penyusunan formasi pegawai berdasarkan kebutuhan organisasi	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kebijakan perencanaan kebutuhan ASN yang begitu dinamis</li> <li>2. Belum optimalnya analisis beban kerja sebagai dasar penyusunan formasi.</li> </ol>
	Proses perekrutan ASN belum sepenuhnya sejalan dengan kebutuhan instansi, menyebabkan ketidakseimbangan formasi dan distribusi pegawai.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kurangnya fleksibilitas kebijakan yang mengakomodasi redistribusi pegawai lintas unit kerja</li> <li>2. Transisi Non ASN ke PPPK masih menghadapi kendala regulasi dan kuota formasi</li> </ol>
	Peluang pengembangan kompetensi dan karier ASN masih terbatas	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pengembangan kompetensi ASN belum berbasis kebutuhan organisasi dan analisis kesenjangan secara sistematis.</li> <li>2. Profil talenta dan talent pool belum tersedia secara utuh, sehingga rencana suksesi dan peningkatan kapasitas belum terarah.</li> <li>3. Pemanfaatan assessment center masih terbatas, baik dari sisi penggunaan, integrasi pemetaan kompetensi, maupun sarana-prasarana pendukungnya</li> </ol>
	Mekanisme promosi dan	1. Belum optimalnya mekanisme

<p>mutasi ASN belum sepenuhnya berbasis meritokrasi dan kebutuhan organisasi</p>	<p>suksesi yang memastikan keberlanjutan kepemimpinan ASN</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>2. Pendayagunaan assessment center dalam mendukung promosi dan mutasi ASN masih terbatas</li> <li>3. Kurangnya fleksibilitas kebijakan yang mengakomodasi redistribusi pegawai lintas unit kerja dalam rangka mutasi pegawai</li> <li>4. Belum optimalnya penerapan seleksi kompetensi pindah masuk antar instansi</li> </ol>
<p>Mekanisme evaluasi kinerja ASN belum terstruktur secara optimal, sehingga belum sepenuhnya berfungsi sebagai dasar dalam pembinaan dan pengembangan karier</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>5. Dialog kinerja dan peran atasan dalam pembinaan ASN belum berjalan optimal, sehingga indikator kinerja sering tidak berbasis realitas tugas.</li> <li>6. Belum tersedianya analisis menyeluruh dan kebijakan yang mengaitkan penilaian kinerja dengan keputusan manajemen, termasuk pengembangan karier dan promosi.</li> <li>7. Hasil evaluasi kinerja belum dimanfaatkan secara konsisten sebagai dasar pemberian insentif, pelatihan, maupun mutasi jabatan</li> </ol>
<p>Sistem penggajian, penghargaan, dan disiplin ASN belum sepenuhnya terintegrasi dengan manajemen kinerja, sehingga belum optimal dalam mendorong profesionalisme dan motivasi kerja</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pembinaan dan penegakan disiplin serta kode etik ASN belum berjalan optimal dan berjenjang hingga unit kerja.</li> <li>2. Pengelolaan data pelanggaran ASN belum tertata baik, menghambat tindak lanjut yang adil dan konsisten.</li> <li>3. Kebijakan penghargaan bagi pegawai berprestasi belum konsisten, baik secara finansial maupun non-finansial.</li> <li>4. Pemanfaatan data kinerja sebagai dasar pemberian TPP belum optimal, sehingga belum mendorong kinerja secara efektif.</li> </ol>
<p>Mekanisme perlindungan dan pelayanan ASN belum sepenuhnya</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mekanisme perlindungan ASN belum optimal, mencakup pengaduan dan bantuan hukum.</li> </ol>

menjamin kepastian hukum, kesejahteraan, dan dukungan karier secara optimal.	<ol style="list-style-type: none"> <li>2. Akses layanan psikologis dan dukungan jaminan hari tua ASN masih terbatas</li> <li>3. Belum optimalnya pemanfaatan teknologi dalam layanan administrasi kepegawaian</li> <li>4. Survei kepuasan pelayanan kepegawaian belum berjalan optimal</li> </ol>
Sistem informasi ASN belum terintegrasi secara optimal, sehingga belum sepenuhnya mendukung manajemen kinerja, disiplin, dan pelayanan pegawai berbasis data.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pemanfaatan teknologi informasi dalam layanan kepegawaian masih terbatas, termasuk integrasi dengan sistem kinerja, disiplin, dan pembinaan ASN.</li> <li>2. Kesadaran ASN dalam memutakhirkan data kepegawaian masih rendah, sehingga menghambat validitas dan keandalan basis data ASN.</li> </ol>

### 2.2.2. Isu Strategis

Dalam rangka merumuskan arah kebijakan dan strategi Badan Kepegawaian Daerah (BKD) untuk periode 2025-2029, dilakukan identifikasi isu-isu strategis yang menjadi tantangan utama dalam pengelolaan dan pengembangan Aparatur Sipil Negara (ASN). Isu strategis ini merupakan hasil analisis komprehensif terhadap berbagai permasalahan yang dihadapi BKD dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, dengan mempertimbangkan faktor-faktor lingkungan strategis baik pada tingkat lokal, regional, nasional, maupun global.

Tahapan identifikasi isu strategis dilakukan melalui pendekatan analitis terhadap masalah pokok dan akar permasalahan yang telah diidentifikasi sebelumnya. Analisis ini melibatkan peninjauan terhadap potensi daerah yang menjadi kewenangan BKD, permasalahan BKD secara mendetail, serta relevansinya dengan isu-isu dalam Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) dan lingkungan dinamis pada berbagai tingkatan.

Hasil analisis menunjukkan bahwa terdapat lima isu strategis utama yang perlu menjadi fokus perhatian BKD dalam periode 2025-2029, yaitu:

- 1) penyusunan formasi dan perekrutan ASN berbasis kebutuhan organisasi,
- 2) pengembangan karier dan suksesi kepemimpinan dalam bingkai manajemen talenta,
- 3) sistem promosi dan mutasi berbasis merit,
- 4) integrasi manajemen kinerja dengan sistem reward dan punishment, serta
- 5) pengelolaan basis data kepegawaian yang valid dan andal.

Isu-isu strategis tersebut dirumuskan dengan mempertimbangkan dinamika lingkungan strategis pada berbagai tingkatan, mulai dari tuntutan global akan

penerapan merit system dan transformasi digital dalam manajemen talenta, kebijakan nasional terkait reformasi birokrasi dan pengembangan ASN berbasis kompetensi, hingga kebutuhan-kebutuhan spesifik di tingkat regional dan lokal. Berikut adalah tabel yang menggambarkan isu-isu strategis BKD beserta permasalahan dan faktor-faktor lingkungan strategis yang melatarbelakanginya.

Tabel 2.20.  
Analisis Isu Strategis Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Riau

Potensi Daerah yang Menjadi Kewenangan BKD	Permasalahan BKD	Isu KLHS yang Relevan Dengan BKD	Isu Lingkungan Dinamis yang Relevan Dengan BKD			Isu Strategis BKD yang Diidentifikasi
			Global	Nasional	Regional	
1	2	3	4	5	6	7
Kewenangan dalam perencanaan kebutuhan dan rekrutmen ASN	1) Belum optimalnya penyusunan formasi pegawai berdasarkan kebutuhan organisasi 2) Proses perekrutan ASN belum sepenuhnya sejalan dengan kebutuhan instansi, menyebabkan ketidakseimbangan formasi dan distribusi pegawai.	Penataan kelembagaan dan analisis jabatan yang efektif	Tren global dalam penyederhanaan struktur organisasi dan perencanaan SDM berbasis analitik	Kebijakan nasional perampingan birokrasi dan pemenuhan kebutuhan pegawai di daerah	Keseimbangan distribusi ASN antar daerah sesuai potensi dan karakteristik wilayah	1. Belum optimalnya penyusunan formasi dan perekrutan ASN berbasis kebutuhan organisasi, sehingga perlu penguatan analisis beban kerja dan penyesuaian proses rekrutmen untuk mengatasi ketidakseimbangan formasi dan distribusi pegawai.
Kewenangan dalam pengembangan ASN dan manajemen talenta	3) Peluang pengembangan kompetensi dan karier ASN masih terbatas	Pengembangan SDM aparatur yang berkelanjutan	Persaingan global dalam talenta kepemimpinan sektor publik	Implementasi UU ASN terkait pengembangan karier berbasis kompetensi	Kebutuhan ASN dengan kompetensi spesifik sesuai karakteristik daerah	2. Belum optimalnya mekanisme pengembangan karier dan suksesi kepemimpinan ASN dalam bingkai Manajemen Talenta, untuk itu diperlukan

Potensi Daerah yang Menjadi Kewenangan BKD	Permasalahan BKD	Isu KLHS yang Relevan Dengan BKD	Isu Lingkungan Dinamis yang Relevan Dengan BKD			Isu Strategis BKD yang Diidentifikasi
			Global	Nasional	Regional	
1	2	3	4	5	6	7
						pemetaan talent pool dan peningkatan kapasitas ASN untuk mendukung keberlanjutan kepemimpinan.
Kewenangan dalam pengelolaan promosi dan mutasi ASN	4) Mekanisme promosi dan mutasi ASN belum sepenuhnya berbasis meritokrasi dan kebutuhan organisasi	Penerapan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (good governance)	Tren global dalam penerapan merit system di sektor publik	Reformasi birokrasi dan penataan struktur organisasi pemerintah	Perbedaan kebutuhan dan distribusi ASN antar wilayah	3. Belum optimalnya sistem promosi dan mutasi ASN berbasis merit, dengan demikian mekanisme rotasi dan promosi jabatan berbasis merit perlu diperkuat agar lebih responsif terhadap kebutuhan organisasi.
Kewenangan dalam manajemen kinerja dan sistem penghargaan	5) Mekanisme evaluasi kinerja ASN belum terstruktur secara optimal, sehingga belum sepenuhnya berfungsi sebagai dasar dalam pembinaan dan pengembangan	Peningkatan akuntabilitas kinerja birokrasi	Standar global manajemen kinerja sektor publik	Kebijakan nasional terkait remunerasi dan penghargaan ASN	Disparitas insentif dan tunjangan antar daerah	4. Belum terintegrasinya manajemen kinerja dengan sistem reward dan punishment sebagai dasar utama bagi pengembangan karier, insentif, dan disiplin pegawai

Potensi Daerah yang Menjadi Kewenangan BKD	Permasalahan BKD	Isu KLHS yang Relevan Dengan BKD	Isu Lingkungan Dinamis yang Relevan Dengan BKD			Isu Strategis BKD yang Diidentifikasi
			Global	Nasional	Regional	
1	2	3	4	5	6	7
	karier 6) Sistem penggajian, penghargaan, dan disiplin ASN belum sepenuhnya terintegrasi dengan manajemen kinerja, sehingga belum optimal dalam mendorong profesionalisme dan motivasi kerja 7) Mekanisme perlindungan dan pelayanan ASN belum sepenuhnya menjamin kepastian hukum, kesejahteraan, dan dukungan karier secara optimal.					
Kewenangan dalam pengelolaan sistem informasi	8) Sistem informasi ASN belum terintegrasi secara optimal, sehingga	Penerapan e-government dan digitalisasi layanan publik	Transformasi digital dalam manajemen talenta dan SDM	Kebijakan Satu Data Indonesia dan integrasi sistem informasi	Kebutuhan interoperabilitas sistem informasi antar instansi pemerintah	5. Kesadaran ASN dalam memutakhirkan data kepegawaian masih rendah, sehingga

Potensi Daerah yang Menjadi Kewenangan BKD	Permasalahan BKD	Isu KLHS yang Relevan Dengan BKD	Isu Lingkungan Dinamis yang Relevan Dengan BKD			Isu Strategis BKD yang Diidentifikasi
			Global	Nasional	Regional	
1	2	3	4	5	6	7
dan pelayanan ASN	belum sepenuhnya mendukung manajemen kinerja, disiplin, dan pelayanan pegawai berbasis data.			pemerintahan	daerah	menghambat validitas dan keandalan basis data ASN.

Kelima isu strategis yang telah diidentifikasi merupakan hasil analisis mendalam terhadap berbagai permasalahan dalam manajemen ASN yang dihadapi BKD. Isu-isu ini saling terkoneksi dan membentuk rantai nilai pengelolaan ASN yang terintegrasi, mulai dari perencanaan formasi, rekrutmen, pengembangan kompetensi, manajemen talenta, hingga sistem informasi kepegawaian yang menjadi backbone dari seluruh proses tersebut.

Isu strategis pengembangan karier dan suksesi kepemimpinan dalam bingkai manajemen talenta (isu strategis pertama) berkaitan erat dengan isu strategis penyusunan formasi dan perekrutan ASN berbasis kebutuhan organisasi (isu strategis kedua). Keterkaitan ini menunjukkan pentingnya keselarasan antara perencanaan kebutuhan pegawai dengan pengembangan talenta yang ada. Sementara itu, sistem promosi dan mutasi berbasis merit (isu strategis ketiga) menjembatani antara manajemen talenta dengan integrasi manajemen kinerja dan sistem reward-punishment (isu strategis keempat), memastikan bahwa pengambilan keputusan terkait karier pegawai didasarkan pada penilaian kinerja yang terukur dan objektif.

Sebagai pendukung dari keseluruhan sistem, pengelolaan basis data kepegawaian yang valid dan andal (isu strategis kelima) menjadi fondasi penting yang memastikan ketersediaan informasi akurat untuk pengambilan keputusan di seluruh aspek manajemen ASN. Keberhasilan dalam mengatasi kelima isu strategis ini akan menjadi kunci dalam mewujudkan manajemen ASN yang profesional, berintegritas, dan kompeten sebagaimana diamanatkan dalam regulasi kepegawaian nasional.

Dalam lima tahun ke depan, BKD perlu merancang program dan kegiatan yang secara langsung berkontribusi pada penyelesaian isu-isu strategis tersebut. Pendekatan yang terintegrasi dan sistematis diperlukan untuk memastikan bahwa intervensi yang dilakukan dapat memberikan dampak yang signifikan dan berkelanjutan dalam peningkatan kualitas manajemen ASN di daerah.

**BAB III**  
**TUJUAN, SASARAN, STRATEGI, DAN ARAH KEBIJAKAN**

**3.1. TUJUAN DAN SASARAN RENSTRA BKD PROVINSI RIAU TAHUN 2025-2029**

Dalam rangka mendukung visi RPJMD Tahun 2025-2029 yaitu **Riau Berbudaya Melayu, Dinamis, Ekologis, Agamis, dan Maju** atau **Riau Bedelau**, serta sejalan dengan misi kelima “*Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Berintegritas serta Pelayanan Publik yang Berkualitas dengan Dukungan Aparatur yang Kompeten dan Profesional menuju World Class Government*”, BKD Provinsi Riau menetapkan tujuan strategis dalam penyelenggaraan manajemen kepegawaian daerah, yaitu Terwujudnya Profesionalitas ASN. Tujuan ini difokuskan pada penguatan manajemen ASN yang berbasis prinsip meritokrasi, transparansi, profesionalisme, serta pengelolaan kepegawaian yang responsif terhadap dinamika kebutuhan organisasi.

Untuk mendukung pencapaian tujuan tersebut, BKD Provinsi Riau menetapkan sasaran utama yaitu Meningkatnya Penerapan Prinsip Meritokrasi dalam Manajemen ASN. Sasaran ini berfokus pada optimalisasi berbagai aspek sistem merit, mulai dari perencanaan kebutuhan ASN yang berbasis analisis data, pengadaan pegawai yang selaras dengan kebutuhan organisasi, pengembangan kompetensi dan karier ASN secara terstruktur, implementasi sistem promosi dan mutasi berbasis merit, hingga integrasi sistem informasi kepegawaian dalam mendukung manajemen SDM berbasis data. Untuk mengukur pencapaian sasaran tersebut, BKD Provinsi Riau menetapkan indikator kinerja utama berupa *Indeks Sistem Merit* sebagai ukuran terhadap efektivitas penerapan prinsip merit dalam manajemen ASN di lingkungan Pemerintah Provinsi Riau.

Guna memastikan keberhasilan implementasi sasaran strategis secara terukur dan berkelanjutan, BKD Provinsi Riau menetapkan target capaian tahunan untuk periode 2025–2029. Target ini menjadi pedoman dalam pelaksanaan kebijakan dan program kerja serta sebagai instrumen evaluatif dalam peningkatan kualitas manajemen kepegawaian daerah. Berikut ini adalah tabel yang memuat tujuan, sasaran, indikator kinerja utama, serta target capaian tahunan BKD Provinsi Riau Tahun 2025–2029.

**Tabel 3.1.**  
**Tujuan dan Sasaran Pelayanan Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Riau Tahun 2025-2029**

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/ SASARAN	TARGET KINERJA					
			2025	2026	2027	2028	2029	2030
Terwujudnya Profesionalitas ASN		Indeks Profesionalitas ASN	77,6	78,7	79,7	80,8	81,8	82,9
	Meningkatnya penerapan prinsip meritokrasi dalam manajemen ASN	Indeks Sistem Merit	328	330	333	336	339	343

Guna menjamin pencapaian tujuan dan sasaran strategis secara sistematis dan terukur, BKD Provinsi Riau menyusun penahapan pembangunan tahunan yang menggambarkan prioritas fokus kegiatan pada setiap tahapan implementasi Renstra. Penahapan ini dirancang dengan mempertimbangkan tingkat kesiapan organisasi,

ketersediaan sumber daya, serta kompleksitas permasalahan yang dihadapi dalam penerapan sistem merit.

### 3.2. STRATEGI DALAM RANGKA PENCAPAIAN TUJUAN DAN SASARAN

Strategi merupakan rencana tindakan yang komprehensif berisikan langkah-langkah/upaya yang akan dilakukan dalam rangka optimalisasi sumber daya, tahapan, fokus dan penentuan program/kegiatan/subkegiatan untuk menghadapi lingkungan yang dinamis guna mencapai tujuan dan sasaran Renstra BKD Provinsi Riau.

**Tabel 3.2.**  
**Strategi Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Riau Tahun 2025-2029**

<b>SASARAN RPJMD</b>	<b>TUJUAN BKD</b>	<b>SASARAN BKD</b>	<b>STRATEGI</b>
Meningkatnya Budaya Birokrasi Berakhlak dengan ASN yang Profesional	Terwujudnya Profesionalitas ASN	Meningkatnya penerapan prinsip meritokrasi dalam manajemen ASN	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menyusun formasi pegawai berbasis analisis kebutuhan jabatan dan proyeksi beban kerja</li> <li>2. Memfasilitasi proses rekrutmen ASN berdasarkan hasil pemetaan kebutuhan organisasi</li> <li>3. Mengembangkan sistem karier berbasis kompetensi dan potensi ASN</li> <li>4. Menerapkan promosi dan mutasi berdasarkan kinerja, kompetensi, dan kebutuhan organisasi</li> <li>5. Membangun mekanisme evaluasi kinerja yang terstruktur dan berkelanjutan</li> <li>6. Mengintegrasikan sistem penghargaan dan disiplin dengan kinerja ASN</li> <li>7. Memperkuat mekanisme perlindungan hukum, pelayanan kepegawaian dan kesejahteraan ASN</li> </ol>

SASARAN RPJMD	TUJUAN BKD	SASARAN BKD	STRATEGI
			8. Mengembangkan sistem informasi ASN yang terintegrasi dan berbasis data

### 3.3. PENTAHAPAN

Penahapan pembangunan dimaksud adalah prioritas pembangunan tahunan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran Perangkat Daerah. Penahapan Renstra PD dapat disajikan seperti pada tabel di bawah ini:

**Tabel 3.3.**  
**Penahapan Rencana Strategis Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Riau Tahun 2025-2029**

TAHAP 1 (2025)	TAHAP 2 (2026)	TAHAP 3 (2027)	TAHAP 4 (2028)	TAHAP 5 (2029)
<b>Penguatan Fondasi Sistem Merit</b>	<b>Pengembangan Kapasitas ASN</b>	<b>Implementasi Sistem Terintegrasi</b>	<b>Optimalisasi Kinerja ASN</b>	<b>Sustainabilitas dan Inovasi</b>
Fokus pada penyempurnaan perencanaan kebutuhan ASN, standardisasi proses rekrutmen berbasis merit, dan penguatan regulasi internal	Fokus pada peningkatan kompetensi ASN melalui diklat berkualitas, pengembangan karier terstruktur, dan penguatan sistem penilaian kinerja	Fokus pada implementasi SIASN secara optimal, integrasi sistem informasi kepegawaian, dan digitalisasi layanan kepegawaian	Fokus pada optimalisasi sistem mutasi dan promosi berbasis merit, penguatan sistem reward and punishment, serta peningkatan kualitas layanan	Fokus pada keberlanjutan sistem merit, inovasi pelayanan kepegawaian, dan pengembangan best practices manajemen ASN
<i>Target Indeks Sistem Merit:</i> 328	<i>Target Indeks Sistem Merit:</i> 330	<i>Target Indeks Sistem Merit:</i> 333	<i>Target Indeks Sistem Merit:</i> 336	<i>Target Indeks Sistem Merit:</i> 339

Setiap tahap penahapan memiliki fokus prioritas yang saling berkaitan dan saling memperkuat, dimulai dari penguatan fondasi sistem merit, pengembangan kapasitas SDM, implementasi teknologi pendukung, hingga optimalisasi dan sustainabilitas sistem. Pendekatan bertahap ini memungkinkan BKD Provinsi Riau untuk melakukan perbaikan secara kontinyu sambil memastikan bahwa setiap tahapan memberikan kontribusi nyata terhadap peningkatan Indeks Sistem Merit sebagai indikator kinerja utama.

### 3.4. ARAH KEBIJAKAN DALAM RANGKA PENCAPAIAN TUJUAN DAN SASARAN

Arah kebijakan merupakan rangkaian kerja yang merupakan operasionalisasi NSPK sesuai dengan tugas dan fungsi BKD dan arah kebijakan RPJMD serta selaras dengan strategi dalam rangka mencapai target tujuan dan sasaran Renstra BKD Provinsi Riau.

**Tabel 3.4.**  
**Arah Kebijakan Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Riau Tahun 2025-2029**

<b>NO</b>	<b>OPERASIONALISASI NSPK</b>	<b>ARAH KEBIJAKAN RPJMD</b>	<b>ARAH KEBIJAKAN RENSTRA PD</b>	<b>KET.</b>
1	Penyelenggaraan perencanaan kebutuhan, pengadaan, pengangkatan, penempatan, dan pemberhentian PNS dan PPPK sesuai PP 11/2017	Peningkatan Profesionalitas ASN dan Budaya Kerja ASN	Melakukan perencanaan kebutuhan ASN yang akurat dan sesuai kebutuhan organisasi	
2	Penyelenggaraan pengadaan PNS dan PPPK melalui seleksi yang objektif dan transparan sesuai PP 17/2020	Peningkatan Profesionalitas ASN dan Budaya Kerja ASN	Melaksanakan rekrutmen ASN yang terkoordinasi dan sesuai formasi	
3	Penyelenggaraan pengembangan kompetensi PNS melalui pendidikan dan pelatihan sesuai PP 17/2020	Peningkatan Profesionalitas ASN dan Budaya Kerja ASN	Menyediakan pendidikan dan pelatihan lanjutan serta pengembangan karier jabatan fungsional	
4	Penyelenggaraan manajemen karier PNS melalui promosi dan mutasi berbasis merit sesuai PP 17/2020	Peningkatan Profesionalitas ASN dan Budaya Kerja ASN	Melaksanakan mutasi dan promosi ASN berbasis merit dan kebutuhan organisasi	
5	Penyelenggaraan sistem penilaian kinerja PNS secara objektif dan terukur sesuai PP 17/2020	Peningkatan Profesionalitas ASN dan Budaya Kerja ASN	Melaksanakan penilaian dan evaluasi kinerja secara objektif dan berbasis sistem	
6	Penyelenggaraan sistem penghargaan dan sanksi disiplin PNS sesuai PP 11/2017 dan PP 17/2020	Peningkatan Profesionalitas ASN dan Budaya Kerja ASN	Memberikan penghargaan berbasis kinerja serta menegakkan disiplin secara adil dan terukur	
7	Penyelenggaraan perlindungan dan layanan administratif kepegawaian sesuai PP 17/2020	Peningkatan Profesionalitas ASN dan Budaya Kerja ASN	Memberikan layanan dan perlindungan administratif, serta pembinaan etik kepada ASN	

NO	OPERASIONALISASI NSPK	ARAH KEBIJAKAN RPJMD	ARAH KEBIJAKAN RENSTRA PD	KET.
8	Penyelenggaraan sistem informasi kepegawaian dan pengelolaan data kepegawaian sesuai PP 17/2020	Peningkatan Profesionalitas ASN dan Budaya Kerja ASN	Mengelola dan memutakhirkan data serta sistem informasi ASN secara berkelanjutan	

**BAB IV**  
**PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, DAN KINERJA**  
**PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN**

**4.1 PROGRAM, KEGIATAN, DAN SUB KEGIATAN HASIL CASCADING DARI TUJUAN DAN SASARAN**

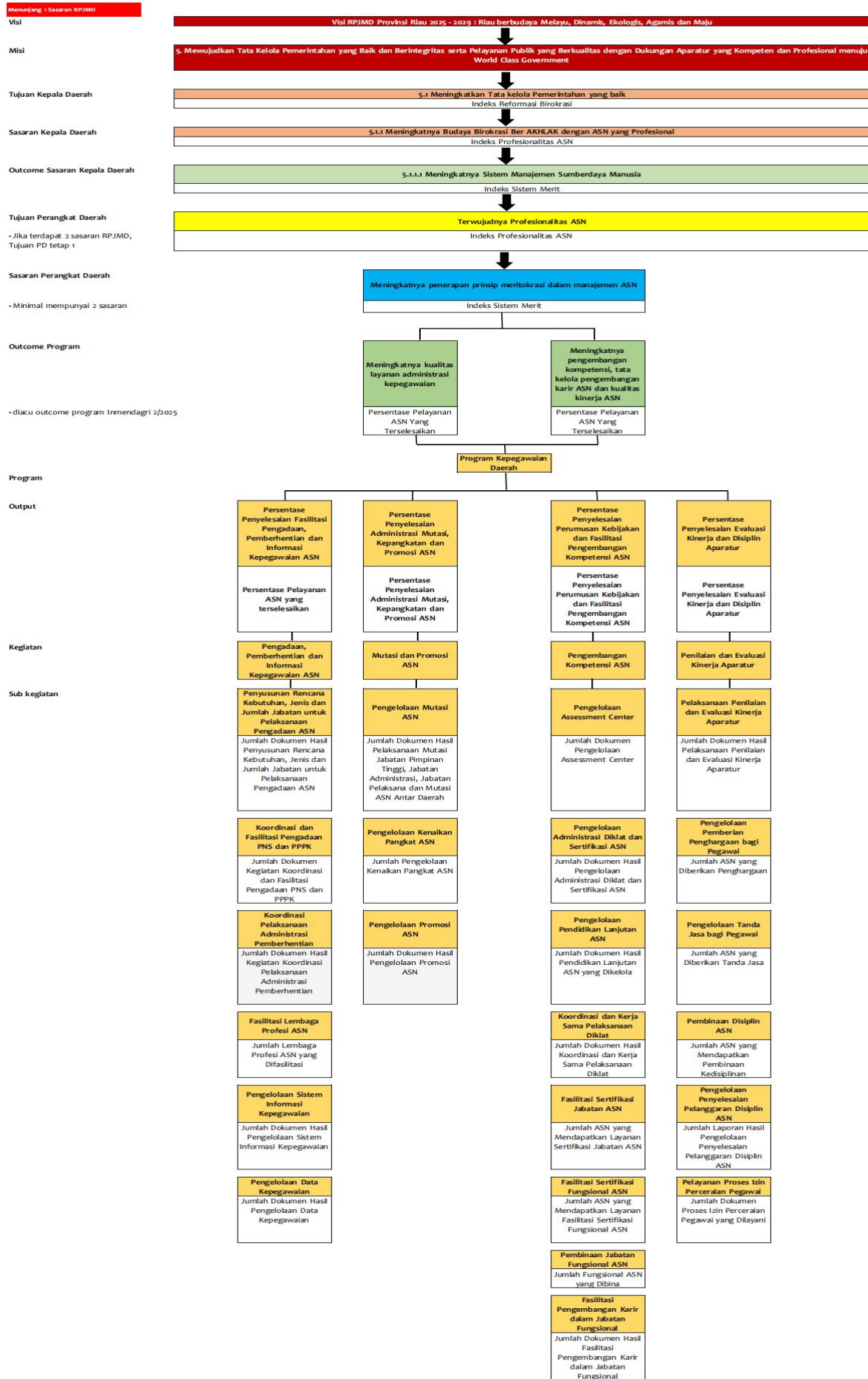
Cascading ini merupakan representasi visual yang menunjukkan keterkaitan logis antara tujuan, sasaran, indikator kinerja utama, hingga program, kegiatan, dan sub kegiatan yang akan dilaksanakan oleh perangkat daerah.

Cascading berfungsi sebagai alat perencanaan dan pengendalian kinerja yang penting, guna menjamin konsistensi antara perencanaan strategis dengan perencanaan kinerja tahunan. Dengan pendekatan ini, diharapkan seluruh jenjang organisasi mampu memahami kontribusi masing-masing dalam mencapai sasaran strategis secara terintegrasi dan terukur. Struktur pohon kinerja disusun mulai dari tujuan strategis organisasi, yang diturunkan menjadi sasaran strategis, indikator kinerja utama (IKU), dan selanjutnya dikaitkan dengan program, kegiatan, serta sub kegiatan yang mendukung pencapaian sasaran. Setiap tingkat kinerja memiliki indikator yang relevan dan target yang terukur, sehingga memudahkan proses pemantauan dan evaluasi kinerja secara berkesinambungan.

Berikut ini disajikan gambar perumusan program kegiatan dan sub kegiatan (cascading)

Gambar 4.1  
Perumusan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Renstra Perangkat Daerah

11.1. Cascading Perangkat Daerah



## 4.2 RUMUSAN PROGRAM, KEGIATAN, DAN SUB KEGIATAN

Rumusan program, kegiatan, dan sub kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Riau selama periode 2025–2029 dalam rangka mendukung pencapaian tujuan dan sasaran strategis yang telah ditetapkan pada Bab III. Penyusunan program dan kegiatan ini merupakan hasil *cascading* dari pohon kinerja, yang diturunkan dari tujuan dan sasaran organisasi ke dalam bentuk pelaksanaan yang lebih teknis dan operasional.

Perumusan program dan kegiatan disusun berdasarkan tugas dan fungsi utama BKD Provinsi Riau, serta mengacu pada prioritas pembangunan daerah dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk ketentuan terbaru dalam sistem perencanaan pembangunan dan penganggaran daerah. Nomenklatur yang digunakan mengacu pada regulasi yang mengatur klasifikasi, kodefikasi, dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah. Setiap program dijabarkan lebih lanjut ke dalam sejumlah kegiatan yang lebih terfokus, dan kemudian diturunkan ke dalam sub kegiatan yang menjadi satuan terkecil dalam pelaksanaan dan penganggaran tahunan. Perumusan program dan sub kegiatan ini tidak hanya mempertimbangkan aspek legalitas dan efisiensi, tetapi juga berorientasi pada hasil (*outcome-based*) untuk mendukung peningkatan kualitas layanan kepegawaian secara keseluruhan.

Guna menjamin akuntabilitas dan transparansi, setiap program, kegiatan, dan sub kegiatan dilengkapi dengan indikator kinerja yang terukur, target capaian tahunan selama periode perencanaan lima tahun, serta pagu indikatif anggaran. Penetapan indikator kinerja dilakukan dengan prinsip *SMART (Specific, Measurable, Achievable, Relevant, Time-bound)*, sehingga memudahkan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan kinerja secara periodik.

**Tabel 4.1**  
**Rencana Program Kegiatan dan Sub Kegiatan dan Pendanaan**

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET.
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
<b>5.03 - KEPEGAWAIAN</b>				29.291.274.716		30.874.473.681		31.785.926.778		32.719.718.058		33.549.080.224	
<b>5.03.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI</b>				25.638.323.939		25.659.187.094		26.333.913.215		27.023.854.246		27.676.030.975	
Terpenuhinya Kebutuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran	100%	100%	25.638.323.939	100%	25.659.187.094	100%	26.333.913.215	100%	27.023.854.246	100%	27.676.030.975	Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Riau
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen	7 Dokumen	8 Dokumen	117.732.034	8 Dokumen	117.849.775	8 Dokumen	119.617.521	8 Dokumen	122.041.494	8 Dokumen	124.568.496	
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	7 Dokumen	8 Dokumen	117.732.034	8 Dokumen	117.849.775	8 Dokumen	119.617.521	8 Dokumen	122.041.494	8 Dokumen	124.568.496	
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah laporan administrasi keuangan perangkat daerah yang dipenuhi	1 Laporan	1 Laporan	20.480.579.298	1 Laporan	20.501.059.877	1 Laporan	20.808.575.775	1 Laporan	21.358.503.262	1 Laporan	21.925.003.351	
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	114 Orang	118 Orang	20.480.579.298	118 Orang	20.501.059.877	118 Orang	20.808.575.775	118 Orang	21.358.503.262	118 Orang	21.925.003.351	
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Laporan barang milik daerah pada Perangkat Daerah yang dikelola	2 Laporan	4 Laporan	30.359.040	4 Laporan	30.389.398	4 Laporan	30.845.239	4 Laporan	31.647.216	4 Laporan	32.121.924	
Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Tersedianya Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1	3 Dokumen	7.720.915	3 Dokumen	7.728.635	3 Dokumen	7.844.565	3 Dokumen	8.048.524	3 Dokumen	8.169.252	
Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1	1 Laporan	22.638.125	1 Laporan	22.660.763	1 Laporan	23.000.674	1 Laporan	23.598.692	1 Laporan	23.952.672	
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah layanan Administrasi Kepegawaian yang difasilitasi	-	2 Jenis	51.943.817	2 Jenis	51.995.760	2 Jenis	52.775.697	2 Jenis	54.147.864	2 Jenis	54.960.083	
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	-	1 Paket	28.000.000	1 Paket	28.028.000	1 Paket	28.448.420	1 Paket	29.188.078	1 Paket	29.625.900	
Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	-	1 Paket	23.943.817	1 Paket	23.967.760	1 Paket	24.327.277	1 Paket	24.959.786	1 Paket	25.334.183	

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET.
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Jenis layanan Administrasi Umum yang di penuhi	6 Jenis	7 Jenis	2.494.784.949	7 Jenis	2.497.279.731	7 Jenis	2.511.275.488	7 Jenis	2.575.295.257	7 Jenis	2.613.924.684	
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 paket	52.707.639	1	52.760.346	1	53.551.751	1	54.944.097	1	55.768.258	
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor (UPT Penilaian Kompetensi)	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 paket	30.000.000	1	30.030.000	1	30.480.450	1	31.090.059	1	31.556.409	
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	5 Paket	542.706.811	4 Paket	543.249.517	4 Paket	551.398.260	4 Paket	565.734.615	4 Paket	574.220.634	
Penyediaan Bahan Logistik Kantor (UPT Penilaian Kompetensi)	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	5 Paket	170.436.843	4 Paket	170.607.279	4 Paket	173.166.389	4 Paket	176.629.716	4 Paket	179.279.162	
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	180.542.014	1 Paket	180.722.556	1 Paket	183.433.394	1 Paket	188.202.662	1 Paket	191.025.702	
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan (UPT Penilaian Kompetensi)	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	7.450.000	1 Paket	7.457.450	1 Paket	7.569.311	1 Paket	7.720.697	1 Paket	7.836.508	
Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	22.885.252	1 Paket	22.908.137	1 Paket	23.251.759	1 Paket	23.856.305	1 Paket	24.214.149	
Penyediaan Bahan/Material (UPT Penilaian Kompetensi)	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	1.000.000	1 Paket	1.001.000	1 Paket	1.016.015	1 Paket	1.036.335	1 Paket	1.051.880	
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	1 Laporan	1.434.872.000	1 Laporan	1.436.306.872	1 Laporan	1.434.388.036	1 Laporan	1.471.682.125	1 Laporan	1.493.757.357	
Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	-	1 Dokumen	52.184.390	1 Dokumen	52.236.574	1 Dokumen	53.020.123	1 Dokumen	54.398.646	1 Dokumen	55.214.625	
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Jenis Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang diadakan	-	2 Jenis	283.510.854	2 Jenis	279.019.194	2 Jenis	283.204.482	2 Jenis	290.537.318	2 Jenis	294.895.377	
Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	-	3 Paket	44.160.854	3 Paket	44.205.014	3 Paket	44.868.090	3 Paket	46.034.660	3 Paket	46.725.180	
Pengadaan Mebel (UPT Penilaian Kompetensi)	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	-	3 Paket	5.000.000	3 Paket	5.005.000	3 Paket	5.080.075	3 Paket	5.181.676	3 Paket	5.259.401	

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET.
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	-	3 unit	234.350.000	3 unit	229.809.180	3 unit	233.256.317	3 unit	239.320.982	3 unit	242.910.796	
<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Jumlah Jenis Jasa penunjang urusan pemerintah daerah yang dipenuhi</b>	<b>2 Jenis</b>	<b>2 Jenis</b>	<b>1.739.291.947</b>	<b>2 Jenis</b>	<b>1.741.031.237</b>	<b>2 Jenis</b>	<b>1.767.146.706</b>	<b>2 Jenis</b>	<b>1.811.559.171</b>	<b>2 Jenis</b>	<b>1.838.732.557</b>	
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	675.312.103	12 Laporan	675.987.415	12 Laporan	686.127.226	12 Laporan	703.966.534	12 Laporan	714.526.032	
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik (UPT Penilaian Kompetensi)	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	64.601.284	12 Laporan	64.665.885	12 Laporan	65.635.873	12 Laporan	66.948.591	12 Laporan	67.952.819	
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	812.449.732	12 Laporan	813.262.181	12 Laporan	825.461.114	12 Laporan	846.923.103	12 Laporan	859.626.949	
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor (UPT Penilaian Kompetensi)	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	186.928.828	12 Laporan	187.115.756	12 Laporan	189.922.493	12 Laporan	193.720.943	12 Laporan	196.626.757	
<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Jumlah Jenis Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dipelihara</b>	<b>4 Jenis</b>	<b>5 Jenis</b>	<b>440.122.000</b>	<b>5 Jenis</b>	<b>440.562.122</b>	<b>5 Jenis</b>	<b>760.472.307</b>	<b>5 Jenis</b>	<b>780.122.664</b>	<b>5 Jenis</b>	<b>791.824.503</b>	
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	1 Unit	1 Unit	41.730.000	1 Unit	41.771.730	1 Unit	50.493.000	1 Unit	51.805.818	1 Unit	52.582.905	
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	14 Unit	14 Unit	108.020.000	14 Unit	108.128.020	14 Unit	414.957.000	14 Unit	425.745.882	14 Unit	432.132.070	
Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	0	100 unit	20.000.000	100 unit	20.020.000	100 unit	20.320.300	100 unit	20.848.627	100 unit	21.161.357	
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	145 unit	150 unit	118.870.000	150 unit	118.988.870	150 unit	120.773.703	150 unit	123.913.819	150 unit	125.772.526	
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya (UPT Penilaian Kompetensi)	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	145 unit	150 unit	20.000.000	150 unit	20.020.000	150 unit	20.320.300	150 unit	20.726.706	150 unit	21.037.606	

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET.
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 unit	1 unit	131.502.000	1 unit	131.633.502	1 unit	133.608.004	1 unit	137.081.812	1 unit	139.138.039	
<b>5.03.02 - PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH</b>				3.652.950.777		5.215.286.587		5.452.013.563		5.695.863.812		5.873.049.249	
<b>1. Meningkatnya kualitas layanan administrasi kepegawaian.</b>	<b>Persentase Pelayanan ASN yang terselesaikan</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>747.324.461</b>	<b>100%</b>	<b>1.068.673.983</b>	<b>100%</b>	<b>1.117.832.989</b>	<b>100%</b>	<b>1.162.310.935</b>	<b>100%</b>	<b>1.194.422.677</b>	Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Riau
<b>Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN</b>	<b>Persentase Penyelesaian Fasilitas Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>747.324.461</b>	<b>100%</b>	<b>1.068.673.983</b>	<b>100%</b>	<b>1.117.832.989</b>	<b>100%</b>	<b>1.162.310.935</b>	<b>100%</b>	<b>1.194.422.677</b>	
Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	1 Dokumen	1 Dokumen	2.500.000	1 Dokumen	3.575.000	1 Dokumen	3.739.460	1 Dokumen	3.911.478	1 Dokumen	4.036.643	
Koordinasi dan Fasilitas Pengadaan PNS dan PPPK	Jumlah Dokumen Kegiatan Koordinasi dan Fasilitas Pengadaan PNS dan PPPK	1 Dokumen	1 Dokumen	81.210.000	1 Dokumen	116.130.300	1 Dokumen	121.472.293	1 Dokumen	127.060.019	1 Dokumen	131.125.939	
Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	1 Dokumen	2 Dokumen	107.896.800	2 Dokumen	154.292.429	2 Dokumen	161.389.875	2 Dokumen	168.813.809	2 Dokumen	174.215.851	
Fasilitas Lembaga Profesi ASN	Jumlah Lembaga Profesi ASN yang Difasilitasi	1 Lembaga	1 Lembaga	393.434.466	1 Lembaga	562.611.286	1 Lembaga	588.491.405	1 Lembaga	608.619.635	1 Lembaga	623.013.258	
Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	1 Dokumen	5 Dokumen	146.423.885	5 Dokumen	209.386.155	5 Dokumen	219.017.918	5 Dokumen	229.092.742	5 Dokumen	236.423.710	
Pengelolaan Data Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Data Kepegawaian	1 Dokumen	5 Dokumen	15.859.310	5 Dokumen	22.678.813	5 Dokumen	23.722.038	5 Dokumen	24.813.252	5 Dokumen	25.607.276	
<b>2. Meningkatnya pengembangan kompetensi, tata kelola pengembangan karir ASN dan kualitas kinerja ASN</b>	<b>Persentase Pelayanan ASN yang terselesaikan</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>2.905.626.316</b>	<b>100%</b>	<b>4.146.612.604</b>	<b>100%</b>	<b>4.334.180.574</b>	<b>100%</b>	<b>4.533.552.877</b>	<b>100%</b>	<b>4.678.626.572</b>	
<b>Mutasi dan Promosi ASN</b>	<b>Persentase Penyelesaian Administrasi Mutasi, Kepangkatan dan Promosi ASN</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>48.531.531</b>	<b>100%</b>	<b>69.400.089</b>	<b>100%</b>	<b>72.592.492</b>	<b>100%</b>	<b>75.931.747</b>	<b>100%</b>	<b>78.361.562</b>	

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET.
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
Pengelolaan Mutasi ASN	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Mutasi Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, Jabatan Pelaksana dan Mutasi ASN Antar Daerah	1 Dokumen	1 Dokumen	2.250.000	1 Dokumen	3.217.500	1 Dokumen	3.365.505	1 Dokumen	3.520.318	1 Dokumen	3.632.968	
Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	Jumlah Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	2 Laporan	1 Laporan	26.122.901	1 Laporan	37.355.748	1 Laporan	39.074.112	1 Laporan	40.871.522	1 Laporan	42.179.410	
Pengelolaan Promosi ASN	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Promosi ASN	1 Dokumen	1 Dokumen	20.158.630	1 Dokumen	28.826.841	1 Dokumen	30.152.875	1 Dokumen	31.539.907	1 Dokumen	32.549.184	
<b>Pengembangan Kompetensi ASN</b>	<b>Persentase Penyelesaian Perumusan Kebijakan dan Fasilitasi Pengembangan Kompetensi ASN</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>2.466.124.294</b>	<b>100%</b>	<b>3.526.557.739</b>	<b>100%</b>	<b>3.685.603.186</b>	<b>100%</b>	<b>3.855.140.931</b>	<b>100%</b>	<b>3.978.505.443</b>	
Pengelolaan Assessment Center	Jumlah Dokumen Pengelolaan Assessment Center	1 Dokumen	1 Dokumen	542.426.843	1 Dokumen	775.670.385	1 Dokumen	808.175.016	1 Dokumen	845.351.066	1 Dokumen	872.402.301	
Pengelolaan Administrasi Diklat dan Sertifikasi ASN	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Diklat dan Sertifikasi ASN	1 Dokumen	1 Dokumen	3.000.000	1 Dokumen	4.290.000	1 Dokumen	4.487.340	1 Dokumen	4.693.757	1 Dokumen	4.843.957	
Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	Jumlah Dokumen Hasil Pendidikan Lanjutan ASN yang Dikelola	1 Dokumen	1 Dokumen	1.219.669.000	1 Dokumen	1.744.126.670	1 Dokumen	1.824.356.496	1 Dokumen	1.908.276.895	1 Dokumen	1.969.341.756	
Koordinasi dan Kerja Sama Pelaksanaan Diklat	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Kerja Sama Pelaksanaan Diklat	1 Dokumen	1 Dokumen	284.301.327	1 Dokumen	406.550.897	1 Dokumen	425.252.238	1 Dokumen	444.813.841	1 Dokumen	459.047.884	
Fasilitasi Sertifikasi Jabatan ASN	Jumlah ASN yang Mendapatkan Layanan Sertifikasi Jabatan ASN	7 orang	2 Orang	200.911.000	7 orang	287.302.730	7 orang	300.518.655	7 orang	314.342.513	7 orang	324.401.474	
Fasilitasi Sertifikasi Fungsional ASN	Jumlah ASN yang Mendapatkan Layanan Fasilitasi Sertifikasi Fungsional ASN	40 Orang	20 Orang	159.690.000	55 Orang	228.356.700	55 Orang	238.861.108	55 Orang	249.848.719	55 Orang	257.843.878	
Pembinaan Jabatan Fungsional ASN	Jumlah Fungsional ASN yang Dibina	0	100 Orang	32.194.149	100 Orang	46.037.633	100 Orang	48.155.364	100 Orang	50.370.510	100 Orang	51.982.367	
Fasilitasi Pengembangan Karir dalam Jabatan Fungsional	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengembangan Karir dalam Jabatan Fungsional	1 Dokumen	1 Dokumen	23.931.975	1 Dokumen	34.222.724	1 Dokumen	35.796.969	1 Dokumen	37.443.630	1 Dokumen	38.641.826	
<b>Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur</b>	<b>Persentase Penyelesaian Evaluasi Kinerja dan Disiplin Aparatur</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>390.970.491</b>	<b>100%</b>	<b>550.654.776</b>	<b>100%</b>	<b>575.984.896</b>	<b>100%</b>	<b>602.480.199</b>	<b>100%</b>	<b>621.759.567</b>	
Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	1 Dokumen	1 Dokumen	6.100.000	1 Dokumen	8.723.000	1 Dokumen	9.124.258	1 Dokumen	9.543.973	1 Dokumen	9.849.381	

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET.
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
Pengelolaan Pemberian Penghargaan bagi Pegawai	Jumlah ASN yang Diberikan Penghargaan	20 Orang	20 Orang	270.537.856	20 Orang	378.436.109	20 Orang	395.844.171	20 Orang	414.053.002	20 Orang	427.302.698	
Pengelolaan Tanda Jasa bagi Pegawai	Jumlah ASN yang Diberikan Tanda Jasa	1000 Orang	1000 Orang	4.200.000	1000 Orang	6.006.000	1000 Orang	6.282.276	1000 Orang	6.571.260	1000 Orang	6.781.541	
Pembinaan Disiplin ASN	Jumlah ASN yang Mendapatkan Pembinaan Kedisiplinan	80 orang	80 orang	56.907.335	80 orang	81.377.489	80 orang	85.120.853	80 orang	89.036.412	80 orang	91.885.578	
Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	1 Laporan	1 Laporan	41.347.730	1 Laporan	59.127.253	1 Laporan	61.847.107	1 Laporan	64.692.074	1 Laporan	66.762.220	
Pelayanan Proses Izin Perceraian Pegawai	Jumlah Dokumen Proses Izin Perceraian Pegawai yang Dilayani	40 Dokumen	30 Dokumen	11.877.570	30 Dokumen	16.984.925	30 Dokumen	17.766.231	30 Dokumen	18.583.478	30 Dokumen	19.178.149	

Tabel 4.2  
Tujuan Sasaran Program Kegiatan Sub Kegiatan dan Pendanaan

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										
								2026		2027		2028		2029		2030		
								TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	
Meningkatnya budaya birokrasi berakhlak dengan ASN yang profesional	Terwujudnya Profesionalitas ASN	Meningkatkan Penerapan Prinsip Meritokrasi dalam Manajemen ASN	1, Terpenuhinya Kebutuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran	Terlaksananya Pemenuhan Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan	Indeks Profesionalitas ASN													
					Indeks Profesionalitas ASN													
					Indeks Sistem Merit													
					Persentase Pemenuhan Kebutuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	100%	100%	25.638.323.939	100%	25.659.187.094	100%	26.333.913.215	100%	27.023.854.246	100%	27.676.030.925	
					Jumlah Dokumen	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	7 Dokumen	8 Dokumen	117.732.034	8 Dokumen	117.849.775	8 Dokumen	119.617.521	8 Dokumen	122.041.494	8 Dokumen	124.568.496	
					Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	7 Dokumen	8 Dokumen	117.732.034	8 Dokumen	117.849.775	8 Dokumen	119.617.521	8 Dokumen	122.041.494	8 Dokumen	124.568.496	
					Jumlah laporan administrasi keuangan perangkat daerah yang dipenuhi	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1 Laporan	1 Laporan	20.480.579.298	1 Laporan	20.501.059.877	1 Laporan	20.808.575.775	1 Laporan	21.358.503.262	1 Laporan	21.925.003.351	
					Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	114 Orang	118 Orang	20.480.579.298	118 Orang	20.501.059.877	118 Orang	20.808.575.775	118 Orang	21.358.503.262	118 Orang	21.925.003.351	
					Jumlah Laporan barang milik daerah pada Perangkat Daerah yang dikelola	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	2 Laporan	4 Laporan	30.359.040	4 Laporan	30.389.398	4 Laporan	30.845.239	4 Laporan	31.647.216	4 Laporan	32.121.924	
					Tersedianya Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1	3 Dokumen	7.720.915	3 Dokumen	7.728.635	3 Dokumen	7.844.565	3 Dokumen	8.048.524	3 Dokumen	8.169.252	
					Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1	1 Laporan	22.638.125	1 Laporan	22.660.763	1 Laporan	23.000.674	1 Laporan	23.598.692	1 Laporan	23.952.672	
					Jumlah layanan Administrasi Kepegawaian yang difasilitasi	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	2 Jenis	51.943.817	2 Jenis	51.995.760	2 Jenis	52.775.697	2 Jenis	54.147.864	2 Jenis	54.960.083	
					Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	-	1 Paket	28.000.000	1 Paket	28.028.000	1 Paket	28.448.420	1 Paket	29.188.078	1 Paket	29.625.900	
					Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	-	1 Paket	23.943.817	1 Paket	23.967.760	1 Paket	24.327.277	1 Paket	24.959.786	1 Paket	25.334.183	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN									
								2026		2027		2028		2029		2030	
								TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
				Terlaksananya pemenuhan layanan Administrasi Umum	Jumlah Jenis layanan Administrasi Umum yang di penuhi	Administrasi Umum Perangkat Daerah	6 Jenis	7 Jenis	2.494.784.949	7 Jenis	2.497.279.731	7 Jenis	2.511.275.488	7 Jenis	2.575.295.257	7 Jenis	2.613.924.684
					Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1 Paket	1 paket	52.707.639	1	52.760.346	1	53.551.751	1	54.944.097	1	55.768.258
					Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1 Paket	1 paket	30.000.000	1	30.030.000	1	30.480.450	1	31.090.059	1	31.556.409
					Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	1 Paket	5	542.706.811	4 Paket	543.249.517	4 Paket	551.398.260	4 Paket	565.734.615	4 Paket	574.220.634
					Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Penyediaan Bahan Logistik Kantor (UPT Penilaian Kompetensi)	1 Paket	5	170.436.843	4 Paket	170.607.279	4 Paket	173.166.389	4 Paket	176.629.716	4 Paket	179.279.162
					Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	1 Paket	1 Paket	180.542.014	1 Paket	180.722.556	1 Paket	183.433.394	1 Paket	188.202.662	1 Paket	191.025.702
					Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan (UPT Penilaian Kompetensi)	1 Paket	1 Paket	7.450.000	1 Paket	7.457.450	1 Paket	7.569.311	1 Paket	7.720.697	1 Paket	7.836.508
					Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Penyediaan Bahan/Material	1 Paket	1 Paket	22.885.252	1 Paket	22.908.137	1 Paket	23.251.759	1 Paket	23.856.305	1 Paket	24.214.149
					Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Penyediaan Bahan/Material (UPT Penilaian Kompetensi)	1 Paket	1 Paket	1.000.000	1 Paket	1.001.000	1 Paket	1.016.015	1 Paket	1.036.335	1 Paket	1.051.880
					Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	1 Laporan	1.434.872.000	1 Laporan	1.436.306.872	1 Laporan	1.434.388.036	1 Laporan	1.471.682.125	1 Laporan	1.493.757.357
					Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	-	1 Dokumen	52.184.390	1 Dokumen	52.236.574	1 Dokumen	53.020.123	1 Dokumen	54.398.646	1 Dokumen	55.214.625
				Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah	Jumlah Jenis Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang diadakan	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	2 Jenis	283.510.854	2 Jenis	279.019.194	2 Jenis	283.204.482	2 Jenis	290.537.318	2 Jenis	294.895.377
					Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Pengadaan Mebel	-	3 Paket	44.160.854	3 Paket	44.205.014	3 Paket	44.868.090	3 Paket	46.034.660	3 Paket	46.725.180
					Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Pengadaan Mebel (UPT Penilaian Kompetensi)	-	3 Paket	5.000.000	3 Paket	5.005.000	3 Paket	5.080.075	3 Paket	5.181.676	3 Paket	5.259.401
					Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	-	3 unit	234.350.000	3 unit	229.809.180	3 unit	233.256.317	3 unit	239.320.982	3 unit	242.910.796
				Terlaksananya pemenuhan penyediaan Jasa penunjang urusan pemerintah daerah	Jumlah Jenis Jasa penunjang urusan pemerintah daerah yang dipenuhi	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2 Jenis	2 Jenis	1.739.291.947	2 Jenis	1.741.031.237	2 Jenis	1.767.146.706	2 Jenis	1.811.559.171	2 Jenis	1.838.732.557

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN									
								2026		2027		2028		2029		2030	
								TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12 Laporan	12 Laporan	675.312.103	12 Laporan	675.987.415	12 Laporan	686.127.226	12 Laporan	703.966.534	12 Laporan	714.526.032
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12 Laporan	12 Laporan	64.601.284	12 Laporan	64.665.885	12 Laporan	65.635.873	12 Laporan	66.948.591	12 Laporan	67.952.819
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	12 Laporan	12 Laporan	812.449.732	12 Laporan	813.262.181	12 Laporan	825.461.114	12 Laporan	846.923.103	12 Laporan	859.626.949
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor (UPT Penilaian	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor (UPT Penilaian	12 Laporan	12 Laporan	186.928.828	12 Laporan	187.115.756	12 Laporan	189.922.493	12 Laporan	193.720.943	12 Laporan	196.626.757
				Terlaksananya pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan	Jumlah Jenis Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	4 Jenis	5 Jenis	440.122.000	5 Jenis	440.562.122	5 Jenis	760.472.307	5 Jenis	780.122.664	5 Jenis	791.824.503
					Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan	1 Unit	1 Unit	41.730.000	1 Unit	41.771.730	1 Unit	50.493.000	1 Unit	51.805.818	1 Unit	52.582.905
					Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dinalih/direhabilitasi	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan	14 Unit	14 Unit	108.020.000	14 Unit	108.128.020	14 Unit	414.957.000	14 Unit	425.745.882	14 Unit	432.132.070
					Jumlah Mebel yang Dipelihara	Pemeliharaan Mebel	0	100 unit	20.000.000	100 unit	20.020.000	100 unit	20.320.300	100 unit	20.848.627	100 unit	21.161.357
					Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	145 unit	150 unit	118.870.000	150 unit	118.988.870	150 unit	120.773.703	150 unit	123.913.819	150 unit	125.772.526
					Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya (UPT Penilaian	145 unit	150 unit	20.000.000	150 unit	20.020.000	150 unit	20.320.300	150 unit	20.726.706	150 unit	21.037.606
					Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dinalih/direhabilitasi	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan	1 unit	1 unit	131.502.000	1 unit	131.633.502	1 unit	133.608.004	1 unit	137.081.812	1 unit	139.138.039
			1. Meningkatkan kualitas layanan administrasi kepegawaian.		Persentase Pelayanan ASN Yang Terselamatkan	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	100%	100%	747.324.461	100%	1.068.673.983	100%	1.117.832.989	100%	1.162.310.935	100%	1.194.422.677
				Terlaksananya Penyelesaian Fasilitasi Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	Persentase Penyelesaian Fasilitasi Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	100%	100%	747.324.461	100%	1.068.673.983	100%	1.117.832.989	100%	1.162.310.935	100%	1.194.422.677
					Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	1 Dokumen	1 Dokumen	2.500.000	1 Dokumen	3.575.000	1 Dokumen	3.739.460	1 Dokumen	3.911.478	1 Dokumen	4.036.643
					Jumlah Dokumen Kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	1 Dokumen	1 Dokumen	81.210.000	1 Dokumen	116.130.300	1 Dokumen	121.472.293	1 Dokumen	127.060.019	1 Dokumen	131.125.939

NSPK DAN SASARAN RP/JMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN									
								2026		2027		2028		2029		2030	
								TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
					Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	1 Dokumen	2 dokumen	107.896.800	2 dokumen	154.292.429	2 dokumen	161.389.875	2 dokumen	168.813.809	2 dokumen	174.215.851
					Jumlah Lembaga Profesi ASN yang Difasilitasi	Fasilitasi Lembaga Profesi ASN	1 Lembaga	1 Lembaga	393.434.466	1 Lembaga	562.611.286	1 Lembaga	588.491.405	1 Lembaga	608.619.635	1 Lembaga	623.013.258
					Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	1 Dokumen	5 Dokumen	146.423.885	5 Dokumen	209.386.155	5 Dokumen	219.017.918	5 Dokumen	229.092.742	5 Dokumen	236.423.710
					Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Data Kepegawaian	Pengelolaan Data Kepegawaian	1 Dokumen	5 Dokumen	15.859.310	5 Dokumen	22.678.813	5 Dokumen	23.722.038	5 Dokumen	24.813.252	5 Dokumen	25.607.276
				2. Meningkatnya pengembangan kompetensi, tata kelola pengembangan karir ASN dan kualitas kinerja ASN	Persentase Pelayanan ASN Yang Terselamatkan	<b>PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH</b>	100%	100%	2.905.626.316	100%	4.146.612.604	100%	4.334.180.574	100%	4.533.552.877	100%	4.678.626.572
				Terlaksananya Penyelesaian Administrasi Mutasi, Kepangkatan dan Promosi ASN	Persentase Penyelesaian Administrasi Mutasi, Kepangkatan dan Promosi ASN	Mutasi dan Promosi ASN	100%	100%	48.531.531	100%	69.400.089	100%	72.592.492	100%	75.931.747	100%	78.361.562
					Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Mutasi Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, Jabatan Pelaksana dan Mutasi ASN Antar Daerah	Pengelolaan Mutasi ASN	1 Dokumen	1 Dokumen	2.250.000	1 Dokumen	3.217.500	1 Dokumen	3.365.505	1 Dokumen	3.520.318	1 Dokumen	3.632.968
					Jumlah Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	2 Laporan	1 Laporan	26.122.901	1 Laporan	37.355.748	1 Laporan	39.074.112	1 Laporan	40.871.522	1 Laporan	42.179.410
					Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Promosi ASN	Pengelolaan Promosi ASN	1 Dokumen	1 Dokumen	20.158.630	1 Dokumen	28.826.841	1 Dokumen	30.152.875	1 Dokumen	31.539.907	1 Dokumen	32.549.184
				Terlaksananya Penyelesaian Perumusan Kebijakan dan Fasilitasi Pengembangan Kompetensi ASN	Persentase Penyelesaian Perumusan Kebijakan dan Fasilitasi Pengembangan Kompetensi ASN	Pengembangan Kompetensi ASN	100%	100%	2.466.124.294	100%	3.526.557.739	100%	3.685.603.186	100%	3.855.140.931	100%	3.978.505.443
					Jumlah Dokumen Pengelolaan Assessment Center	Pengelolaan Assessment Center	1 Dokumen	1 Dokumen	542.426.843	1 Dokumen	775.670.385	1 Dokumen	808.175.016	1 Dokumen	845.351.066	1 Dokumen	872.402.301
					Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Diklat dan Sertifikasi ASN	Pengelolaan Administrasi Diklat dan Sertifikasi ASN	1 Dokumen	1 Dokumen	3.000.000	1 Dokumen	4.290.000	1 Dokumen	4.487.340	1 Dokumen	4.693.757	1 Dokumen	4.843.957
					Jumlah Dokumen Hasil Pendidikan Lanjutan ASN yang Dikelola	Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	1 Dokumen	1 Dokumen	1.219.669.000	1 Dokumen	1.744.126.670	1 Dokumen	1.824.356.496	1 Dokumen	1.908.276.895	1 Dokumen	1.969.341.756
					Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Kerja Sama Pelaksanaan Diklat	Koordinasi dan Kerja Sama Pelaksanaan Diklat	1 Dokumen	1 Dokumen	284.301.327	1 Dokumen	406.550.897	1 Dokumen	425.252.238	1 Dokumen	444.813.841	1 Dokumen	459.047.884
					Jumlah ASN yang Mendapatkan Layanan Sertifikasi Jabatan ASN	Fasilitasi Sertifikasi Jabatan ASN	7 orang	72Orang	200.911.000	7 orang	287.302.730	7 orang	300.518.655	7 orang	314.342.513	7 orang	324.401.474
					Jumlah ASN yang Mendapatkan Layanan Fasilitasi Sertifikasi Fungsional ASN	Fasilitasi Sertifikasi Fungsional ASN	40 Orang	20 Orang	159.690.000	55 Orang	228.356.700	55 Orang	238.861.108	55 Orang	249.848.719	55 Orang	257.843.878
					Jumlah Fungsional ASN yang Dibina	Pembinaan Jabatan Fungsional ASN	0	100 Orang	32.194.149	100 Orang	46.037.633	100 Orang	48.155.364	100 Orang	50.370.510	100 Orang	51.982.367

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN									
								2026		2027		2028		2029		2030	
								TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
					Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengembangan Karir dalam Jabatan Fungsional	Fasilitasi Pengembangan Karir dalam Jabatan Fungsional	1 Dokumen	1 Dokumen	23.931.975	1 Dokumen	34.222.724	1 Dokumen	35.796.969	1 Dokumen	37.443.630	1 Dokumen	38.641.826
				Terlaksananya Penyelesaian Evaluasi Kinerja dan Disiplin Aparatur	Persentase Penyelesaian Evaluasi Kinerja dan Disiplin Aparatur	Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	100%	100%	390.970.491	100%	550.654.776	100%	575.984.896	100%	602.480.199	100%	621.759.567
					Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	1 Dokumen	1 Dokumen	6.100.000	1 Dokumen	8.723.000	1 Dokumen	9.124.258	1 Dokumen	9.543.973	1 Dokumen	9.849.381
					Jumlah ASN yang Diberikan Penghargaan	Pengelolaan Pemberian Penghargaan bagi Pegawai	20 Orang	20 Orang	270.537.856	20 Orang	378.436.109	20 Orang	395.844.171	20 Orang	414.053.002	20 Orang	427.302.698
					Jumlah ASN yang Diberikan Tanda Jasa	Pengelolaan Tanda Jasa bagi Pegawai	1000 Orang	1000 Orang	4.200.000	1000 Orang	6.006.000	1000 Orang	6.282.276	1000 Orang	6.571.260	1000 Orang	6.781.541
					Jumlah ASN yang Mendapatkan Pembinaan Kedisiplinan	Pembinaan Disiplin ASN	80 orang	80 orang	56.907.335	80 orang	81.377.489	80 orang	85.120.853	80 orang	89.036.412	80 orang	91.885.578
					Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	1 Laporan	1 Laporan	41.347.730	1 Laporan	59.127.253	1 Laporan	61.847.107	1 Laporan	64.692.074	1 Laporan	66.762.220
					Jumlah Dokumen Proses Izin Perceraian Pegawai yang Dilayani	Pelayanan Proses Izin Perceraian Pegawai	40 Dokumen	30 Dokumen	11.877.570	30 Dokumen	16.984.925	30 Dokumen	17.766.231	30 Dokumen	18.583.478	30 Dokumen	19.178.149

**Tabel 4.3**  
**DAFTAR SUBKEGIATAN PRIORITAS DALAM MENDUKUNG PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH**

NO (1)	PROGRAM PRIORITAS (2)	OUTCOME (3)	KEGIATAN/SUBKEGIATAN (4)	KET. (5)
	1. Peningkatan penerapan standar pelayanan berbasis digital			
	Program Kepegawaian Daerah	1. Meningkatnya kualitas layanan administrasi kepegawaian.		
			<b>Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN</b>	
			Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	
			Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	
			Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	
			Fasilitasi Lembaga Profesi ASN	
			Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	
			Pengelolaan Data Kepegawaian	
	2. Peningkatan Penataan birokrasi			
	Program Kepegawaian Daerah	2. Meningkatnya pengembangan kompetensi, tata kelola pengembangan karir ASN dan kualitas kinerja ASN		
			<b>Mutasi dan Promosi ASN</b>	
			Pengelolaan Mutasi ASN	
			Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	
			Pengelolaan Promosi ASN	

**Tabel 4.5**  
**INDIKATOR KINERJA UTAMA PERANGKAT DAERAH**

NO	INDIKATOR	SATUAN	TARGET TAHUN						KET.
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	Indeks Profesionalitas ASN	Indeks	77,6	78,7	79,7	80,8	81,8	82,9	
2	Indeks Sistem Merit	Indeks	328	330	333	336	339	343	

**Tabel 4.5**  
**INDIKATOR KINERJA KUNCI PERANGKAT DAERAH**

NO	INDIKATOR	SATUAN	TARGET TAHUN					KET.	
			2025	2026	2027	2028	2029		2030
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	Rasio Pegawai Pendidikan Tinggi dan Menengah/Dasar (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	Jumlah Pegawai Menurut Pendidikan Perguruan Tinggi Ke Atas <hr/> <b>X 100</b> Jumlah seluruh PNS	81,78	81,78	81,78	81,78	81,78	81,78	
2	Rasio Jabatan Fungsional bersertifikat Kompetensi (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	Jumlah PNS Fungsional yang Memiliki Sertifikat Kompetensi <hr/> <b>X 100</b> Jumlah seluruh PNS fungsional	20,65	20,65	20,65	20,65	20,65	20,65	
3	Rasio Pegawai Fungsional (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	Jumlah PNS Fungsional yang Memiliki Sertifikat Kompetensi <hr/> <b>X 100</b> Jumlah seluruh PNS fungsional	92,43	92,43	92,43	92,43	92,43	92,43	

## **BAB V PENUTUP**

### **5.1 KESIMPULAN**

Renstra Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Riau Tahun 2025-2029 telah disusun dengan berpedoman pada RPJMD Provinsi Riau 2025-2029 dan memperhatikan kebijakan nasional di bidang manajemen ASN. Dokumen perencanaan ini merupakan instrumen penting yang akan menjadi acuan BKD Provinsi Riau dalam menjalankan tugas dan fungsinya selama lima tahun ke depan.

Sebagai perangkat daerah yang memiliki kewenangan dalam bidang manajemen kepegawaian daerah, BKD Provinsi Riau memiliki peran strategis dalam mendukung pencapaian visi dan misi Gubernur Riau periode 2025-2029 melalui pengelolaan ASN yang profesional, berintegritas, dan berkinerja tinggi. Keberhasilan pengelolaan ASN akan berdampak secara langsung terhadap kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik di Provinsi Riau.

Berdasarkan analisis terhadap kondisi pelayanan, permasalahan, dan isu strategis, BKD Provinsi Riau telah menetapkan satu tujuan utama yang didukung oleh beberapa sasaran strategis untuk periode 2025-2029. Tujuan dan sasaran tersebut selanjutnya dioperasionalkan dalam bentuk program, kegiatan, dan sub kegiatan yang akan dilaksanakan secara bertahap dan berkesinambungan selama lima tahun ke depan.

Program, kegiatan, dan sub kegiatan yang telah dirumuskan ditujukan untuk menjawab berbagai tantangan dalam pengelolaan ASN di lingkungan Pemerintah Provinsi Riau, seperti optimalisasi rekrutmen ASN, implementasi manajemen ASN berbasis merit sistem, peningkatan kompetensi dan profesionalitas ASN, pengembangan sistem informasi manajemen kepegawaian yang terintegrasi, serta penataan sistem penilaian kinerja, penghargaan dan disiplin ASN. Keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan tersebut akan diukur melalui indikator kinerja yang telah ditetapkan, dengan target capaian yang jelas untuk setiap tahunnya.

### **5.2 KAIDAH PELAKSANAAN**

Keberhasilan pelaksanaan Renstra BKD Provinsi Riau 2025-2029 sangat bergantung pada komitmen dan partisipasi aktif seluruh pemangku kepentingan. Untuk memastikan efektivitas implementasi Renstra, perlu diterapkan beberapa kaidah pelaksanaan sebagai berikut:

1. **Konsistensi dan Kesenambungan**

Renstra merupakan dokumen perencanaan jangka menengah yang menjadi acuan dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) BKD Provinsi Riau setiap tahunnya. Oleh karena itu, diperlukan konsistensi dan kesinambungan antara Renstra dengan Renja, serta dokumen perencanaan dan penganggaran lainnya seperti RKA-SKPD dan DPA-SKPD.

2. ***Cross-Cutting***

Pelaksanaan program dan kegiatan BKD Provinsi Riau perlu diintegrasikan dan disinergikan dengan program dan kegiatan Organisasi Perangkat Daerah lainnya, terutama yang memiliki *cross-cutting* atau keterkaitan dengan urusan manajemen

ASN. Hal ini untuk menjamin terjadinya keterpaduan dan saling mendukung dalam pencapaian tujuan pembangunan daerah.

### 3. Adaptabilitas

Renstra BKD Provinsi Riau 2025-2029 bersifat dinamis dan dapat disesuaikan dengan perubahan lingkungan strategis, baik internal maupun eksternal. Penyesuaian dapat dilakukan melalui mekanisme perubahan Renstra sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, sepanjang tidak mengubah tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

### 4. Partisipatif

Pelaksanaan Renstra melibatkan peran aktif seluruh pemangku kepentingan, baik di lingkungan internal BKD Provinsi Riau, Organisasi Perangkat Daerah lainnya, maupun mitra kerja BKD seperti instansi pusat, akademisi, dan pihak lainnya yang terkait dengan manajemen ASN.

### 5. Akuntabilitas

Seluruh kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka implementasi Renstra harus dapat dipertanggungjawabkan, baik dari segi penggunaan anggaran maupun pencapaian kinerja. Untuk itu, perlu diterapkan prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam setiap tahapan pelaksanaan.

## 5.3 PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Untuk memastikan bahwa pelaksanaan Renstra BKD Provinsi Riau 2025-2029 berjalan sesuai dengan rencana dan mencapai target yang ditetapkan, perlu dilakukan kegiatan pengendalian dan evaluasi secara berkala dan berkesinambungan. Mekanisme pengendalian dan evaluasi Renstra BKD Provinsi Riau 2025-2029 adalah sebagai berikut:

### 5.3.1 Pengendalian

#### 1. Pengendalian Perencanaan

- a. Memastikan kesesuaian antara Renstra dengan RPJMD Provinsi Riau 2025-2029.
- b. Memastikan konsistensi antara Renstra dengan Renja BKD Provinsi Riau setiap tahunnya.
- c. Memastikan sinkronisasi antara Renja dengan RKA dan DPA BKD Provinsi Riau.

#### 2. Pengendalian Pelaksanaan

- a. Melakukan pemantauan secara berkala terhadap pelaksanaan program dan kegiatan yang tertuang dalam Renstra.
- b. Mengidentifikasi permasalahan dan kendala dalam pelaksanaan program dan kegiatan.
- c. Melakukan tindakan korektif dan penyesuaian terhadap pelaksanaan program dan kegiatan.

#### 3. Pengendalian Pelaporan

- a. Menyusun laporan kemajuan pelaksanaan Renstra secara berkala.
- b. Menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) BKD Provinsi Riau setiap tahunnya.
- c. Melaporkan hasil pengendalian kepada pimpinan daerah melalui mekanisme yang berlaku.

### 5.3.2 Evaluasi

1. Evaluasi Perencanaan
  - a. Mengevaluasi kesesuaian program dan kegiatan dalam Renstra dengan kebutuhan pemangku kepentingan.
  - b. Mengevaluasi relevansi indikator kinerja dan target yang ditetapkan.
  - c. Mengevaluasi keterkaitan program dan kegiatan BKD dengan program dan kegiatan Organisasi Perangkat Daerah lainnya.
2. Evaluasi Pelaksanaan
  - a. Mengevaluasi pencapaian target kinerja program dan kegiatan.
  - b. Mengevaluasi efisiensi penggunaan sumber daya dalam pelaksanaan program dan kegiatan.
  - c. Mengevaluasi dampak pelaksanaan program dan kegiatan terhadap kondisi kepegawaian daerah.
3. Evaluasi Dampak
  - a. Mengevaluasi kontribusi pencapaian kinerja BKD Provinsi Riau terhadap pencapaian sasaran RPJMD.
  - b. Mengevaluasi dampak pelaksanaan program dan kegiatan terhadap peningkatan kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik.
  - c. Mengevaluasi kepuasan pemangku kepentingan terhadap layanan kepegawaian.

Selanjutnya, hasil pengendalian dan evaluasi akan menjadi bahan masukan untuk:

1. Penyusunan laporan kinerja BKD Provinsi Riau.
2. Penyusunan Renja BKD Provinsi Riau tahun berikutnya.
3. Penyesuaian dan perubahan Renstra BKD Provinsi Riau (jika diperlukan).
4. Penyusunan Renstra BKD Provinsi Riau untuk periode berikutnya.

Dengan adanya mekanisme pengendalian dan evaluasi yang efektif, diharapkan pelaksanaan Renstra BKD Provinsi Riau 2025-2029 dapat berjalan sesuai dengan rencana dan mencapai target yang telah ditetapkan, sehingga dapat memberikan kontribusi optimal terhadap pencapaian visi dan misi Gubernur Riau periode 2025-2029.

Demikian Rencana Strategis Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Riau Tahun 2025-2029 ini disusun untuk menjadi acuan dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi program dan kegiatan BKD Provinsi Riau selama lima tahun ke depan.

**Pt. KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH  
PROVINSI RIAU,**



**ZULKIFLI S, S.Ag., MA., M.Si**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19710902 199703 1 002

Meningkatnya Penerapan Prinsip Meritokrasi dalam Manajemen ASN

Indikator: Indeks Sistem Merit



**TABEL 4.3 RENCANA PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN DAN PENDANAAN  
PEMERINTAH PROVINSI RIAU**

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
5.03 - KEPEGAWAIAN				29.291.274.716,00		30.388.571.311,00		31.292.735.872,00		32.216.663.335,00		33.038.479.682,00		
5.03.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI				24.272.941.122,00		25.173.284.724,00		25.840.722.309,00		26.520.799.523,00		27.165.430.433,00		
Terpenuhinya kebutuhan pelayanan administrasi perkantoran				24.272.941.122,00		25.173.284.724,00		25.840.722.309,00		26.520.799.523,00		27.165.430.433,00	5.03.0.00.0.00.01.00 00 - BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH	
5.03.01.1.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				117.732.034,00		117.849.775,00		119.617.521,00		122.041.494,00		124.568.496,00	5.03.0.00.0.00.01.00 00 - BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH	
Persentase Pemenuhan Kebutuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	7	8	117.732.034,00	8	117.849.775,00	8	119.617.521,00	8	122.041.494,00	8	124.568.496,00	5.03.0.00.0.00.01.00 00 - BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH	
5.03.01.1.01.0001 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				117.732.034,00		117.849.775,00		119.617.521,00		122.041.494,00		124.568.496,00	5.03.0.00.0.00.01.00 00 - BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH	
Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	7	8	117.732.034,00	8	117.849.775,00	8	119.617.521,00	8	122.041.494,00	8	124.568.496,00	5.03.0.00.0.00.01.00 00 - BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH	
5.03.01.1.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				20.480.579.298,00		20.501.059.877,00		20.808.575.775,00		21.358.503.262,00		21.925.003.351,00	5.03.0.00.0.00.01.00 00 - BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH	
Persentase Pemenuhan Kebutuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	114	118	20.480.579.298,00	118	20.501.059.877,00	118	20.808.575.775,00	118	21.358.503.262,00	118	21.925.003.351,00	5.03.0.00.0.00.01.00 00 - BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH	
5.03.01.1.02.0001 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN				20.480.579.298,00		20.501.059.877,00		20.808.575.775,00		21.358.503.262,00		21.925.003.351,00	5.03.0.00.0.00.01.00 00 - BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH	
Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	114	118	20.480.579.298,00	118	20.501.059.877,00	118	20.808.575.775,00	118	21.358.503.262,00	118	21.925.003.351,00	5.03.0.00.0.00.01.00 00 - BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH	
5.03.01.1.03 - Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah				30.359.040,00		30.389.398,00		30.845.239,00		31.647.216,00		32.121.924,00	5.03.0.00.0.00.01.00 00 - BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH	
Persentase Pemenuhan Kebutuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1	3	7.720.915,00	3	7.728.635,00	3	7.844.565,00	3	8.048.524,00	3	8.169.252,00	5.03.0.00.0.00.01.00 00 - BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH	
	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1	1	22.638.125,00	1	22.660.763,00	1	23.000.674,00	1	23.598.692,00	1	23.952.672,00	5.03.0.00.0.00.01.00 00 - BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
5.03.01.1.03.0001 - Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD				7.720.915,00		7.728.635,00		7.844.565,00		8.048.524,00		8.169.252,00	5.03.0.00.0.00.01.00 00 - BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH	
Tersedianya Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1	3	7.720.915,00	3	7.728.635,00	3	7.844.565,00	3	8.048.524,00	3	8.169.252,00	5.03.0.00.0.00.01.00 00 - BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH	
5.03.01.1.03.0006 - Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				22.638.125,00		22.660.763,00		23.000.674,00		23.598.692,00		23.952.672,00	5.03.0.00.0.00.01.00 00 - BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH	
Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1	1	22.638.125,00	1	22.660.763,00	1	23.000.674,00	1	23.598.692,00	1	23.952.672,00	5.03.0.00.0.00.01.00 00 - BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH	
5.03.01.1.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				51.943.817,00		51.995.760,00		52.775.697,00		54.147.864,00		54.960.083,00	5.03.0.00.0.00.01.00 00 - BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH	
Persentase Pemenuhan Kebutuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	1	1	28.000.000,00	1	28.028.000,00	1	28.448.420,00	1	29.188.078,00	1	29.625.900,00	5.03.0.00.0.00.01.00 00 - BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH	
	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	1	1	23.943.817,00	1	23.967.760,00	1	24.327.277,00	1	24.959.786,00	1	25.334.183,00	5.03.0.00.0.00.01.00 00 - BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH	
5.03.01.1.05.0002 - Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya				28.000.000,00		28.028.000,00		28.448.420,00		29.188.078,00		29.625.900,00	5.03.0.00.0.00.01.00 00 - BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH	
Tersedianya Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	1	1	28.000.000,00	1	28.028.000,00	1	28.448.420,00	1	29.188.078,00	1	29.625.900,00	5.03.0.00.0.00.01.00 00 - BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH	
5.03.01.1.05.0003 - Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian				23.943.817,00		23.967.760,00		24.327.277,00		24.959.786,00		25.334.183,00	5.03.0.00.0.00.01.00 00 - BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH	
Terlaksananya Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	1	1	23.943.817,00	1	23.967.760,00	1	24.327.277,00	1	24.959.786,00	1	25.334.183,00	5.03.0.00.0.00.01.00 00 - BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH	
5.03.01.1.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah				1.405.932.244,00		2.288.184.002,00		2.299.043.323,00		2.358.818.450,00		2.394.200.725,00	5.03.0.00.0.00.01.00 00 - BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH	
Persentase Pemenuhan Kebutuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	-	1	52.184.390,00	1	52.236.574,00	1	53.020.123,00	1	54.398.646,00	1	55.214.625,00	5.03.0.00.0.00.01.00 00 - BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH	
	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1	1	554.906.138,00	1	1.436.306.872,00	1	1.434.388.036,00	1	1.471.682.125,00	1	1.493.757.357,00	5.03.0.00.0.00.01.00 00 - BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH	
	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1	4	542.706.811,00	4	543.249.517,00	4	551.398.260,00	4	565.734.615,00	4	574.220.634,00	5.03.0.00.0.00.01.00 00 - BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	1	1	22.885.252,00	1	22.908.137,00	1	23.251.759,00	1	23.856.305,00	1	24.214.149,00	5.03.0.00.0.00.01.00 - BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH	
	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1	1	180.542.014,00	1	180.722.556,00	1	183.433.394,00	1	188.202.662,00	1	191.025.702,00	5.03.0.00.0.00.01.00 - BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH	
	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1	1	52.707.639,00	1	52.760.346,00	1	53.551.751,00	1	54.944.097,00	1	55.768.258,00	5.03.0.00.0.00.01.00 - BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH	
	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3	1	-	1	-	1	-	1	-	1	-	5.03.0.00.0.00.01.00 - BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH	
5.03.01.1.06.0001 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				52.707.639,00		52.760.346,00		53.551.751,00		54.944.097,00		55.768.258,00	5.03.0.00.0.00.01.00 - BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH	
Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1	1	52.707.639,00	1	52.760.346,00	1	53.551.751,00	1	54.944.097,00	1	55.768.258,00	5.03.0.00.0.00.01.00 - BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH	
5.03.01.1.06.0002 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				-		-		-		-		-	5.03.0.00.0.00.01.00 - BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH	
Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3	1	-	1	-	1	-	1	-	1	-	5.03.0.00.0.00.01.00 - BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH	
5.03.01.1.06.0004 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor				542.706.811,00		543.249.517,00		551.398.260,00		565.734.615,00		574.220.634,00	5.03.0.00.0.00.01.00 - BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH	
Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1	4	542.706.811,00	4	543.249.517,00	4	551.398.260,00	4	565.734.615,00	4	574.220.634,00	5.03.0.00.0.00.01.00 - BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH	
5.03.01.1.06.0005 - Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan				180.542.014,00		180.722.556,00		183.433.394,00		188.202.662,00		191.025.702,00	5.03.0.00.0.00.01.00 - BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH	
Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1	1	180.542.014,00	1	180.722.556,00	1	183.433.394,00	1	188.202.662,00	1	191.025.702,00	5.03.0.00.0.00.01.00 - BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH	
5.03.01.1.06.0007 - Penyediaan Bahan/Material				22.885.252,00		22.908.137,00		23.251.759,00		23.856.305,00		24.214.149,00	5.03.0.00.0.00.01.00 - BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH	
Tersedianya Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	1	1	22.885.252,00	1	22.908.137,00	1	23.251.759,00	1	23.856.305,00	1	24.214.149,00	5.03.0.00.0.00.01.00 - BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH	
5.03.01.1.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				554.906.138,00		1.436.306.872,00		1.434.388.036,00		1.471.682.125,00		1.493.757.357,00	5.03.0.00.0.00.01.00 - BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1	1	554.906.138,00	1	1.436.306.872,00	1	1.434.388.036,00	1	1.471.682.125,00	1	1.493.757.357,00	5.03.0.00.0.00.01.00 - BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH	
5.03.01.1.06.0010 - Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				52.184.390,00		52.236.574,00		53.020.123,00		54.398.646,00		55.214.625,00	5.03.0.00.0.00.01.00 - BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH	
Terlaksananya Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	-	1	52.184.390,00	1	52.236.574,00	1	53.020.123,00	1	54.398.646,00	1	55.214.625,00	5.03.0.00.0.00.01.00 - BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH	
5.03.01.1.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				278.510.854,00		274.014.194,00		278.124.407,00		285.355.642,00		289.635.976,00	5.03.0.00.0.00.01.00 - BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH	
Persentase Pemenuhan Kebutuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	-	3	44.160.854,00	3	44.205.014,00	3	44.868.090,00	3	46.034.660,00	3	46.725.180,00	5.03.0.00.0.00.01.00 - BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH	
	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	-	3	234.350.000,00	3	229.809.180,00	3	233.256.317,00	3	239.320.982,00	3	242.910.796,00	5.03.0.00.0.00.01.00 - BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH	
5.03.01.1.07.0005 - Pengadaan Mebel				44.160.854,00		44.205.014,00		44.868.090,00		46.034.660,00		46.725.180,00	5.03.0.00.0.00.01.00 - BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH	
Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	-	3	44.160.854,00	3	44.205.014,00	3	44.868.090,00	3	46.034.660,00	3	46.725.180,00	5.03.0.00.0.00.01.00 - BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH	
5.03.01.1.07.0006 - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya				234.350.000,00		229.809.180,00		233.256.317,00		239.320.982,00		242.910.796,00	5.03.0.00.0.00.01.00 - BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH	
Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	-	3	234.350.000,00	3	229.809.180,00	3	233.256.317,00	3	239.320.982,00	3	242.910.796,00	5.03.0.00.0.00.01.00 - BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH	
5.03.01.1.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				1.487.761.835,00		1.489.249.596,00		1.511.588.340,00		1.550.889.637,00		1.574.152.981,00	5.03.0.00.0.00.01.00 - BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH	
Persentase Pemenuhan Kebutuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12	12	812.449.732,00	12	813.262.181,00	12	825.461.114,00	12	846.923.103,00	12	859.626.949,00	5.03.0.00.0.00.01.00 - BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH	
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12	12	675.312.103,00	12	675.987.415,00	12	686.127.226,00	12	703.966.534,00	12	714.526.032,00	5.03.0.00.0.00.01.00 - BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH	
5.03.01.1.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				675.312.103,00		675.987.415,00		686.127.226,00		703.966.534,00		714.526.032,00	5.03.0.00.0.00.01.00 - BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH	
Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12	12	675.312.103,00	12	675.987.415,00	12	686.127.226,00	12	703.966.534,00	12	714.526.032,00	5.03.0.00.0.00.01.00 - BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
5.03.01.1.08.0004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				812.449.732,00		813.262.181,00		825.461.114,00		846.923.103,00		859.626.949,00	5.03.0.00.0.00.01.00 00 - BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH	
Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12	12	812.449.732,00	12	813.262.181,00	12	825.461.114,00	12	846.923.103,00	12	859.626.949,00	5.03.0.00.0.00.01.00 00 - BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH	
5.03.01.1.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				420.122.000,00		420.542.122,00		740.152.007,00		759.395.958,00		770.786.897,00	5.03.0.00.0.00.01.00 00 - BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH	
Persentase Pemenuhan Kebutuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	14	14	108.020.000,00	14	108.128.020,00	14	414.957.000,00	14	425.745.882,00	14	432.132.070,00	5.03.0.00.0.00.01.00 00 - BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH	
	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1	1	131.502.000,00	1	131.633.502,00	1	133.608.004,00	1	137.081.812,00	1	139.138.039,00	5.03.0.00.0.00.01.00 00 - BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH	
	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	1	1	41.730.000,00	1	41.771.730,00	1	50.493.000,00	1	51.805.818,00	1	52.582.905,00	5.03.0.00.0.00.01.00 00 - BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH	
	Jumlah Mebel yang Dipelihara	0	100	20.000.000,00	100	20.020.000,00	100	20.320.300,00	100	20.848.627,00	100	21.161.357,00	5.03.0.00.0.00.01.00 00 - BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH	
	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	145	150	118.870.000,00		118.988.870,00		120.773.703,00		123.913.819,00		125.772.526,00	5.03.0.00.0.00.01.00 00 - BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH	
5.03.01.1.09.0001 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				41.730.000,00		41.771.730,00		50.493.000,00		51.805.818,00		52.582.905,00	5.03.0.00.0.00.01.00 00 - BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH	
Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	1	1	41.730.000,00	1	41.771.730,00	1	50.493.000,00	1	51.805.818,00	1	52.582.905,00	5.03.0.00.0.00.01.00 00 - BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH	
5.03.01.1.09.0002 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				108.020.000,00		108.128.020,00		414.957.000,00		425.745.882,00		432.132.070,00	5.03.0.00.0.00.01.00 00 - BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH	
Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	14	14	108.020.000,00	14	108.128.020,00	14	414.957.000,00	14	425.745.882,00	14	432.132.070,00	5.03.0.00.0.00.01.00 00 - BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH	
5.03.01.1.09.0005 - Pemeliharaan Mebel				20.000.000,00		20.020.000,00		20.320.300,00		20.848.627,00		21.161.357,00	5.03.0.00.0.00.01.00 00 - BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH	
Terlaksananya Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	0	100	20.000.000,00	100	20.020.000,00	100	20.320.300,00	100	20.848.627,00	100	21.161.357,00	5.03.0.00.0.00.01.00 00 - BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH	
5.03.01.1.09.0006 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				118.870.000,00		118.988.870,00		120.773.703,00		123.913.819,00		125.772.526,00	5.03.0.00.0.00.01.00 00 - BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	145	150	118.870.000,00		118.988.870,00		120.773.703,00		123.913.819,00		125.772.526,00	5.03.0.00.0.00.01.0000 - BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH	
5.03.01.1.09.0009 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				131.502.000,00		131.633.502,00		133.608.004,00		137.081.812,00		139.138.039,00	5.03.0.00.0.00.01.0000 - BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH	
Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1	1	131.502.000,00	1	131.633.502,00	1	133.608.004,00	1	137.081.812,00	1	139.138.039,00	5.03.0.00.0.00.01.0000 - BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH	
5.03.02 - PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH				5.018.333.594,00		5.215.286.587,00		5.452.013.563,00		5.695.863.812,00		5.873.049.249,00		
Meningkatnya kualitas layanan administrasi kepegawaian	Persentase Pelayanan ASN yang terselesaikan	0	0	5.018.333.594,00	0	5.215.286.587,00	0	5.452.013.563,00	0	5.695.863.812,00	0	5.873.049.249,00	5.03.0.00.0.00.01.0000 - BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH	
5.03.02.1.01 - Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN				747.324.461,00		1.068.673.983,00		1.117.832.989,00		1.162.310.935,00		1.194.422.677,00	5.03.0.00.0.00.01.0000 - BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH	
Persentase Penyelesaian Fasilitas Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	1	2	107.896.800,00	2	154.292.429,00	2	161.389.875,00	2	168.813.809,00	2	174.215.851,00	5.03.0.00.0.00.01.0000 - BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH	
	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	1	5	146.423.885,00	5	209.386.155,00	5	219.017.918,00	5	229.092.742,00	5	236.423.710,00	5.03.0.00.0.00.01.0000 - BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH	
	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	1	1	2.500.000,00	1	3.575.000,00	1	3.739.460,00	1	3.911.478,00	1	4.036.643,00	5.03.0.00.0.00.01.0000 - BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH	
	Jumlah Lembaga Profesi ASN yang Difasilitasi	1		393.434.466,00		562.611.286,00		588.491.405,00		608.619.635,00		623.013.258,00	5.03.0.00.0.00.01.0000 - BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH	
	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Data Kepegawaian	1	5	15.859.310,00	5	22.678.813,00	5	23.722.038,00	5	24.813.252,00	5	25.607.276,00	5.03.0.00.0.00.01.0000 - BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH	
	Jumlah Dokumen Kegiatan Koordinasi dan Fasilitas Pengadaan PNS dan PPPK	1	1	81.210.000,00	1	116.130.300,00	1	121.472.293,00	1	127.060.019,00	1	131.125.939,00	5.03.0.00.0.00.01.0000 - BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH	
5.03.02.1.01.0002 - Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN				2.500.000,00		3.575.000,00		3.739.460,00		3.911.478,00		4.036.643,00	5.03.0.00.0.00.01.0000 - BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH	
Terlaksananya Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	1	1	2.500.000,00	1	3.575.000,00	1	3.739.460,00	1	3.911.478,00	1	4.036.643,00	5.03.0.00.0.00.01.0000 - BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH	
5.03.02.1.01.0003 - Koordinasi dan Fasilitas Pengadaan PNS dan PPPK				81.210.000,00		116.130.300,00		121.472.293,00		127.060.019,00		131.125.939,00	5.03.0.00.0.00.01.0000 - BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Terlaksananya Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	Jumlah Dokumen Kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	1	1	81.210.000,00	1	116.130.300,00	1	121.472.293,00	1	127.060.019,00	1	131.125.939,00	5.03.0.00.0.00.01.00 00 - BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH	
5.03.02.1.01.0006 - Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian				107.896.800,00		154.292.429,00		161.389.875,00		168.813.809,00		174.215.851,00	5.03.0.00.0.00.01.00 00 - BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH	
Terlaksananya Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	1	2	107.896.800,00	2	154.292.429,00	2	161.389.875,00	2	168.813.809,00	2	174.215.851,00	5.03.0.00.0.00.01.00 00 - BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH	
5.03.02.1.01.0008 - Fasilitasi Lembaga Profesi ASN				393.434.466,00		562.611.286,00		588.491.405,00		608.619.635,00		623.013.258,00	5.03.0.00.0.00.01.00 00 - BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH	
Terfasilitasinya Lembaga Profesi ASN	Jumlah Lembaga Profesi ASN yang Difasilitasi	1		393.434.466,00		562.611.286,00		588.491.405,00		608.619.635,00		623.013.258,00	5.03.0.00.0.00.01.00 00 - BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH	
5.03.02.1.01.0010 - Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian				146.423.885,00		209.386.155,00		219.017.918,00		229.092.742,00		236.423.710,00	5.03.0.00.0.00.01.00 00 - BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH	
Terkelolanya Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	1	5	146.423.885,00	5	209.386.155,00	5	219.017.918,00	5	229.092.742,00	5	236.423.710,00	5.03.0.00.0.00.01.00 00 - BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH	
5.03.02.1.01.0011 - Pengelolaan Data Kepegawaian				15.859.310,00		22.678.813,00		23.722.038,00		24.813.252,00		25.607.276,00	5.03.0.00.0.00.01.00 00 - BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH	
Terkelolanya Data Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Data Kepegawaian	1	5	15.859.310,00	5	22.678.813,00	5	23.722.038,00	5	24.813.252,00	5	25.607.276,00	5.03.0.00.0.00.01.00 00 - BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH	
5.03.02.1.02 - Mutasi dan Promosi ASN				48.531.531,00		69.400.089,00		72.592.492,00		75.931.747,00		78.361.562,00	5.03.0.00.0.00.01.00 00 - BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH	
Persentase Penyelesaian Administrasi Mutasi, Kependidikan dan Promosi ASN	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Mutasi Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, Jabatan Pelaksana dan Mutasi ASN Antar Daerah	1	1	2.250.000,00	1	3.217.500,00	1	3.365.505,00	1	3.520.318,00	1	3.632.968,00	5.03.0.00.0.00.01.00 00 - BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH	
	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Promosi ASN	1	1	20.158.630,00	1	28.826.841,00	1	30.152.875,00	1	31.539.907,00	1	32.549.184,00	5.03.0.00.0.00.01.00 00 - BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH	
	Jumlah Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	2	1	26.122.901,00	1	37.355.748,00	1	39.074.112,00	1	40.871.522,00	1	42.179.410,00	5.03.0.00.0.00.01.00 00 - BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH	
5.03.02.1.02.0001 - Pengelolaan Mutasi ASN				2.250.000,00		3.217.500,00		3.365.505,00		3.520.318,00		3.632.968,00	5.03.0.00.0.00.01.00 00 - BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Terlaksananya Mutasi ASN yang Meliputi Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, Jabatan Pelaksana dan Mutasi ASN Antar Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Mutasi Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, Jabatan Pelaksana dan Mutasi ASN Antar Daerah	1	1	2.250.000,00	1	3.217.500,00	1	3.365.505,00	1	3.520.318,00	1	3.632.968,00	5.03.0.00.0.00.01.00 00 - BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH	
5.03.02.1.02.0002 - Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN				26.122.901,00		37.355.748,00		39.074.112,00		40.871.522,00		42.179.410,00	5.03.0.00.0.00.01.00 00 - BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH	
Terlaksananya Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	Jumlah Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	2	1	26.122.901,00	1	37.355.748,00	1	39.074.112,00	1	40.871.522,00	1	42.179.410,00	5.03.0.00.0.00.01.00 00 - BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH	
5.03.02.1.02.0003 - Pengelolaan Promosi ASN				20.158.630,00		28.826.841,00		30.152.875,00		31.539.907,00		32.549.184,00	5.03.0.00.0.00.01.00 00 - BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH	
Terlaksananya Pengelolaan Promosi ASN	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Promosi ASN	1	1	20.158.630,00	1	28.826.841,00	1	30.152.875,00	1	31.539.907,00	1	32.549.184,00	5.03.0.00.0.00.01.00 00 - BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH	
5.03.02.1.03 - Pengembangan Kompetensi ASN				2.466.124.294,00		3.526.557.739,00		3.685.603.186,00		3.855.140.931,00		3.978.505.443,00	5.03.0.00.0.00.01.00 00 - BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH	
Persentase Penyelesaian Perumusan Kebijakan dan Fasilitasi Pengembangan Kompetensi ASN	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Diklat dan Sertifikasi ASN	1	1	3.000.000,00	1	4.290.000,00	1	4.487.340,00	1	4.693.757,00	1	4.843.957,00	5.03.0.00.0.00.01.00 00 - BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH	
	Jumlah Fungsional ASN yang Dibina	0	100	32.194.149,00	100	46.037.633,00	100	48.155.364,00	100	50.370.510,00	100	51.982.367,00	5.03.0.00.0.00.01.00 00 - BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH	
	Jumlah Dokumen Pengelolaan Assessment Center	1	1	542.426.843,00	1	775.670.385,00	1	808.175.016,00	1	845.351.066,00	1	872.402.301,00	5.03.0.00.0.00.01.00 00 - BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH	
	Jumlah Dokumen Hasil Pendidikan Lanjutan ASN yang Dikelola	1	1	1.219.669.000,00	1	1.744.126.670,00	1	1.824.356.496,00	1	1.908.276.895,00	1	1.969.341.756,00	5.03.0.00.0.00.01.00 00 - BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH	
	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Kerja Sama Pelaksanaan Diklat	1	1	284.301.327,00	1	406.550.897,00	1	425.252.238,00	1	444.813.841,00	1	459.047.884,00	5.03.0.00.0.00.01.00 00 - BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH	
	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengembangan Karir dalam Jabatan Fungsional	1	1	23.931.975,00	1	34.222.724,00	1	35.796.969,00	1	37.443.630,00	1	38.641.826,00	5.03.0.00.0.00.01.00 00 - BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH	
	Jumlah ASN yang Mendapatkan Layanan Sertifikasi Jabatan ASN	7	7	200.911.000,00	7	287.302.730,00	7	300.518.655,00	7	314.342.513,00	7	324.401.474,00	5.03.0.00.0.00.01.00 00 - BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH	
	Jumlah ASN yang Mendapatkan Layanan Fasilitasi Sertifikasi Fungsional ASN	40	55	159.690.000,00	55	228.356.700,00	55	238.861.108,00	55	249.848.719,00	55	257.843.878,00	5.03.0.00.0.00.01.00 00 - BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
5.03.02.1.03.0002 - Pengelolaan Assessment Center				542.426.843,00		775.670.385,00		808.175.016,00		845.351.066,00		872.402.301,00	5.03.0.00.0.00.01.00 00 - BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH	
Terkelolanya Assessment Center	Jumlah Dokumen Pengelolaan Assessment Center	1	1	542.426.843,00	1	775.670.385,00	1	808.175.016,00	1	845.351.066,00	1	872.402.301,00	5.03.0.00.0.00.01.00 00 - BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH	
5.03.02.1.03.0003 - Pengeloan Administrasi Diklat dan Sertifikasi ASN				3.000.000,00		4.290.000,00		4.487.340,00		4.693.757,00		4.843.957,00	5.03.0.00.0.00.01.00 00 - BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH	
Terkelolanya Administrasi Diklat dan Sertifikasi ASN	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Diklat dan Sertifikasi ASN	1	1	3.000.000,00	1	4.290.000,00	1	4.487.340,00	1	4.693.757,00	1	4.843.957,00	5.03.0.00.0.00.01.00 00 - BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH	
5.03.02.1.03.0004 - Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN				1.219.669.000,00		1.744.126.670,00		1.824.356.496,00		1.908.276.895,00		1.969.341.756,00	5.03.0.00.0.00.01.00 00 - BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH	
Terlaksananya Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	Jumlah Dokumen Hasil Pendidikan Lanjutan ASN yang Dikelola	1	1	1.219.669.000,00	1	1.744.126.670,00	1	1.824.356.496,00	1	1.908.276.895,00	1	1.969.341.756,00	5.03.0.00.0.00.01.00 00 - BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH	
5.03.02.1.03.0005 - Koordinasi dan Kerja Sama Pelaksanaan Diklat				284.301.327,00		406.550.897,00		425.252.238,00		444.813.841,00		459.047.884,00	5.03.0.00.0.00.01.00 00 - BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH	
Terlaksananya Koordinasi dan Kerja Sama Pelaksanaan Diklat	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Kerja Sama Pelaksanaan Diklat	1	1	284.301.327,00	1	406.550.897,00	1	425.252.238,00	1	444.813.841,00	1	459.047.884,00	5.03.0.00.0.00.01.00 00 - BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH	
5.03.02.1.03.0006 - Fasilitasi Sertifikasi Jabatan ASN				200.911.000,00		287.302.730,00		300.518.655,00		314.342.513,00		324.401.474,00	5.03.0.00.0.00.01.00 00 - BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH	
Terfasilitasinya Sertifikasi Jabatan ASN	Jumlah ASN yang Mendapatkan Layanan Sertifikasi Jabatan ASN	7	7	200.911.000,00	7	287.302.730,00	7	300.518.655,00	7	314.342.513,00	7	324.401.474,00	5.03.0.00.0.00.01.00 00 - BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH	
5.03.02.1.03.0010 - Fasilitasi Sertifikasi Fungsional ASN				159.690.000,00		228.356.700,00		238.861.108,00		249.848.719,00		257.843.878,00	5.03.0.00.0.00.01.00 00 - BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH	
Terfasilitasinya Sertifikasi Fungsional ASN	Jumlah ASN yang Mendapatkan Layanan Fasilitasi Sertifikasi Fungsional ASN	40	55	159.690.000,00	55	228.356.700,00	55	238.861.108,00	55	249.848.719,00	55	257.843.878,00	5.03.0.00.0.00.01.00 00 - BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH	
5.03.02.1.03.0013 - Pembinaan Jabatan Fungsional ASN				32.194.149,00		46.037.633,00		48.155.364,00		50.370.510,00		51.982.367,00	5.03.0.00.0.00.01.00 00 - BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH	
Meningkatnya Pembinaan Jabatan Fungsional ASN	Jumlah Fungsional ASN yang Dibina	0	100	32.194.149,00	100	46.037.633,00	100	48.155.364,00	100	50.370.510,00	100	51.982.367,00	5.03.0.00.0.00.01.00 00 - BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH	
5.03.02.1.03.0014 - Fasilitasi Pengembangan Karir dalam Jabatan Fungsional				23.931.975,00		34.222.724,00		35.796.969,00		37.443.630,00		38.641.826,00	5.03.0.00.0.00.01.00 00 - BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Terfasilitasinya Pengembangan Karir dalam Jabatan Fungsional	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitas Pengembangan Karir dalam Jabatan Fungsional	1	1	23.931.975,00	1	34.222.724,00	1	35.796.969,00	1	37.443.630,00	1	38.641.826,00	5.03.0.00.0.00.01.0000 - BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH	
5.03.02.1.04 - Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur				1.756.353.308,00		550.654.776,00		575.984.896,00		602.480.199,00		621.759.567,00	5.03.0.00.0.00.01.0000 - BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH	
Persentase Penyelesaian Evaluasi Kinerja dan Disiplin Aparatur	Jumlah ASN yang Diberikan Penghargaan	20	20	1.635.920.673,00	20	378.436.109,00	20	395.844.171,00	20	414.053.002,00	20	427.302.698,00	5.03.0.00.0.00.01.0000 - BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH	
	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	1	1	41.347.730,00	1	59.127.253,00	1	61.847.107,00	1	64.692.074,00	1	66.762.220,00	5.03.0.00.0.00.01.0000 - BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH	
	Jumlah Dokumen Proses Izin Perceraian Pegawai yang Dilayani	40	30	11.877.570,00	30	16.984.925,00	30	17.766.231,00	30	18.583.478,00	30	19.178.149,00	5.03.0.00.0.00.01.0000 - BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH	
	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	1	1	6.100.000,00	1	8.723.000,00	1	9.124.258,00	1	9.543.973,00	1	9.849.381,00	5.03.0.00.0.00.01.0000 - BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH	
	Jumlah ASN yang Mendapatkan Pembinaan Kedisiplinan	80	80	56.907.335,00	80	81.377.489,00	80	85.120.853,00	80	89.036.412,00	80	91.885.578,00	5.03.0.00.0.00.01.0000 - BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH	
	Jumlah ASN yang Diberikan Tanda Jasa		1000	4.200.000,00	1000	6.006.000,00	1000	6.282.276,00	1000	6.571.260,00	1000	6.781.541,00	5.03.0.00.0.00.01.0000 - BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH	
5.03.02.1.04.0002 - Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur				6.100.000,00		8.723.000,00		9.124.258,00		9.543.973,00		9.849.381,00	5.03.0.00.0.00.01.0000 - BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH	
Terlaksananya Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	1	1	6.100.000,00	1	8.723.000,00	1	9.124.258,00	1	9.543.973,00	1	9.849.381,00	5.03.0.00.0.00.01.0000 - BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH	
5.03.02.1.04.0004 - Pengelolaan Pemberian Penghargaan bagi Pegawai				1.635.920.673,00		378.436.109,00		395.844.171,00		414.053.002,00		427.302.698,00	5.03.0.00.0.00.01.0000 - BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH	
Terlaksananya Pemberian Penghargaan bagi ASN	Jumlah ASN yang Diberikan Penghargaan	20	20	1.635.920.673,00	20	378.436.109,00	20	395.844.171,00	20	414.053.002,00	20	427.302.698,00	5.03.0.00.0.00.01.0000 - BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH	
5.03.02.1.04.0005 - Pengelolaan Tanda Jasa bagi Pegawai				4.200.000,00		6.006.000,00		6.282.276,00		6.571.260,00		6.781.541,00	5.03.0.00.0.00.01.0000 - BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH	
Terlaksananya Pemberian Tanda Jasa bagi ASN	Jumlah ASN yang Diberikan Tanda Jasa		1000	4.200.000,00	1000	6.006.000,00	1000	6.282.276,00	1000	6.571.260,00	1000	6.781.541,00	5.03.0.00.0.00.01.0000 - BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH	
5.03.02.1.04.0007 - Pembinaan Disiplin ASN				56.907.335,00		81.377.489,00		85.120.853,00		89.036.412,00		91.885.578,00	5.03.0.00.0.00.01.0000 - BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Meningkatnya Disiplin ASN	Jumlah ASN yang Mendapatkan Pembinaan Kedisiplinan	80	80	56.907.335,00	80	81.377.489,00	80	85.120.853,00	80	89.036.412,00	80	91.885.578,00	5.03.0.00.0.00.01.00 00 - BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH	
5.03.02.1.04.0008 - Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN				41.347.730,00		59.127.253,00		61.847.107,00		64.692.074,00		66.762.220,00	5.03.0.00.0.00.01.00 00 - BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH	
Terlaksananya Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	1	1	41.347.730,00	1	59.127.253,00	1	61.847.107,00	1	64.692.074,00	1	66.762.220,00	5.03.0.00.0.00.01.00 00 - BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH	
5.03.02.1.04.0009 - Pelayanan Proses Izin Perceraian Pegawai				11.877.570,00		16.984.925,00		17.766.231,00		18.583.478,00		19.178.149,00	5.03.0.00.0.00.01.00 00 - BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH	
Terlaksananya Pelayanan Proses Izin Perceraian Pegawai	Jumlah Dokumen Proses Izin Perceraian Pegawai yang Dilayani	40	30	11.877.570,00	30	16.984.925,00	30	17.766.231,00	30	18.583.478,00	30	19.178.149,00	5.03.0.00.0.00.01.00 00 - BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH	
Meningkatnya pengembangan kompetensi, tata kelola pengembangan karir ASN dan kualitas kinerja ASN				-		-		-		-		-	5.03.0.00.0.00.01.00 00 - BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH	
	Persentase Pelayanan ASN yang terselesaikan	0	0		0		0		0		0		5.03.0.00.0.00.01.00 00 - BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH	
													5.03.0.00.0.00.01.00 00 - BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH	

## Matrik Verifikasi Penyusunan Renstra Perangkat Daerah Provinsi Riau Tahun 2025 – 2029

NO	BAB	SUBSTANSI MATERI	INTEGRASI DENGAN RPJMD	TABEL/ SUBSTANSI	HASIL VERIFIKASI		
					SESUAI	PERLU PERBAIKAN	CATATAN PERBAIKAN
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>1</b>	<b>BAB I PENDAHULUAN</b>						
	Latar Belakang	Merumuskan latar belakang penyusunan Renstra PD Tahun 2025 -2029 berupa gambaran kondisi yang mendasari disusunnya Renstra PD Tahun 2025-2029 dan dilengkapi definisi, amanat regulasi, dan nilai strategis Renstra PD				√	Judul Cover Rancangan Renstra jangan lupa tagline, logo P4GN
	Dasar Hukum Penyusunan	Mengidentifikasi dasar hukum yang relevan dan signifikan dalam penyusunan Renstra PD Tahun 2025-2029, serta disusun sesuai dengan kaidah penyusunan produk hukum				√	Dasar hukum sesuaikan dengan RPJMD ditambah dengan urusan PD masing masing
	Maksud dan Tujuan	Menguraikan Maksud dan Tujuan penyusunan Renstra PD Tahun 2025-2029			√		
	Sistematika Penyusunan	Menjelaskan sistematika penulisan yang berisi uraian ringkas tentang masing-masing bab dalam Renstra PD Tahun 2025-2029			√		
<b>2</b>	<b>BAB II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH</b>						
	Gambaran	Memuat informasi tentang peran			√		

NO	BAB	SUBSTANSI MATERI	INTEGRASI DENGAN RPJMD	TABEL/ SUBSTANSI	HASIL VERIFIKASI		
					SESUAI	PERLU PERBAIKAN	CATATAN PERBAIKAN
1	2	3	4	5	6	7	8
	Pelayanan Perangkat Daerah	(tugas dan fungsi) Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, mengulas secara ringkas apa saja sumber daya yang dimiliki Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya, mengemukakan capaian-capaian penting yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah periode sebelumnya, mengemukakan capaian program prioritas Perangkat Daerah yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan RPJMD periode sebelumnya, dan mengulas hambatan-hambatan utama yang masih dihadapi dan dinilai perlu diatasi melalui Renstra Perangkat Daerah ini.					
	Tugas, fungsi dan Struktur Perangkat Daerah	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Memuat penjelasan umum tentang dasar hukum pembentukan Perangkat Daerah;</li> <li>- Struktur organisasi Perangkat Daerah serta uraian tugas dan fungsi sampai dengan dua eselon dibawah kepala Perangkat Daerah;</li> <li>- Uraian tentang struktur organisasi Perangkat Daerah ditujukan untuk menunjukkan organisasi, jumlah personil, dan</li> </ul>				√	Sederhanakan penjabaran tusi (uraian tusi per jabatan tdk di sajikan kembali)

NO	BAB	SUBSTANSI MATERI	INTEGRASI DENGAN RPJMD	TABEL/ SUBSTANSI	HASIL VERIFIKASI		
					SESUAI	PERLU PERBAIKAN	CATATAN PERBAIKAN
1	2	3	4	5	6	7	8
		tata laksana Perangkat Daerah (proses, prosedur, mekanisme).					
	Sumber daya Perangkat Daerah	Memuat penjelasan ringkas tentang sumber daya yang dimiliki Perangkat Daerah dalam menjalankan tugas dan fungsinya, mencakup sumber daya manusia, asset/modal, dan unit usaha yang masih operasional.				√	Cek kembali data2 yg disajikan dan Update data tahun 2024
	Kinerja pelayanan Perangkat Daerah (termasuk capaian SPM sesuai dengan tupoksinya	<p>- Menunjukkan tingkat capaian kinerja Perangkat Daerah berdasarkan sasaran/target Renstra Perangkat Daerah periode sebelumnya, menurut SPM untuk urusan wajib, dan/atau indikator kinerja pelayanan Perangkat Daerah dan/atau indikator lainnya</p> <p>- Mengemukakan macam pelayanan, perkiraan besaran kebutuhan pelayanan, dan arahan lokasi pengembangan pelayanan yang dibutuhkan.</p>				√	<p>Lengkapi narasi pada data IKU dan uraikan masing masing komponen dari IKU tersebut</p> <p>Data profil ASN provinsi riau (yang terdiri dari jabatan, pendidikan, jumlah ASN per gender, status PNS/PPPK) per OPD</p> <p>Data formasi dan rencana kebutuhan ASN provinsi riau sampai 2030 termasuk pensiun pegawai</p>



NO	BAB	SUBSTANSI MATERI	INTEGRASI DENGAN RPJMD	TABEL/ SUBSTANSI	HASIL VERIFIKASI		
					SESUAI	PERLU PERBAIKAN	CATATAN PERBAIKAN
1	2	3	4	5	6	7	8
	Dukungan BUMD dalam pencapaian kinerja Perangkat Daerah (apabila ada)				√		
	Kerjasama daerah yang menjadi Perangkat Daerah (apabila ada)				√		
	Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah				√		
	Permasalahan pelayanan Perangkat Daerah	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pernyataan yang disimpulkan dari kesenjangan antara realita /capaian pembangunan dengan kondisi ideal yang seharusnya tersedia</li> <li>- Mengidentifikasi permasalahan yang dirumuskan dari Bab II, Rancangan Awal RPJMD Provinsi Riau Tahun 2025-2029 yang berkaitan dengan pelayanan PD dan Laporan KLHS RPJMD Provinsi Riau Tahun 2025-2029 yang berkaitan dengan</li> </ul>			√		

NO	BAB	SUBSTANSI MATERI	INTEGRASI DENGAN RPJMD	TABEL/ SUBSTANSI	HASIL VERIFIKASI		
					SESUAI	PERLU PERBAIKAN	CATATAN PERBAIKAN
1	2	3	4	5	6	7	8
		<p>pelayanan PD, ataupun hasil penjangkaran aspirasi yang dilakukan oleh PD.</p> <p>Rumusan permasalahan merupakan pernyataan kondisi (realita) yang dapat disimpulkan dari kesenjangan antara realita/ capaian pembangunan dengan kondisi ideal yang seharusnya tersedia. Perumusan permasalahan dapat menggunakan kertas kerja sehingga yang disajikan dalam sub bab ini berupa permasalahan yang bersifat dominan</p>					
	Isu strategis Perangkat Daerah	<p>Mengidentifikasi isu strategis sesuai lingkungan dinamis (isu nasional, dan regional) yang dapat mempengaruhi PD baik secara langsung ataupun tidak langsung.</p> <p>Isu strategis ini dapat dirumuskan dari berbagai sumber yang dapat dipertanggungjawabkan antara lain: RPJMN 2025-2029, Renstra K/L, laporan resmi dari lembaga pemerintah/ lembaga 2025-2029, ataupun luar negeri, Laporan KLHS RPJMD hasil penjangkaran aspirasi yang dilakukan oleh PD</p>			√		

NO	BAB	SUBSTANSI MATERI	INTEGRASI DENGAN RPJMD	TABEL/ SUBSTANSI	HASIL VERIFIKASI		
					SESUAI	PERLU PERBAIKAN	CATATAN PERBAIKAN
1	2	3	4	5	6	7	8
3	<b>BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN</b>						
	Tujuan Renstra PD Provinsi Riau Tahun 2025 - 2029	<p>Kinerja yang ingin diwujudkan selama 5 tahun untuk menggambarkan kebermanfaatan PD berdasarkan NSPK yang diterbitkan oleh Pemerintah Pusat dan/atau memperhatikan sasaran RPJMD Provinsi Riau Tahun 2025 - 2029 Tujuan Renstra PD Tahun 2025-2029 yang penentuannya didasarkan pada:</p> <p>a. Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria (NSPK) yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat sesuai dengan kewenangannya;</p> <p>b. Sasaran RPJMD Provinsi Riau Tahun 2025-2029</p> <p>Perumusan Tujuan Renstra PD disusun dengan:</p> <p>a. kalimat kondisi;</p> <p>b. dapat diukur untuk jangka waktu 5 (lima) tahun;</p> <p>c. disusun dengan bahasa yang jelas dan mudah dipahami;</p> <p>d. bersifat lebih khas sesuai dengan tugas dan fungsi PD serta merupakan intermediate outcome</p>				√	<p>Setelah tabel 3.1 ada tabel pentahapan renstra</p> <p>Perbaiki tabel 3.2 sesuaikan dengan inmen (sandingan arah kebijakan RPJMD dan arah kebijakan Renstra)</p> <p>Pohon kinerja diletakkan di lampiran</p> <p>Cascading diletakkan di bab IV</p>
	Sasaran Renstra	Rangkaian kinerja yang dapat			√		

NO	BAB	SUBSTANSI MATERI	INTEGRASI DENGAN RPJMD	TABEL/ SUBSTANSI	HASIL VERIFIKASI		
					SESUAI	PERLU PERBAIKAN	CATATAN PERBAIKAN
1	2	3	4	5	6	7	8
	PD Provinsi Riau Tahun 2025 - 2029	<p>berupa tahapan dan fokus/aspek prioritas menuju terwujudnya pencapaian tujuan Renstra PD Sasaran Renstra PD Tahun 2025-2029 yang penentuannya didasarkan pada:</p> <p>a) Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria (NSPK) yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat sesuai dengan kewenangannya;</p> <p>b) Sasaran RPJMD Provinsi Riau Tahun 2025-2029.</p> <p>Perumusan Sasaran Renstra PD disusun dengan:</p> <p>a. kalimat kondisi;</p> <p>b. dapat diukur untuk jangka waktu 5 (lima) tahun;</p> <p>c. disusun dengan bahasa yang jelas dan mudah dipahami;</p> <p>d. bersifat lebih khas sesuai dengan tugas dan fungsi PD serta merupakan intermediate outcome</p>					
	Strategi Perangkat Daerah dalam mencapai tujuan dan sasaran Renstra PD Riau Tahun 2025-2029	Strategi Renstra PD Tahun 2025-2029 adalah rencana tindakan yang langkah/upaya komprehensif berisikan langkah yang akan dilakukan diantaranya berupa optimalisasi sumber daya, tahapan, fokus dan penentuan program/ kegiatan/subkegiatan				√	Sesuaikan dengan sistematika inmen no.2

NO	BAB	SUBSTANSI MATERI	INTEGRASI DENGAN RPJMD	TABEL/ SUBSTANSI	HASIL VERIFIKASI		
					SESUAI	PERLU PERBAIKAN	CATATAN PERBAIKAN
1	2	3	4	5	6	7	8
		dalam menghadapi lingkungan yang dinamis untuk mencapai tujuan/sasaran Renstra PD					
	Arah kebijakan Perangkat Daerah dalam mencapai tujuan dan sasaran Renstra PD Provinsi Riau Tahun 2025-2029	Arah Kebijakan Renstra PD Provinsi Riau Tahun 2025-2029 adalah rangkaian kerja yang merupakan operasionalisasi NSPK sesuai dengan tugas dan fungsi PD dan arah kebijakan RPJMD Provinsi Riau Tahun 2025-2029 serta selaras dengan strategi dalam rangka mencapai target tujuan dan sasaran Renstra PD				√	Sesuaikan dengan sistematika inmen no.2
4	<b>BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN</b>						
	Uraian Program	- Program, mengacu pada nomenklatur yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri beserta pemutakhirannya - Program, kegiatan dan subkegiatan merupakan hasil cascading dari tujuan, sasaran, outcome, dan output				√	Tambahkan gambar perumusan program kegiatan dan sub kegiatan (cascading lampiran 1)  Tabel 4.1 sesuaikan dengan inmen no 2(cascading)
	Uraian Kegiatan	- Kegiatan dan subkegiatan mengacu pada nomenklatur yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri beserta				√	Tabel 4.2 tabel rencana program kegiatan dan sub kegiatan dan

NO	BAB	SUBSTANSI MATERI	INTEGRASI DENGAN RPJMD	TABEL/ SUBSTANSI	HASIL VERIFIKASI		
					SESUAI	PERLU PERBAIKAN	CATATAN PERBAIKAN
1	2	3	4	5	6	7	8
		pemutakhirannya - Program, kegiatan dan subkegiatan merupakan hasil cascading dari tujuan, sasaran, outcome, dan output					pendanaan (kertas kerja lampiran 4)
	Uraian Sub kegiatan beserta kinerja, indikator, target, dan pagu indikatif	- Subkegiatan mengacu pada nomenklatur yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri beserta pemutakhirannya - Program, kegiatan dan subkegiatan merupakan hasil cascading dari tujuan, sasaran, outcome, dan output				√	Tabel 4.2 tabel rencana program kegiatan dan sub kegiatan dan pendanaan (kertas kerja lampiran 4)
	Uraian Subkegiatan dalam rangka mendukung program prioritas pembangunan daerah						Tambahkan uraian trkait Subkegiatan dalam rangka mendukung program prioritas pembangunan daerah dan Tabel 4.3 sub kegiatan prioritas (kertas kerja lampiran 5) lampiran 5)
	Target keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran Renstra	Pada bagian ini dikemukakan indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Perangkat				√	Tabel 4.4 indiktaor kinerja utama (kertas kerja lampiran 6)

NO	BAB	SUBSTANSI MATERI	INTEGRASI DENGAN RPJMD	TABEL/ SUBSTANSI	HASIL VERIFIKASI		
					SESUAI	PERLU PERBAIKAN	CATATAN PERBAIKAN
1	2	3	4	5	6	7	8
	PD Provinsi Riau tahun 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah	Daerah dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD. Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD.					
	Target kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah Tahun 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Kunci (IKK)	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Indikator Kinerja Kunci adalah Indikator Kinerja yang menggambarkan keberhasilan penyelenggaraan suatu urusan pemerintahan sesuai dengan kewenangan daerah.</li> <li>- Pada bagian ini dikemukakan indikator kinerja Kunci (IKK) Perangkat Daerah yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Perangkat Daerah dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD. Indikator Kinerja Kunci (IKK) Perangkat Daerah merupakan indikator urusan Perangkat Daerah</li> </ul>				√	<p>Tabel 4.5 Indikator kinerja kunci (kertas kerja lampiran 7)</p> <p>Tabel 4.6 tabel tujuan sasaran program kegiatan sub kegiatan dan pendanaan (kertas kerja lampiran 8)</p>
5	<b>BAB V PENUTUP</b>						
	Penutup	Memuat kesimpulan penting substansial, kaidah pelaksanaan, dan pelaksanaan pengendalian			√		

NO	BAB	SUBSTANSI MATERI	INTEGRASI DENGAN RPJMD	TABEL/ SUBSTANSI	HASIL VERIFIKASI		
					SESUAI	PERLU PERBAIKAN	CATATAN PERBAIKAN
1	2	3	4	5	6	7	8
		dan evaluasi terhadap perencanaan dan pelaksanaan pembangunan berdasarkan urusan pemerintahan daerah					
	Tanggal dokumen	Tanggal 20 Juni 2025					
	<b>LAMPIRAN</b>					√	Tambahan
	Pohon kinerja						
	Laporan SIPD						

Pekanbaru, 23 Juni 2025

Dinas /Badan.....  
Provinsi Riau

Verifikator :  
Bappeda Provinsi Riau

1. ....

1. ....

2. ....

2. ....

3. ....

3. ....

4. ....

4. ....

NO	BAB	SUBSTANSI MATERI	INTEGRASI DENGAN RPJMD	TABEL/SUBSTANSI	HASIL VERIFIKASI		
					SESUAI	PERLU PERBAIKAN	CATATAN PERBAIKAN
1	2	3	4	5	6	7	8
		perencanaan dan pelaksanaan pembangunan berdasarkan urusan pemerintahan daerah					
	Tanggal dokumen	Tanggal 20 Juni 2025					
	LAMPIRAN				√		
	Pohon kinerja						
	Laporan SIPD						

Pekanbaru, 23 Juni 2025

**BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH  
PROVINSI RIAU**

Verifikator :  
**BAPPEDA PROVINSI  
RIAU**

1. T. FAISYAL, SE
2. HARRY PRABOWO, S.STP.,ME
3. MATWIMIYADI,  
S.Km.,M.Kes
4. NANANG KUSNADI, SE

1. R. Juansman
2. RIA ETTIKA
3. ARI DIANUARI
4. INDAH OKTAVIANI

*[Handwritten signatures and initials]*